

قول الحق

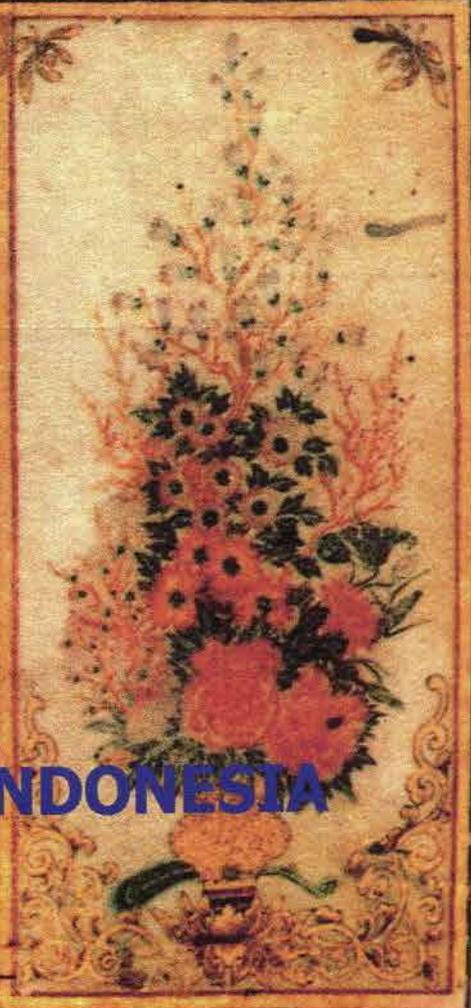
RIAU

Sebagai Pusat

BUDAYA, BAHASA DAN SEJARAH MELAYU



Handwritten Arabic text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is arranged in several lines and is partially obscured by the overlaid text.



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Handwritten text at the bottom of the page, including the date 'يوم الجمعة وقت حرم فو كليم ليم' and other illegible script.

سورة فتاوان

verklaring

**RIAU SEBAGAI PUSAT BUDAYA,
BAHASA DAN SEJARAH MELAYU**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI

PENGANTAR

Pendahuluan

Riau Selayang Pandang

Daftar Arsip yang diserahkan :

- Tekstual
- Peta
- Foto

این
عبدی
اسم
عنه
بن
عنه
فر
س
بس
تغ

Yang
rif Haa
ddin
rapora
its dge
uring
relliekt
dere be
lucshun
ed moske
ew lido
t den
kumatra
t to beken

ترسودان فتاوان این هاری 25 بوم
اقتوبر 1890

Aldus gedaan op heten den 25:
October 1890.



Handwritten signature in Arabic script.



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pengaruh globalisasi dewasa ini harus diimbangi peningkatan kesadaran nasional dengan mempertegas identitas sebagai bangsa Indonesia melalui pengungkapan kembali memori kolektif.

Arsip sebagai informasi terekam mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta kehidupan kebangsaan merupakan memori kolektif yang tidak saja berisi informasi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga sarat dengan nuansa yang bercorak kedaerahan.

Riau sebagai Pusat Budaya, Bahasa dan Sejarah Melayu merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Sehubungan dengan hal itu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupaya untuk memberikan kontribusi dalam menampilkan karakteristik Riau dalam nuansa kedaerahannya. Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Riau dalam perjalanan sejarahnya yang dibentuk berdasarkan memori kolektif. Gambaran suatu daerah yang memuat informasi yang mengenai pengalaman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kekuatan dalam membangun solidaritas bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keseluruhan bahan yang terhimpun dalam naskah ini diserahkan oleh ANRI kepada Provinsi Riau dalam rangka Program Citra Daerah. Secara bertahap kegiatan serupa akan dilakukan untuk daerah lainnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami berharap agar bahan yang diserahkan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya oleh generasi muda Riau untuk menelusuri, memahami dan mengembangkan Riau sebagai pusat budaya, bahasa dan sejarah Melayu.

Jakarta, Oktober 2003

Oman Sachroni

PENGANTAR

Riau sebagai Pusat Budaya, Bahasa dan Sejarah Melayu diharapkan dapat bercerita mengenai sejarah perjalanan Riau sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keseluruhan materi yang diliputi dalam naskah ini digali dari arsip yang telah tercipta berabad-abad lamanya. Sebagai memori kolektif, arsip ini ditampilkan kembali pada abad ini setelah melalui serangkaian kegiatan yang membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup panjang.

Penyusunan naskah ini merupakan kegiatan ANRI dalam rangka Program Citra Daerah. Semua materi yang ada dalam didalamnya berasal dari arsip mengenai Riau yang tersimpan di ANRI dengan rentang waktu tahun 1820 sampai tahun 1970.

Pada bagian **Pendahuluan** diuraikan gambaran umum mengenai keadaan geografi, sosial, ekonomi, perkembangan wilayah administrasi mulai dari masa kerajaan hingga masuknya Belanda, Jepang, peralihan dari Republik Indonesia Serikat ke NKRI serta perannya sebagai pusat budaya Melayu.

Upaya untuk menampilkan kehidupan Riau dari berbagai aspek diwakili sejumlah arsip visual dalam **Riau Selayang Pandang**. Pada bagian ini arsip disajikan dalam bentuk dan warna yang serupa dengan aslinya berupa hasil scanner.

Arsip mengenai Riau yang diserahkan tertuang dalam Daftar Arsip Yang Diserahkan terdiri dari:

1. Arsip tekstual sebanyak 1653 lembar dengan rincian 1024 lembar arsip sebelum Proklamasi dan 629 lembar arsip sesudah Proklamasi.
2. Arsip peta sebanyak 23 lembar.
3. Arsip foto sebanyak 173 lembar.

Arsip tekstual dan arsip peta telah dialih mediakan ke dalam 42 lembar microfiche dan diserahkan dengan peralatan bacanya (*microreader*). Sedangkan arsip foto dikemas dalam 4 buah album.

Naskah ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk memahami Riau sebagai pusat budaya, bahasa dan sejarah Melayu dan Riau sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Oktober 2003

Tim Penyusun

PENDAHULUAN

GAMBARAN WILAYAH

Secara geografis, Riau adalah daerah yang terletak di daratan Sumatera Tengah bagian timur dan seluruh kepulauan yang tersebar di bagian timur Pulau Sumatera dan Laut Natuna (Laut Cina Selatan). Adapun batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Sumatera, Selat Singapura, Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Selat Berhala
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Luas wilayah 94.561.620 Km² (9.456.161 Ha) dengan wilayah perairan seluas 176.530 Km² terdiri dari 56.445 Km² perairan Selat Sumatera/Selat Malaka dan 120.085 Km² perairan Laut Natuna/Laut Cina Selatan¹.

Dalam pembagian wilayah administrasi, provinsi Riau terbagi menjadi 6 Kabupaten dan 2 kota. Ke-enam wilayah Kabupaten tersebut yaitu : Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Bengkalis dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk 2 Kota meliputi : Pekanbaru dan Pulau Batam.

Berdasarkan keadaan alam, provinsi ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Riau daratan dan Riau Kepulauan. Riau daratan meliputi : Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Sedangkan Riau kepulauan meliputi gugusan pulau-pulau yang menyebar sampai ke perbatasan perairan Malaysia di Laut Cina Selatan dan Kalimantan Barat².

Dalam berbagai kronik disebutkan wilayah kekuasaan Sultan Lingga meliputi kepulauan Lingga Riau dan beberapa wilayahnya di daratan Sumatera Timur. Wilayah yang terdiri dari kelompok besar kepulauan, gunung dan

¹ ANRI : Koleksi pribadi. Adam Malik no. 17, 1981.

² Masyarakat Melayu dan kebudayaannya. Pem. Provinsi Riau. Pekanbaru 1986. Hal. 65.

gosong yang terletak antara Sumatera Timur dan Kalimantan – dengan pengecualian pulau-pulau Anambas, Natuna, Tembilahan- lebih dikenal dengan nama kepulauan Lingga Riau. Sementara penduduk setempat menyebutkan daerah itu adalah “**TANAH SALAT**” artinya daerah selat. Juga penduduk setempat menyebut orang-orang yang tinggal dikepulauan adalah “**ORANG LAUT**” dan orang-orang yang tinggal didaratan Sumatera Timur adalah “**ORANG BENUA**”. Sulit untuk mengetahui secara pasti luas wilayah Kesultanan Lingga beserta daerah taklukannya. Walaupun para pengusaha pribumi pernah melakukan pemetaan, tapi sangat diragukan kebenarannya. Namun demikian cukup bermanfaat karena ada gambaran kasar nama-nama pulau yang ada dibawah kekuasaannya.

Bahkan ketika kompeni Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya di bumi Kesultanan Lingga Riau pun belum mampu melakukan pemetaan secara utuh. Di dunia ilmu pengetahuan juga digambarkan sebagian besar wilayah Kesultanan Lingga Riau dan daerah-daerah taklukannya itu adalah Terra Incoqnita.

Dalam perjalanan waktu, berbagai pihak telah mencoba melakukan pemetaan, seperti yang dilakukan pada tahun 1862 dan 1871. Pemerintah kolonial telah menentukan letak geografis kepulauan Lingga dengan membuat beberapa titik pusat dipulau itu. Pada tahun 1889 K.F. Holle³ melakukan pembuatan peta berdasarkan daerah sebar bahasa dan agama, tapi hasil yang dicapai belum cukup memuaskan bahkan ada beberapa penyebaran yang tidak benar. Pada tahun 1893 ditemukan peta Pulau Singkep. Betapapun masih jauh dari lengkap dan tepat, tapi paling tidak telah ada satu peta. Peta ini dibuat oleh maskapai timah yang sedang melakukan penambangan di sana. Peta ini telah menggunakan skala 1 : 50.000. untuk sekian kalinya pemerintah memberi perintah kepada kantor Pertanahan di Tanjung Pinang untuk melakukan pemetaan. Tugas ini dilaksanakan selama 4 tahun mulai 1894-1898. Disamping itu pada tahun 1894 dilakukan pemetaan kelautan dan selat-selat oleh Dinas

³ K. F. Holle pada mulanya datang ke Indonesia sebagai pegawai perusahaan perkebunan the di Waspada (Garut-Jawa Barat), kemudian atas pertimbangan politis pemerintah Belanda ia diangkat menjadi Penasehat Urusan Agama dan masalah Pribumi.

Hidrografis dibawah komando Letnan klas satu R.O.J. Werschoor dan M.O.W. Platen dan C.A. Fock. Hasil yang dicapai sangat memuaskan dan dijadikan sumber baku hingga dalam waktu yang cukup lama.

Dari semua peta-peta yang dibuat itu, secara garis besar wilayah kerajaan serta wilayah *gubernement* terdiri dari :

1. Sebagian tanah di daratan Sumatera Timur mulai dari Tanjung Ungka, sampai Sungai Kampar dan Tanjung Labu Tungkal di muara Sungai Tungkal di Jambi.
2. Sejumlah ribuan pulau mulai dari yang terbesar hingga terkecil yang terletak mulai sebelah selatan Laut Cina antara Selat Singapura, Sumatera, Bangka hingga Selat Kalimantan Barat.

Sejauh itu wilayah yang berada di daratan Sumatera Timur sebagian besar masih Terra Incoqnita. Daerah luas yang tidak didiami dan tidak dapat didiami karena sebagian besar tanah payau, lumpur, pantainya tertutup rimba belantara. Muara sungai mengalir dari pedalaman seperti Sungai Danei, Kateman, Rebung, Parapat, Tali Dinding, Air Tanah, Belaras, Mandah, Igal, Pelanduk, Bantein, Batang Temu, Gaeng, Batang Kuantan, Enok, Reteh dan sejumlah sungai kecil lainnya.

Perkampungan penduduk masih jarang sekali dan itu hanya dapat ditemukan di sana sini sepanjang tepi sungai. Lebih ke pedalaman lagi di sepanjang Kuantan, sulit ditemukan perkampungan karena tanahnya berpayau. Hanya di muara sungai Reteh keadaan geografi agak memungkinkan untuk didiami. Namun demikian perkampungan itu masih mengelompok dan berjauhan letaknya.

Berbeda dengan keadaan di daratan Sumatera Timur, penggambaran geografi daerah kepulauan sudah agak lengkap meliputi kelompok Riau dan Lingga. Masing-masing dipisahkan oleh adanya selat di tiap-tiap kelompok kecil itu. Kelompok Riau yang juga disebut kepulauan Riau berada dibagian utara, sedang kelompok Lingga atau kepulauan Lingga di wilayah selatan. Kelompok Riau terdiri dari pulau-pulau Bintang dengan Tanjung Pinangnya, Batam, Mars atau Penyengat, Loz, Tongong Sebaw, Senggarang, Panjang,

Karimun Besar dan Kecil, Sugie, Durian (Driun), Galang, Gampang, Bulang, Cumbol, Segupong dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil. Kecuali memiliki selat yang sangat vital yang bagi Riau sangat penting dan paling banyak disinggahi kapal-kapal besar, tempat berlabuhnya beberapa kapal dagang maupun kapal perang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara teratur Dinas Pelayaran yang beroperasi setiap hari antara Riau dan Singapura. Hubungan pelayaran itu dimungkinkan dapat berjalan dengan lancar karena pelabuhan Riau sangat aman dikarenakan adanya Pulau Bintang di muara sungai sehingga terlindung oleh ganasnya angin muson timur laut.

Kelompok Lingga terdiri dari kepulauan Lingga, Singkap, Varella, Bintang dan pulau-pulau kecil lainnya⁴. Peta yang lebih detail lagi telah dibuat. Wilayah tersebut dibagi dalam 5 kelompok kepulauan besar meliputi :

1. Kelompok kepulauan Karimun. Batas-batas wilayah meliputi sebelah utara yaitu Selat Malaka. Sebelah timur yaitu Selat Malaka dan Selat Durian. Sebelah selatan mulai dari Pantai Danei sampai Kateman. Sedang sebelah barat yaitu Selat Malaka. Kecuali pulau-pulau itu, terdapat juga kelompok Perpos, Kepulauan Salar atau Sanglar (Durian Busuk), Kepulauan Durei dan Rukan atau Rokan, sebagian dikenal dengan nama Bruder Utara, tengah dan Selatan.
2. Kelompok Kepulauan Batam. Batas wilayah meliputi sebelah utara yaitu Selat Singapura. Sebelah timur adalah Selat Riau. Sebelah selatan adalah Selat Dempu dan Selat Durian. Sebelah barat adalah Selat Durian. Pulau-pulau yang termasuk dalam kelompok ini adalah Durian (Moro), Sugi, Combol, Bolong (Bulan), Rempang, Gulang serta selebihnya pulau-pulau kecil.
3. Kelompok kepulauan Bentan. Batas wilayah meliputi sebelah utara Selat Singapura. Sebelah timur dan selatan adalah Laut Cina, barat Selat Riau.

⁴ Pulau Bintang telah diberikan kepada Gubernemen oleh Sultan Machmud Syah dalam suatu kontrak. Sultan sendiri menetap di Pulau Lingga. Sementara itu Raja Muda penguasa Pulau Bintang lalu mendapat ganti rugi tiap tahun dari pemerintah colonial. Pulau-pulau kecil di kepulauan ini tidak berpenduduk dan hanya beberapa kali dikunjungi nelayan atau bajak laut.

Pulau-pulau yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok besar Betan dan sejumlah pulau kecil yang terletak di selatan dan timur.

4. Kelompok Kepulauan Lingga. Batas wilayah meliputi sebelah utara Selat Dompu, sebelah timur dan barat Laut Cina, sebelah selatan Selat Luna. Selain kelompok besar Lingga, pulau-pulau kecil yang masuk kelompok Lingga ini adalah Abang, Pengelap, Senimpau, Merondong, Temiang, Sebangka, Mahmut, Bakung, Cempa.
5. Kelompok Singkep. Batas wilayah meliputi sebelah utara Selat Luna, sebelah barat dan timur adalah Laut Cina Selatan, sebelah selatan Selat Berhala. Sedang Pulau Tujuh termasuk dalam kelompok ini.

Gambaran wilayah Lingga Riau ini oleh pemerintah kolonial masih disadari sangat global. Titik paling utara adalah Pulau Sekatung dan Natuna Utara. Titik paling selatan adalah Pulau Djoe (ju) di Kepulauan Seribu serta Pulau Kayangan (Tujuh), titik timur adalah Pulau Sempadi, Kepulauan Serasan (Bajak Laut) di utara Sambas (Kalimatan). Sedang di pedalaman Sumatera Timur yaitu daerah Kuantan di Indragiri.

Bahkan untuk mengetahui jumlah yang pasti luas tanah per-km² pemerintah kolonial belum mampu membuat karena pembuatan topografi dan triangulasi belum dilakukan. Ditambah lagi dari seluruh daerah itu, daerah daratan hanya 6,6% selebihnya 93,4% adalah lautan⁵.

HUBUNGAN KERAJAAN-KERAJAAN DI RIAU DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA

Hubungan kerajaan-kerajaan Riau dengan negara-negara tetangga telah dilakukan sejak pada masa lalu ketika kawasan itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Bahkan ketika bangsa asing berkuasa di kawasan itu, hubungan tetap berjalan seperti dengan negara-negara di Semenanjung Melayu dan Singapura. Hubungan itu lebih diperkuat dengan adanya cerita rakyat bahwa Putri Bintan yang bernama Tun Sri Binai menikah dengan raja dari

⁵ Encyclopaedie van Nederlandsh Indie, jilid 3, Leiden, martinus

Bukit Siguntang dan menjadi raja pertama di Riau – Bintan. Dari perkawinan inilah menurunkan raja-raja Johor, Singapura, Malaka dan lain-lain.

... pada masa itoe kapala prampoean nama jua toen Seri bineij ja la jang mengambil radja jang datang darie boekit siegoentang nama jua, satria boeana ja la jang mendjadikan radja di Bintan maka toeroen toemoeroen dari pada satria boeana inie la asal radja radja malaijoe sampeij malarat ka singapoera sampeij ke malaka⁶

Dalam perjalanan sejarah, Malaka dapat mencapai puncak kejayaan, bahkan Riau pun mengakui sebagai vasalnya. Tapi kejayaan ini pada tahun 1511 dipatahkan oleh Portugis dengan menduduki Malaka. Sultan Malaka menyingkir ke Pulau Penyengat (Bintan)-Riau, juga ke Lingga. Dengan sisa kekuatan yang ada lalu memindahkan pusat kekuasaannya ke Johor. Sejak itu Lingga tercatat sebagai tempat pelarian raja-raja kawasan Melayu⁷.

Melihat letak geografis Riau di mana lebih dari 93,4% berupa kepulauan⁸ sehingga tidak heran bila kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Riau lebih mendukung kebudayaan kelautan. Hubungan internasional dilakukan melalui laut. Banyaknya negara-negara lain datang ke Riau membuat masyarakat Riau menjadi lebih terbuka menerima inovasi baru yang dibawa oleh tamu-tamu yang singgah dan datang di sana. Tapi di sisi lain karena letak geografi tersebut membuat kerajaan-kerajaan Riau – semenanjung Melayu pada kurun waktu tertentu bersatu dan pada kurun waktu yang lain terpecah-pecah dalam kesultanan kecil-kecil. Sejarah perjalanan kerajaan di kedua kawasan itu selalu diwarnai dengan hal tersebut. Kerjasama dan konflik diantara sesama, disatu pihak memperkuat kerajaan tapi dipihak lain memperlemah masing-masing kerajaan.

Sejarah Riau tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Melayu dalam imperium Melayu dibawah Malaka-Johor-Riau. Tapi dengan disetujuinya Tractat London 1824 antara Inggris dan Belanda, dimana Inggris menyerahkan

⁶ Encyclopaedie voor Nederlandsch Indie vo. III Leiden Martinus Nijhoff 1905. hal 605-626; Nahar Efendi, 1973; Wall 1982, Mukhtasar Tawarikh al-wusta, 1999. hal 25 pasal yang ke 3

⁷ Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya. Pemda TK I Riau, 1986. hal 196

⁸ Encyclopaedie voor Nederlandsch Indie. Hal 423-453

Bengkulu dan Belanda menyerahkan Malaka dan Singapura, maka sejak itu kerajaan-kerajaan Melayu di sekitar Selat Malaka menjadi terbagi dua. Di bagian utara selat dibawah pengaruh Inggris, di bagian selatan selat dibawah pengaruh Belanda yaitu kepulauan Riau⁹.

Walaupun kerajaan-kerajaan di kedua kawasan itu tidak lagi merdeka sepenuhnya karena telah berada dibawah kekuasaan VOC dan dilanjutkan kolonial Belanda, dimana segala tindakan harus seizin VOC dan Belanda, tapi hubungan diantara mereka tetap berjalan. Bagaimana mesranya hubungan antara Raja Penyengat dan Lingga dengan Johor dapat dilihat pada arsip korespondensi diantara mereka :

... Wabadahoe, maka adalah kita maloemkan kepada padoeka Srie Sahabat Kita, ijang kita serta Srie padoeka Toewan Sultan Lingga, telah menerima soerat dari maha radja Djohor, adapoen seperti dija ijang hendak ziarah kepada kita dan kepada Srie Padoeka Toewan Sultan pada masa ini adalah terlalu oezoer dari sebab itoe sangatlah ija berhadjat hendak bertemoe kita serta Srie Padoeka Toewan Sultan dengan pertemuan seperti antara satoe saudara

Tertulis pada hari 13 bulan Djulhidjah (1891 M).

Tapi apalah dikata, kebebasan sepenuhnya tidak dimiliki oleh mereka lagi. Mereka harus tunduk pada saran yang diberikan Belanda :

... Maka adalah dari hal SPSK soeka mendengar kita ampoenja pikiran fatsal SPSK dan SPT Sultan hendak berangkat ke Djohor karena disilahkan oleh maharadja Djohor, maka tiadalah kita benarkan, sebab didalam pikiran kita mendjadi kurang elok diatas nama SPSK dan SPT Sultan. Maka boleh SPSK kirim satu mentri jang menoenjoekkan keselamatan dari SPSK dan dari SPT Sultan adanja....

Resident van Riau 22 Juni 1891¹⁰.

Sementara disisi lain konflik yang terjadi diantara kerajaan Melayu, dimanfaatkan oleh Belanda untuk kepentingannya. Belanda memberi bantuan pada pihak yang lemah. Dengan alasan telah membantu menyelesaikan

⁹ Sejarah Daerah Riau Depdikbud 1977/1987. Hal 3

¹⁰ ANRI : Khasanah Arsip Residensi Riouw 225/7

pertikaian yang terjadi, sudah sewajarnya Belanda mendapat imbalan berupa penguasaan wilayah tertentu. Taktik seperti ini dapat dilihat antara lain pada arsip Cronicle van Singapoera, mengisahkan konflik yang terjadi antara Johor-Pulau Karimun-Belanda. Tersebutlah Sultan Mahmud Raja Johor telah mangkat tanpa meninggalkan keturunan yang sah. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh para bawahannya menguasai daerah kekuasaannya. Tidak ada keputusan yang segera diambil atas pengganti tahta kerajaan, mempercepat proses perebutan berkas daerah kekuasaannya. Salah satu wilayah itu terletak di bagian timur Semenanjung Melayu dan menyatakan diri lepas dari Johor dan menyebut diri Pahang. Kekacauan di Johor ini secara diam-diam diamati oleh kedua putra tidak sah mendiang Sultan Johor itu yang bernama Abdul Rahman yang tinggal di Lingga dan Hussien Muhamad Sjah yang tinggal di Singapura. Kedua bersaudara sangat menuntut atas tahta itu, bahkan Pulau Karimun juga mereka klaim sebagai bekas milik ayah mereka, berada di bawah kekuasaan Johor. Tapi sayang tidak banyak bukti yang dimiliki bahwa mereka adalah putra mendiang Sultan. Karena itu tidak dapat tinggal di istana dan mengembara antara Riau-Pahang-Trenggano, sebelum masing-masing menetap di Lingga dan Singapura. Untuk memenuhi keinginan itu satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dengan meminta bantuan Belanda yang berada di Riau (1819). Kelanjutannya dapat ditebak dengan politik *divide et impera* satu persatu wilayah Riau dan semenanjung Melayu berada dalam kekuasaannya¹¹.

Tidak berbeda dengan wilayah Riau lainnya, raja Johor Sultan Sulaiman pun harus rela menyerahkan Siak kepada Belanda 1745. Ini dapat terjadi karena Raja Kecil dari Riau – Siak berhasil menduduki Johor 1717 dan memproklamirkan dirinya dengan gelar Sultan Djalil Rahmatsyah. Mengenai asal usul raja kecil ini adalah :

... De Vorst Marhaem kota Tinggi sultan van Djohor werd voor ruim 1 ½ eeuw geleden op orde van zijne onderdanen de datoe bendahara en tomongong ver..., zijne eenige echtgenoot Inge Ipon genaamd, welke met haar naar Djambi en

¹¹ ANRI : Khasanah Arsip Residensi Riouw 71/6

van daar naar een vorst van Minangkabau vertrok door wiens hulp, hij op de troon van Djohor kwam. Hij stichte daarna Riau en werd vervolgens door zekere radja sulaiman verdreven...¹².

Raja Johor diturunkan dari tahta. Tapi putra mahkota Sultan Sulaiman lalu minta bantuan Belanda untuk menertibkan Siak dan berhasil. Atas jerih payah membantu Sultan Sulaiman maka VOC mendapat kompensasi. Wilayah Siak oleh Sultan Sulaiman diserahkan kepada VOC 1745.

.... Nota van den Gouverneur Couperus in den jare 1792, aan de Hr. Vaillant, verheul en Graevankin ingediend beweerd geworden zijn. Dat Siak een wettig eigendom van de VOC was, als aan dezelve in het jaar 1745 door den vorst van Djohor geschenken¹³. Sejak itu Siak tidak merdeka lagi, berada dibawah pengaruh VOC.

TATA PEMERINTAHAN KERAJAAN

Pembagian daerah administrasi pemerintah Belanda tidak mempengaruhi secara langsung pemerintahan kerajaan, karena Belanda hanya berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan langsung dijalankan oleh raja atau sultan, sehingga rakyat umum tidak mengenal adanya pemerintahan Belanda. Pelaksanaan jalannya pemerintahan diatur dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat seperti hukum adat menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan.

Sultan atau raja menjadi hakim tertinggi dan pengadilan tingkat bawah dipegang oleh para kepala distrik dan onderdistrik sesuai dengan tingkatannya. Pengadilan tertinggi atau disebut Kerapatan Tinggi dipegang oleh raja atau sultan. Kerapatan distrik oleh *districthoofd* dan onderdistrict oleh *onderdistricthoofd*. Disamping itu ada pula pengadilan syarak dan musyawarah adat yang dipimpin oleh pemuka-pemuka adat. Selain hukum adat berlaku juga Kitab Undang-undang Hukum Belanda. Raja atau kepala distrik memegang

¹² ANRI : Khazanah Arsip Residensi Sumatera West Kust 2B/6

¹³ ANRI : Khazanah Arsip Residentie Sumatera West Kust 2B/6, Riouw 209

kekuasaan pemerintahan, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kepolisian. Tapi kekuasaan militer dipegang oleh Belanda.

Struktur pemerintahan di kerajaan Riau diatur menurut jenjang :

1. Sultan atau raja diperoleh karena turun temurun
2. Pejabat birokrasi terdiri dari :
 - a. Datuk Bendahara (wakil sultan)
 - b. Panglima Angkatan Laut (pembantu raja di bidang militer)
 - c. Penghulu Bendahara (pengurus soal kekayaan negara atau bendahara)
 - d. Menteri, Hulubalang Besar, orang kaya, ksatria, sida-sida, bentara dan hulubalang (merupakan dewan kerajaan sebagai pembantu dekat raja)

Dalam perkembangan terjadi pergeseran pemerintahan menjadi :

1. Sultan sebagai yang Dipertuan Besar
2. Yang Dipertuan Muda Riau
3. Laksamana
4. Datuk Bendahara
5. Mahkamah, suatu dewan hukum yang bertugas menyelesaikan semua perkara agama dalam kerajaan.

Sultan atau raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah. Keabsahan (legitimasi) kedudukan dan kekuasaan raja diperoleh karena warisan menurut tradisi. Kekuasaan raja pendiri suatu kerajaan berlandaskan kepada kharisma yang murni, seperti Raja Parameswara pendiri kerajaan Melaka 1380, Raja Nara Singa pendiri kerajaan Indragiri abad XVI, Sultan Mahmud Syah I kerajaan Melayu 1513 dan Raja Kecil dari kerajaan Siak 1723.

Raja sebagai pendiri mempunyai kepemimpinan yang wajar, karena adanya kelebihan kemampuan pribadi. Sedangkan kekuasaan raja berikut otoritasnya diperoleh dari raja sebelumnya. Jadi ada kewibawaan yang diperoleh karena keturunan secara tradisional.

Dari daftar raja yang memerintah di Riau dibawah ini membuktikan bagaimana jaman emas yang pernah dicapai oleh raja-raja Melayu Riau :

1. Daftar raja-raja dari Kerajaan Siak
 - Sultan Mahmud Abdul Djalil Ra'jat Sjah

- Sultan Mohamad Abdul Djalil Rachmad Sjah almarhum Buntan, Raja Siak I 1717-1746
 - Sultan Mohamad Abdul Djalil Muzafarsjah, Raja Siak II 1746-1760
 - Sultan Ismail Abdul Djalil Rachmad Sjah, Raja Siak III 1765-1791
 - Sultan Abdul Djalil Alamuddin Sjah, Raja Siak IV 1761-1865
 - Sultan Mohamad Ali Abdul Djalil Moe'azam Sjah, Raja Siak V 1791-1801
 - Sultan Jahja Abdul Djalil Muzafar Sjah, Raja Siak VI 1801-1803
 - Sultan Assjaidis Sjarif Ali Abdul Djalil Sjaifuddin, Sultan Siak VII 1803-1811
 - Sultan Assjaidis Sjarif Ibrahim Abdul Djalil Chairuddin, Sultan Siak VIII 1811-1815
 - Sultan Assjaidis Sjarif Ismail Abdul Djalil Djalaluddin, Sultan Siak IX 1817-1864
 - Sultan Assjaidis Sjarif Kasim I Abdul Djalil Sjaifuddin, Sultan Siak X 1865-1890
 - Sultan Assjaidis Sjarif Hasjim Abdul Djalil Sjaifuddin, Sultan Siak XI 1891-1900
 - Sultan Assjaidis Sjarif Kasim II Abdul Djalil Sjaifuddin, Sultan Siak XII 1915-1945
2. Kerajaan Melaka pada abad 15 pernah diperintah oleh Sultan Muzafar Sjah kemudian digantikan oleh Sultan Mansyur Sjah
 Kemaharajaan Melayu yang berkedudukan di Bintan juga pernah diperintah oleh Sultan Mahmud Sjah I kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Sjah II sampai tahun 1699, lalu Sultan Abdul Djalil Rahmadsjah 1717-1724, digantikan lagi oleh Sultan Mahmud Sjah III 1761-1812. Di kerajaan ini juga pernah memerintah Tengku Abdul Rahman kemudian Tengku Husein (Sultan Husein Sjah), kemudian digantikan Sultan Sulaiman Badrul Alam Sjah.
 Kerajaan Indragiri didirikan oleh Sultan Abdul Djalil Sjah (Nara Singa), sebagai sultan Indragiri pertama, kemudian Sultan Djamaluddin Kramat

Sjah. Sedang Sultan Hasan Salahuddin merupakan sultan ke-17 yang digantikan oleh Sultan Ibrahim sebagai sultan ke-18. setelah itu masih ada sultan lainnya yang memerintah yaitu Sultan Said, Raja Hussein (sekitar 1876) dan Sultan Isa.

3. Di kerajaan Kampar berkuasa Sultan Munawar Sjah, lalu digantikan oleh Raja Abdullah, Raja Abdurrahman bergelar Maharaja Dinda I, Maharaja Dinda II dan Sjah Abdurrahman.
4. Untuk wilayah lainnya adalah para pemimpin lokal yang dipercaya untuk memimpin wilayahnya :
 - Soleman Badar Alamsjah, Sultan Lingga, Riouw en Onderhorigheden ditetapkan Oktober 1857
 - Abduraman Madlam Sjah, Sultan Lingga, Riouw en Onderhorigheden ditetapkan 18 Februari 1885
 - Raja Muda Mohamad Jusuf III, Onderkoning van Riouw en Onderhorigheden ditetapkan 15 Januari 1859
 - Raja Said, Sultan Indragiri ditetapkan 10 April 1866.
 - Raja Mahmud Raja Indragiri ditetapkan 28 Mei 1903. Pada tanggal 3 September ditetapkan sebagai Bestuurder kotaraja Rengat.
 - Raja Baima, sebagai kepala Reteh.
 - Sultan Abdullah sebagai Raja Panei.
 - Sultan Mustofa Yang Dipertuan Kota Pinang.
 - Tengku Besar Said Hasjim Bin Abu Bakar bin Sjahabuddin Raja Palalawan ditetapkan 3 Desember 1894.
 - Tengku Said Harun gelar Sulung ditetapkan menjadi Bestuurder Palalawan ditetapkan 13 Agustus 1940.
 - Ibrahim gelar Yang Dipertuan Sakti Raja Luhak Ampat Kota Rokan Kiri.
 - Raja Aisja, Sultan Indragiri ditetapkan 8 Oktober 1885.
 - Yang Dipertuan Besar Achmad kepala Rokan Ampat Kota ditetapkan 16 September 1888.

- Angku Sutan ditetapkan sebagai Kepala IV Kota di Hilir pada 6 Juli 1907.
- Datu Mudo Bisai ditetapkan sebagai Kepala V Kota di Tengah (Kuantan) 13 Maret 1906.
- Badu Wahid gelar Orang Kaya Matahir ditetapkan sebagai Kepala Lubu Ramo Kota II 3 September 1908.
- Datu Habib ditetapkan sebagai Kepala V Kota di Mudik 13 Maret 1906.
- Datu Paduka Raja ditetapkan sebagai Hoofd IV Kota di Mudik 13 Maret 1903.
- Datu Raja Ruhut ditetapkan sebagai bestuurder Ulu Tenggo Si Ampang.

PUSAT BUDAYA MELAYU

Kebudayaan yang dikembangkan masyarakat pendukungnya mempunyai fungsi bukan sekedar sebagai pedoman bagi sikap dan tingkah laku pendukungnya dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas, melainkan juga berfungsi sebagai pemersatu para pendukungnya. Kebudayaan yang pada hakekatnya mengandung seperangkat nilai, gagasan utama dan pandangan hidup itu akan menimbulkan kesadaran nasional para pendukungnya sebagai satu kesatuan sosial yang mempunyai pandangan bersama.

Oleh karena itu kebudayaan suatu masyarakat dapat juga diartikan sebagai mekanisme pengendali yang mengatur kebutuhan hidup masyarakat bagi para pendukungnya. Tidaklah mengherankan kalau para pendiri negara Republik Indonesia sejak awal menyadari arti pentingnya kebudayaan nasional Indonesia sebagai yang tersurat dalam UUD 1945 pasal 31.

Kebudayaan nasional Indonesia diperlukan sebagai pengikat dan sekaligus sebagai pengendali masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini perlu karena masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam kelompok etnik serta telah memiliki latar belakang budaya yang kuat mengakar. Dibeberapa tempat, kebudayaan dapat kuat dan mengakar dan tetap lestari karena mendapat

perlindungan kraton. Kraton telah memayungi adat istiadat karya-karya sastra sehingga dapat berkembang subur. Hal ini banyak terjadi diberbagai kerajaan di Nusantara.

Kerajaan Riau yang pernah mengalami puncak kejayaan itu, mampu melestarikan budaya Melayu. Beberapa kesenian sebagai akibat pengaruh Islam sangat mewarnai dalam budaya Melayu. Bangunan Masjid, seni ukir, seni sastra, syair dan bahasa semua itu diwarnai nuansa Islam. Khusus seni bangun masjid pada mulanya merupakan campuran kebudayaan asli punden berundak-undak dengan kebudayaan Islam dengan memakai menara dan mihrab. Bentuk bangunan seperti ini terdapat di Koto Lubuk Jambi, Pasar Usang Air Tiris, di Pulau Buru Karimun, Mida Pulau Tujuh, Daik Lingga dan Pulau Penyengat yang mempunyai menara 17 buah menunjukkan rakaat dalam sembahyang wajib sehari-semalam.

Seni sastra seperti syair, gurindam, hikayat , dzikir dan tambo juga sangat terpelihara. Syair yang sangat terkenal yaitu syair perang Siak, hikayat Hasan dan Husin, hikayat Bayan budiman, tambo Siri dan Tambusai. Seni suara bercorak Islam seperti barjanji, berdzikir, berhikayat, qasidah. Sedang seni tari antara lain Tari Zhapin.

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RESMI, DIPLOMASI DAN LINGUA FRANCA

Penggunaan Bahasa Melayu sampai menjadi Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa pemersatu baik dalam fungsinya sebagai *Lingua Franca*, bahasa resmi, Diplomasi, pers maupun karya sastra, ternyata telah meniti perjalanan sejarahnya yang cukup panjang. Sejarah itu telah membuktikan bahwa:

1. Bahasa Melayu sejak berabad yang lalu telah dipergunakan sebagai bahasa resmi, diplomasi dan hukum antar negara.
2. Disamping itu Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipergunakan oleh seluruh negara di kawasan Nusantara ini walaupun negara-negara tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing.

3. Bahwa Bahasa Melayu dipergunakan sebagai *Lingua Franca* belaka.

Jika kita membuka lembaran sejarah, sebuah kenangan muncul ketika raja-raja Yang Dipertuan Agung Kerajaan Melayu Riau pernah memetik kejayaannya. Apalagi ketika Johor dan Singapura masih berada dibawah kuasa Raja Lingga pada abad 17 dan 18, Riau merasakan nikmatnya arti strategis wilayahnya sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Wilayah itu selalu didatangi oleh pedagang dari berbagai negara untuk melakukan transaksi dagang. Dalam melakukan kontak itu Riau mampu memaksakan Bahasa Melayu sebagai satu-satunya *Lingua Franca* diantara mereka.

Peranan Bahasa Melayu itu makin tampak nyata ketika Riau telah berada dibawah kekuasaan Belanda. Semua surat menyurat resmi, kontak dengan raja pribumi hingga segala pengumuman yang harus diketahui oleh rakyat, dipergunakan dwi bahasa bahkan tri bahasa agar diketahui oleh semua pihak yaitu :

- Bahasa Eropa (Inggris, Belanda)
- Bahasa Melayu
- Bahasa setempat

Daerah sebar Bahasa Melayu itu dalam perkembangannya telah meluas diseluruh Nusantara. Namun demikian Riau tetap mampu memelihara dengan baik Bahasa Melayu itu. Sementara di wilayah lain telah mengalami akulturasi dengan bahasa setempat.

Selama ini terdapat asumsi bahwa Bahasa Melayu hanya digunakan sebagai *lingua franca* dan itu adalah Bahasa Melayu Riau, ternyata tidak benar. Bahasa Melayu juga dipergunakan sebagai bahasa resmi dan diplomasi seperti dalam bentuk kontrak, surat kenegaraan¹⁴. Gaya bahasa hukum yang dipergunakan untuk merumuskan kontrak tersebut jelas sangat berbeda dengan surat-surat yang dibuat oleh rakyat, berbeda pula dengan penggunaan karya sastra.

¹⁴ Lihat kontrak Raja Indragiri dengan Belanda 27 Oktober 1664. ANRI : Khazanah Arsip Residensi Riouw 68/6

Melihat perjalanan sejarah itu tidak diragukan Bahasa Melayu telah dipakai oleh segala lapisan bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga dalam melakukan korespondensi, seperti :

1. Surat perjanjian raja-raja di Nusantara dan Eropa. Bahasa yang dipergunakan dalam surat tersebut lebih bersifat diplomasi karena menyangkut hubungan dua bangsa yang mempunyai derajat sama serta mempunyai tujuan politis tertentu.

2. Surat Raja dan Pengusa

Bahasa Melayu yang dipergunakan dalam surat ini dianggap bahasa resmi, karena merupakan surat yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan. Dari raja-raja Nusantara kepada penguasa kolonial, dari eselon tingkat bawah dikalangan pegawai pribumi kepada atasannya. Karena pada waktu itu belum ada semacam standarisasi penggunaan Bahasa Melayu resmi, maka akan tampak bermacam variasi dalam pembuatan surat.

3. Surat Rakyat

Walaupun tidak sama dengan surat resmi yang dipergunakan oleh raja atau pengusaha namun surat-surat yang datang dari rakyat untuk pengusaha juga menggunakan Bahasa Melayu tentu saja sesuai dengan kemampuan berbahasa yang berbeda baik secara individu maupun kedaerahannya.

4. Plakat, Pengumuman, Statistik

Suatu perintah atau pengumuman yang harus diketahui oleh umum, agar mudah dipahami maka bahasa yang dipergunakan juga disesuaikan dengan bahasa yang berlaku ditiap-tiap daerah. Karena itu tidak jarang dijumpai untuk menyampaikan pengumuman tersebut dipergunakan 4 bahasa sekaligus yaitu :

- Bahasa Melayu dengan huruf Arab Pegon
- Bahasa Melayu dengan huruf Latin
- Bahasa Melayu dengan huruf Cina
- Bahasa Belanda dengan huruf Latin
- Bahasa setempat dengan huruf setempat pula.

CAMPUR TANGAN BELANDA DI RIAU

Sesudah perang Eropa berakhir dengan kemenangan di pihak Inggris, maka antara Inggris dan Belanda diadakan Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Sejak itu pula kekuasaan Belanda di daerah Riau semakin kuat. Perjanjian antara kerajaan Melayu Riau dengan Belanda dimana Kerajaan Riau mengakui kekuasaan Belanda ditegaskan lagi dengan kesepakatan baru yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1830.

Sesudah itu Belanda juga memaksakan perjanjian serupa dengan kerajaan-kerajaan lain seperti dengan kerajaan Siak Sri Indrapura, Indragiri dan kerajaan-kerajaan lainnya di Riau. Perjanjian itu berbentuk politik kontrak. Perjanjian-perjanjian serupa terus diperluas dan diperbarui. Riau dijadikan wilayah Keresidenan dan ditempatkan seorang residen sebagai penguasa tertinggi wakil Belanda di daerah itu.

Sistem pemerintahan segera disusun. Mulai diadakan pembagian wilayah sesuai dengan tata administrasi pemerintah. Tercatat bahwa pada tahun 1869 *Residentie Riouw en Onderhoorigheden* (Kresidenan Riau dan daerah taklukannya) dibagi menjadi 7 afdeelingen :

1. Afdeeling Lingga.
2. Afdeeling Karimon.
3. Afdeeling Batam.
4. Afdeeling Noord Bintang (Bintang Utara).
5. Afdeeling Zuid Bintang (Bintang Selatan).
6. Afdeeling Tanjong Pinang.
7. Afdeeling Poeloe Toedjoeh (Pulau Tujuh).

Pada tahun 1873 diadakan reorganisasi lagi di Riau menjadi :

1. Jabatan tertinggi adalah Residen dipegang oleh seorang Belanda.
2. Asisten Residen mengepalai wilayah afdeeling juga orang Belanda
3. Controleur/Gezagheber mengepalai wilayah onderafdeeling juga orang Belanda.
4. Kepala daerah setempat/penguasa setempat dijabat oleh pribumi.

Pembagian wilayah telah terjadi lagi pada tahun 1875 Riau dibagi dalam 5 afdeelingen yaitu :

1. Lingga.
2. Karimun.
3. Batam.
4. Tanjung Pinang.
5. Pulau Tujuh.

Sejak 1892 Indragiri dijadikan suatu afdeeling tersendiri yang bernaung dibawah Keresidenan Riouw. Sebelumnya di Indragiri hanya ditempatkan seorang pangreh praja dengan jabatan *Controleur*. Disamping itu ada jabatan sultan sebagai penguasa tertinggi pribumi di wilayah itu. Pada tahun 1892 barulah jabatan Asisten Residen di Indragiri diadakan dan berkedudukan di Rengat.

Pada tahun 1909 terjadi lagi perubahan pembagian wilayah, makin diperkecil yaitu :

1. Afdeeling Groot en Zeeroover Eilanden (Kepulauan Bajak Laut Besar).
2. Afdeeling Natoena Eilanden (Kepulauan Natuna).
3. Afdeeling Anambas Eilanden (Kepulauan Anambas).
4. Afdeeling Tambelan.

Perjanjian tahun 1911 yang diadakan antara Belanda dengan kerajaan Melayu Riau/Lingga menetapkan bahwa daerah-daerah yang semula menjadi daerah milik kerajaan Melayu Riau/Lingga langsung kini berada dibawah kekuasaan Belanda meliputi Reteh, Kateman, Mandah, Gaung. Pada tahun 1938 Afdeeling Bengkalis menjadi bagian dari Residentie Riouw en Onderhorigheden dengan ibukota Tanjung Pinang. Pada tahun 1942 oleh Belanda Riau dibagi dalam 2 kekuasaan yaitu :

1. Kerajaan-kerajaan diberi status *zelfbestuur landschappen* (wilayah yang berpemerintahan sendiri).
2. *Rechtstreeks bestuurgebied* (pemerintahan yang langsung dibawah kekuasaan Belanda). Daerah-daerah yang dimaksud itu adalah Reteh/Mandah, Gaung, Kateman, Ulu Tesso, Pucuk Rantau, Indragiri,

Bengkalis dan Bangkinang. Semua ini pada mulanya adalah dibawah kekuasaan kerajaan.

Dengan demikian maka struktur pemerintahan yaitu meliputi :

1. Rechtstreeks bestuurgebied meliputi :
 - a. Seluruh afdeeling Tanjung Pinang.
 - b. Reteh, Mandah, Gaung, Kateman.
 - c. Ulu Tesso dan Pucuk Rantau Indragiri.
 - d. Pulau Bengkalis.
 - e. Bangkinang.
2. Wilayah Siak Sri Indrapura :
 - a. Distrik Siak :
 1. Onderdistrik Siak.
 2. Onderdistrik Mampura (Buantan)
 3. Onderdistrik Mandau.
 4. Onderdistrik Sungai Apit.
 - b. Distrik Senapelan :
 1. Onderdistrik Pekanbaru.
 2. Onderdistrik Tapung Kiri.
 3. Onderdistrik Tapung Kanan.
 - c. Distrik Tebing Tinggi :
 1. Onderdistrik Tebing Tinggi (Selat Panjang).
 2. Onderdistrik Merbau.
 - d. Distrik Bukit Batu :
 1. Onderdistrik Bukit Batu.
 2. Onderdistrik Dumai.
 - e. Distrik Bagan Siapi-api :
 1. Onderdistrik Bangko.
 2. Onderdistrik Kubu.
 3. Onderdistrik Tanah Putih.
3. Kerajaan Pelalawan :
 - a. Distrik Langgam.

- b. Distrik Pangkalan Kuras.
 - c. Distrik Bunut.
 - d. Distrik Serapang.
4. Kerajaan Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai.
 5. Kerajaan gunung Sahilan.
 6. Kerajaan Singingi.
 7. Distrik Kuantan terbagi :
 - a. Distrik IV Koto di Hilir, Mudik.
 - b. Distrik V Koto di Tengah, Mudik.
 8. Kerajaan Indragiri terbagi dalam distrikten :
 - a. Rengat
 - b. Siberinda
 - c. Peranap
 - d. Kelayang
 - e. Tembilahan
 - f. Tempuling
 - g. Enok
 - h. Sungai Luar

Secara keseluruhan oleh Belanda wilayah Riau dibagi dalam 3 afdeelingen meliputi :

1. Afdeeling Tanjung Pinang terbagi dalam onderafdeelingen Tanjung Pinang, Karimun, Lingga dan Pulau Tujuh
2. Afdeeling Bengkalis terbagi dalam onderafdeelingen Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak, Kampar Kiri dan Rokan
3. Afdeeling Indragiri terbagi dalam onderafdeelingen Rengat, Kuantan (Teluk Kuantan) dan Tembilahan.

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN GERAKAN NASIONALISME

Perlawanan terhadap kolonialisme yang bersifat lokal dan masih belum terorganisir telah terjadi di Riau sejak masuknya Belanda di daerah ini. Gerakan itu telah meluas di berbagai wilayah di seluruh Riau. Perlawanan di Kerajaan Siak Sri Indrapura (1857-1858) disebabkan karena Belanda berusaha memperkecil kekuasaan Siak. Perlawanan Tuanku Tambusai (1831-1839) disebabkan Belanda melakukan politik pecah belah di kerajaan Rokan dengan jalan mempertentangkan antara golongan agama dengan kaum adat dan kaum bangsawan. Perlawanan Raja Haji (1782-1784) akibat Belanda melakukan pelanggaran sepihak atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Perlawanan di Rokan yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin (1901-1904) merupakan kelanjutan perlawanan Tuanku Tambusai untuk menyatukan dan mendirikan kerajaan Rokan bersatu. Perlawanan Lanon di perairan Riau terjadi terutama di perairan Pulau Galang 28 Juni 1837. Pasukan pribumi dibawah pimpinan Haji Abdurrahman putra almarhum Raja Idris, yang melakukan pembajakan kapal dagang Inggris dibawah Kapten H.D. Chods. Perlawanan sejenis dilakukan di Reteh yaitu di perairan aliran sungai Gangsal di Kecamatan Reteh (sekarang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir) dibawah Tengku Long atau dikenal dengan nama Tengku Sulung. Perlawanan ini dilakukan dalam rangka membantu Sultan Riau yang sah yang diturunkan oleh Belanda digantikan oleh sultan yang ditunjuk oleh Belanda.

Perlawanan-perlawanan kecil lainnya telah terjadi di seluruh wilayah Riau seperti perang Mondang Kemango (1887-1889) di Rokan, perlawanan Datuk Tabano (1898) di Muara Mahat dan perang Manggis (1905) di perbatasan kecamatan Kuantan Tengah dengan kecamatan Mudik sekarang. Pada tahun yang sama rakyat Kuantan bangkit melawan Belanda.

Pada hakekatnya semua perlawanan itu menunjukkan rasa tidak puas dari seluruh masyarakat Riau terhadap politik pecah belah bangsa asing dan

mereka tetap mempertahankan kedaulatan kerajaan yang merdeka. Dengan demikian benih nasionalisme mulai tumbuh.

Kebangkitan nasionalisme di Riau secara terorganisir seperti juga gerakan nasionalisme di daerah lain umumnya dipelopori oleh putera-putera daerah yang telah berpendidikan baik dalam pendidikan umum maupun dalam pendidikan agama. Manifestasi dari timbulnya kesadaran kebangsaan pada masyarakat Riau dapat dibuktikan dengan berdirinya organisasi baik yang bersifat nasional dengan pusatnya di Jawa atau bersifat lokal yang terdapat hanya di Riau saja.

Organisasi itu antara lain Serikat Dagang Islam diprakarsai Haji Mohammad Amin di Pekanbaru pada 1916, menyusul di Bagan Siapi-api tahun 1918. Serikat Islam pada 1930 di Rokan Kanan dibawah pimpinan Sultan Lautan Api. Muhammadiyah berdiri di beberapa daerah seperti di Teluk Kuantan 1933, Bantain 1934, Bagan Siapi-api 1932, Pensiawar Air Tiris 1936. Pada 1933 didirikan pula PERMI, juga di Teluk Kuantan dan cabangnya di Bangkinang didirikan oleh H.M. Amin, Muh. Kadimi, dan M. Taib Rusyidiyah Club didirikan 1892 di Pulau Penyengat Indra Sakti (Kerajaan Riau Lingga). Sesuai arti kata yaitu cerdas pandai, dipelopori oleh Raja Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, dan Raja Abdullah. Kegiatan semula dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam, tapi lalu terlibat dalam kegiatan politik.

Melalui organisasi itulah kaum pergerakan di Riau mencoba menanamkan faham kebangsaan kepada masyarakat dengan resiko diantara para pelopor pergerakan ini ditangkap dan dipenjara oleh Belanda karena dianggap menentang politik kolonial Belanda.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Bala tentara Jepang datang ke Riau melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sesampai di Pekanbaru mereka langsung menemui Sultan Siak Sri Indrapura. Sebagai jaminannya mereka membawa Kepala Distrik Pekanbaru yaitu Datuk Wan Abdurrahman. Dikatakan bahwa Riau sekarang

telah berada dalam kekuasaan bala tentara Jepang. Sementara itu, di wilayah Riau kepulauan juga telah diduduki oleh tentara Jepang. Mereka datang langsung dari Singapura. Karena itu maka oleh Jepang, wilayah Riau kepulauan (Bintan To) dimasukkan dalam bagian pemerintahan Singapura.

Setelah Riau diduduki Jepang, kemudian diadakan perubahan bentuk dan susunan pemerintahan yang disesuaikan dengan kepentingan militer Jepang. Pekanbaru dijadikan ibukota Keresidenan Riau (Riau Syu). Wilayahnya meliputi seluruh daratan Keresidenan Riau beserta pulau-pulau di pesisir. Seluruh afdeeling Riau kecuali Mandah, Gaung, Kateman dan Anak Serka dimasukkan ke wilayah administrasi pemerintahan militer Jepang di Singapura atau Syonanto. Daerah-daerah onderafdeeling dijadikan Gun dan onderdistrict dijadikan Ku.

Dalam masa pendudukan itu segala kekuasaan berada di tangan Jepang baik dalam hal kekuasaan pemerintahan, kehakiman, kepolisian. Sedangkan pegawai negeri Indonesia hanya merupakan alat administrasi belaka. Seperti yang terjadi di daerah lain, pada mulanya Jepang bersikap ramah dengan propagandanya akan menjadi pembebas bangsa Asia. Tapi pada akhirnya sikap mereka tetap sebagai penganut paham militerisme dan totaliter. Sikap seperti ini menimbulkan perlawanan rakyat secara terbuka maupun melalui gerakan bawah tanah.

Kekalahan tentara Jepang kepada Sekutu tidak dapat diketahui oleh rakyat Riau karena begitu pandainya Jepang menutupi. Bahkan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga tidak dapat diketahui oleh rakyat Riau. Baru teks proklamasi itu dapat diketahui oleh masyarakat Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 1945 dalam bentuk selebaran/pamflet.

Sambutan dan dukungan mengenai kemerdekaan segera ditunjukkan oleh segenap rakyat. Tapi karena mendapat tekanan dari Jepang, maka timbul benturan. Pada umumnya dalam mengungkapkan gelora kemerdekaan itu dengan mengibarkan bendera merah putih. Konsekuensi dari tindakan itu

timbul peristiwa berdarah seperti di Bintang Tiga Bengkalis, Bangkinang, Bagan Siapi-api.

PERALIHAN PEMERINTAHAN DARI R.I.S. KE N.K.R.I.

Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagai suatu bangsa, perjalanan yang dilakukan telah cukup panjang baik sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan. Alur perjuangan bangsa Indonesia itu perlu diketahui secara pasti bagi generasi penerus.

Antara tahun 1945-1950 telah terjadi berbagai peristiwa atas bentuk pemerintahan di Indonesia ketika masih dalam Negara Indonesia Serikat (RIS). Bentuk negara Indonesia Serikat itu tidak sesuai dengan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia telah memaksakan kehendak dengan membentuk negara-negara federal. Dengan segala cara satu persatu wilayah Republik Indonesia dikuasai dan dipersempit. Daerah yang telah dikuasai itu lalu dibentuk sebagai negara bagian (negara federal) dalam wadah RIS dibawah kekuasaan negeri Belanda¹⁵. Usaha-usaha Belanda tidak mengenal lelah untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai koloninya. Salahsatu usaha itu dapat dilihat di Riau, Belanda terus memblokir dan menangkapi kapal-kapal nelayan di perairan wilayah RI di Kuala Siak. Bahkan pada Januari 1948 tampak kapal P/7 milik Belanda datang di Ketamputih menuju perairan Riau untuk melakukan blokade¹⁶.

Negara bagian Riau yang tergabung dalam wadah RIS dibentuk oleh Belanda pada tahun 1947 itu¹⁷ ternyata tidak mendapat respon masyarakat

¹⁵ Ada 16 negara bagian yang masing-masing dikepalai oleh seorang wali negara, ia adalah penduduk asli Indonesia. Ke 16 negara bagian itu adalah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, Riau, Bangak, Biliton, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

¹⁶ ANRI : Arsip Kepolisian Negara no.573

¹⁷ Negara Bagian Riau dibentuk berdasar Besluit Gubernur Jenderal 12 Juli 1947.

Pembentukan Negara Bagian Riau ini bersamaan dengan pembentukan Negara Bagian Bangka, Biliton berdasar Besluit Gubernur Jenderal 12 Juli 1947 no. 7 dan 8. Keputusan ini lalu

seluruhnya. Ketidak puasan rakyat akhirnya meletus dalam berbagai perlawanan yang berlangsung antara lain di Tanjungkilang, Pekanbaru, Bengkalis, Tembilang, Rengat dan Siak Sri Indrapura.

Kembalinya pemerintahan RIS ke negara kesatuan RI adalah cerminan satu prinsip dasar dari kehidupan dan keyakinan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu padu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata bahwa rakyat Riau pun lebih memilih NKRI daripada bentuk pemerintahan RIS. Indonesia yang telah dibagi dalam 16 negara bagian itu ternyata tidak bertahan lama. Satu per satu ingin bergabung dengan RI. Maka berdasar keputusan Presiden RIS 143/1950 menghapus Riau sebagai bagian dari RIS dan menggabungkan daerah itu dengan NKRI.¹⁸

Darma bakti kepada negara yang telah disumbangkan oleh para pendiri negara untuk kembali ke NKRI harus disebar luaskan dan disampaikan kepada generasi. Perjuangan yang tulus untuk tetap memilih RI telah dipelopori oleh Sultan Siak. Sebagai ungkapan rasa cinta tanah air dan NKRI, Sultan Siak mengutus wakilnya menghadap gubernur Sumatera di Pematang Siantar pada tahun 1946, bahwa Sultan berkeinginan menyumbangkan sebagian hartanya kepada negara RI untuk membantu perjuangan terwujudnya NKRI.¹⁹

Selama masa kekuasaan RIS itu, Belanda telah memaksakan kehendak membagi Sumatera menjadi 3 wilayah Administrasi. Pembagian Sumatera menjadi 3 provinsi itu tidak membuat puas sebagian rakyat Sumatera. Karena itu dicapai kata sepakat setelah NKRI terwujud menggantikan RIS peraturan tersebut ditinjau ulang.²⁰

diundangkan dalam Staatsblad v. Nederland Indie 1947 no.123 (Bangka), no.124 (Biliton), no.125 (Riau).

¹⁸ ANRI : Keputusan Presiden RIS no.143 tahun 1950. ANRI : Arsip Sekkab no. 130

¹⁹ Surat Mr. Teuku Moh. Hasan wakil ketua senat RIS di Jakarta ditujukan kepada Direksi Pengembalian Hak di Jakarta 17 Februari 1950. Teuku Moh. Hasan adalah putera Aceh yang kemudian menjadi gubernur Sumatera pertama. ANRI : Arsip Kabinet Perdana Mentri RI Yogya no. 101

²⁰ Resolusi 25 Juli 1950. ANRI: Arsip Kabinet Perdana Mentri Yogya 1945-1950 no. 105

Memang bagi sekelompok masyarakat yang tipis rasa nasionalismenya tetap mendukung terbentuknya negara bagian Riau itu²¹. Tapi ternyata akhirnya mereka sadar bahwa negara yang bebas dari penindasan bangsa asing adalah yang sangat didambakan rakyat.

Untunglah RIS hanya seumur jagung usianya. NKRI yang dicita-citakan telah terwujud melalui perundingan Meja Bundar (KMB) di Den Haag 27 Desember 1949 Perjuangan diplomasi RI yang tidak mengenal lelah dalam menghadapi agresi Belanda telah ditempuh hingga dalam sidang Panitia Keamanan KTN. Dalam sidang itu Indonesia tetap pada pendirian untuk mempertahankan kedudukan pulau-pulau kecil di sekitar Jawa, Sumatera, Madura ada dibawah administrasi dan kekuasaan NKRI²².

Dengan kembalinya NKRI mulailah ditata kembali administrasi pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Di Riau terjadi serah terima kekuasaan dan tentara RI kembali menduduki kota-kota dan konsolidasi pemerintahan sesuai dengan UU no.22/1948 mulai dilaksanakan. Status keresidenan dihapus disatukan dalam wadah Provinsi Sumatera Tengah.

Setelah NKRI terbentuk, Belanda telah meninggalkan Indonesia maka peta administrasi ditata ulang. Diadakan pemekaran kedudukan provinsi, kabupaten dan kota. Berdasar Keppres dalam UU Darurat no.21 tahun 1957 dilakukan pemekaran wilayah daerah otonom, di Sumatera Tengah meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau²³.

Dengan kembalinya wilayah Indonesia dalam wadah NKRI ternyata tidak berarti perjuangan telah selesai. Rasa tidak puas sekelompok masyarakat yang meletus dalam suatu pemberontakan menjadi batu ujian bagi negara yang

²¹ Pernyataan seorang bangsawan dari Hampan Perak yang menyatakan tetap setia kepada Belanda daripada kepada Jepang dan bersedia memimpin gerakan melepaskan diri dari NKRI dan mendirikan Negara merdeka Sumatera Timur dibawah naungan Belanda 1947. ANRI Arsip Algemeene secretarie no. 1279

²² Yogya 11 Desember 1948. Staf Angkatan Bersenjata RI Urusan pekerjaan istimewa. ANRI: Arsip Delegasi Indonesia no. 406.

²³ ANRI: Arsip koleksi pribadi Moh. Yamin no.830. Berdasar UU Darurat 1957 Propinsi Sumatera Tengah dibubarkan dan dibentuk Daerah Swatantra TK I meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau. Dalam UU darurat itu disertakan batas-batas wilayah serta kewenangan penanganan P3D. ANRI: Arsip Sekkab no. 154. UU Darurat ini lalu diperbarui dan diundangkan dalam UU Darurat no. 61 tahun 1958. ANRI: Arsip Sekkab no. 272.

masih muda usia itu dengan menghadapi saudara sendiri yang berbeda pandangan. PRRI telah memporakporandakan wilayah Sumatera termasuk Riau. Tapi akhirnya dapat diselesaikan dan bagi yang bersedia kembali kepangkuan ibu pertiwi mendapat ampunan.

BATAM PULAU IMPIAN

Perjalanan dari Singapura ke Pulau Batam hanya memakan waktu 45 menit dengan ferry dan tidak lebih 15 menit dengan helikopter. Luas wilayah kurang-lebih $\frac{1}{4}$ Singapura, memanjang 26 km, lebar 35 km (415 km²).

Indonesia sadar bahwa letaknya yang persis berhadapan dengan selat Singapura sebagai jalur perdagangan bebas bertaraf Internasional merupakan salahsatu modal atau kelebihan yang belum dimanfaatkan sama sekali.

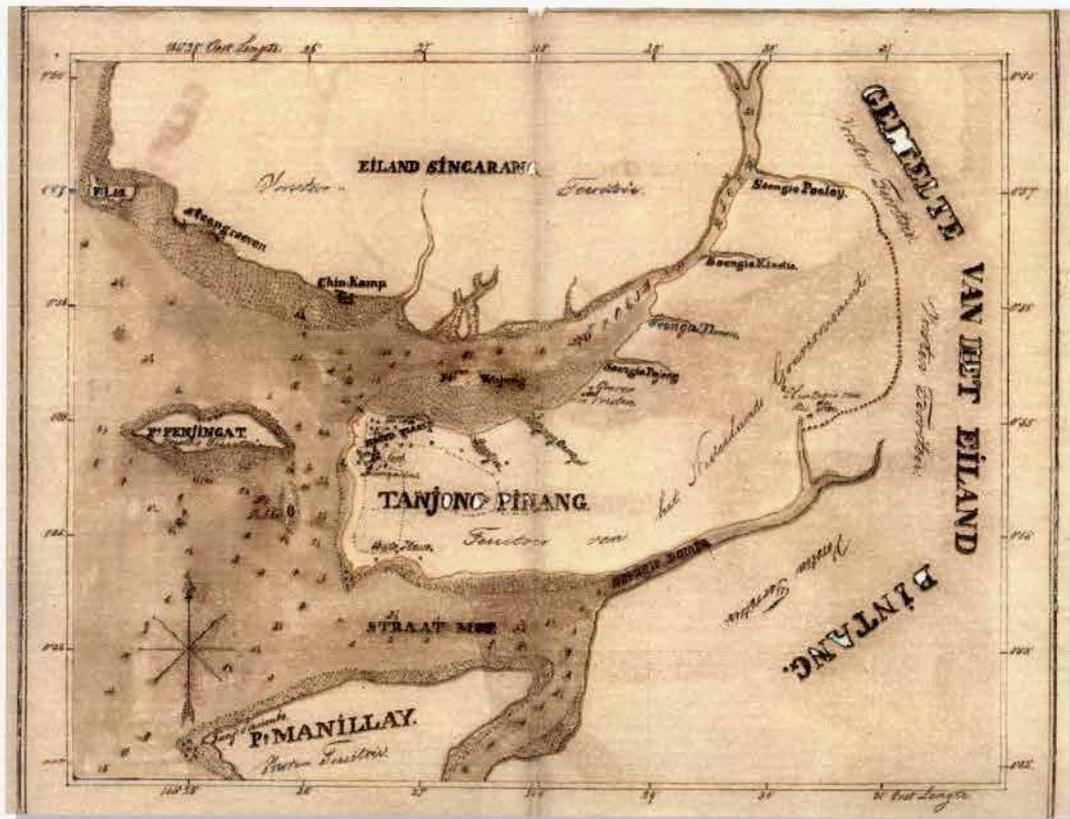
Lama Batam merupakan mutiara terpendam bagi Indonesia, berabad lamanya pulau ini merupakan pulau mati. Terlebih-lebih bila kita mau menoleh ke belakang, pada masa jaya Kerajaan-kerajaan Melayu pada abad 17 dan 18, kawasan ini pernah menjadi rebutan berbagai pihak.

Seperti Raffles yang tidak keliru memilih Singapura, maka Indonesia masa kini juga tidak keliru memilih Batam untuk menjadi Singapuranya Indonesia. Kerajaan Riau menikmati kejayaannya karena tahu dan mampu memanfaatkan potensi wilayahnya yang sedemikian strategis. Demikian pula Indonesia belajar dari masa lampau itu, juga optimis akan dapat memetik buah yang sama.

Demikianlah dalam pembangunan nasional di segala bidang, Pulau Batam tetap mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Dengan pembangunan Pulau Batam membuktikan kebenaran sejarah, bukan sekedar membangkitkan kenangan sukses raja-raja Melayu Riau abad 18 yang lalu.

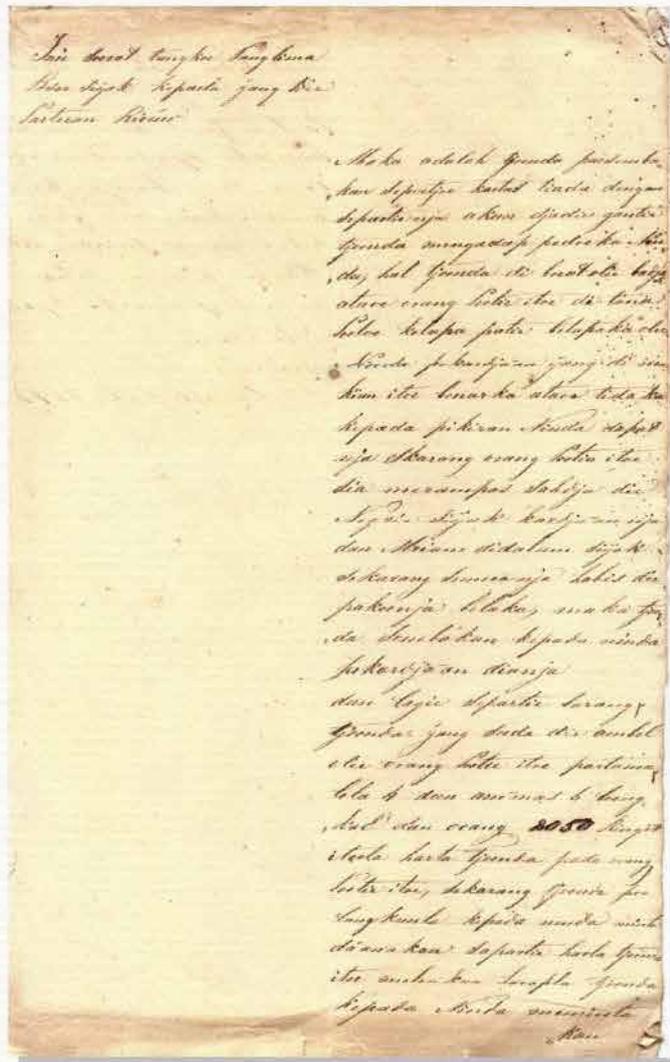
RIAU SELAYANG PANDANG

**BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI
MASA
KERAJAAN-KERAJAAN**



Peta wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau-pulaunya diputuskan 29 Oktober 1830. Sebelah Utara dibatasi oleh Selat Singapura.

(Sumber : ANRI, Riau 73/a)



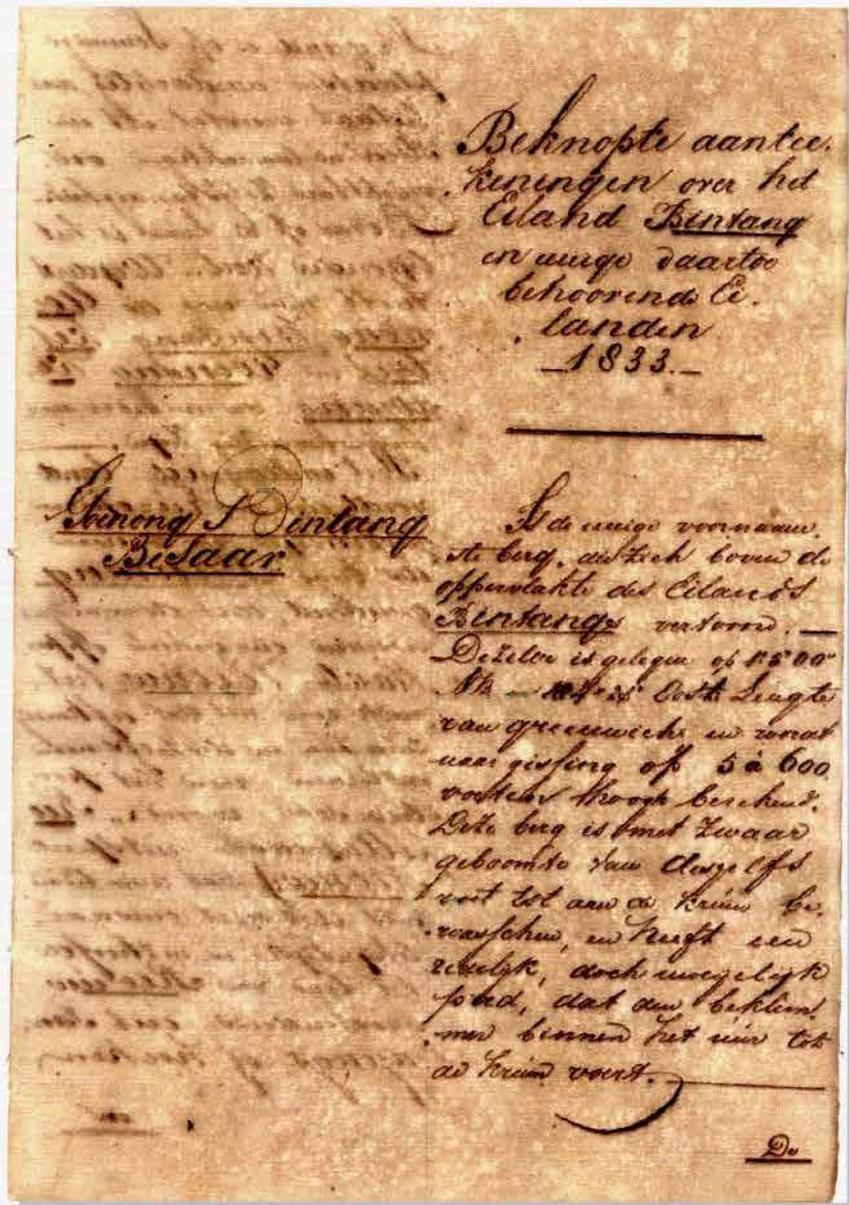
**Surat Tuanku Panglima Besar Siak kepada Yang
Dipertuan Riau tentang penyatuan Riau dan Lingga.
1 Desember 1856.**

(Sumber : ANRI, Riau 97/b)

1. Kumbang	25. Lian
2. Pemanjait Tempol	26. Belak Air pa
3. Kumbang Lapa	27. Kelung
4. " Kufil	28. Sidi
5. Kumbang	29. Sogang
6. Kumpang	30. Pangray
7. Kumpang Bicarang	31. Pangray
8. Kumpang (10 p.)	32. Pangray
9. Kumpang	33. Pangray
10. Kumpang	34. Pangray
11. Kumpang	35. Pangray
12. Kumpang	36. Pangray
13. Kumpang	37. Pangray
14. Kumpang	38. Pangray
15. Kumpang	39. Pangray (2 p.)
16. Kumpang	40. Pangray
17. Kumpang	41. Pangray
18. Kumpang	42. Pangray
19. Kumpang 20 p.	43. Pangray
20. Kumpang	44. Pangray
21. Kumpang	45. Pangray
22. Kumpang	46. Pangray
23. Kumpang	47. Pangray
24. Kumpang	48. Pangray
25. Kumpang	49. Pangray
26. Kumpang	50. Pangray
27. Kumpang	51. Pangray
28. Kumpang	52. Pangray
29. Kumpang	53. Pangray
30. Kumpang	54. Pangray
31. Kumpang	55. Pangray
32. Kumpang	56. Pangray
33. Kumpang	57. Pangray
34. Kumpang	58. Pangray
35. Kumpang	59. Pangray
36. Kumpang	60. Pangray
37. Kumpang	61. Pangray
38. Kumpang	62. Pangray
39. Kumpang	63. Pangray
40. Kumpang	64. Pangray
41. Kumpang	65. Pangray
42. Kumpang	66. Pangray
43. Kumpang	67. Pangray
44. Kumpang	68. Pangray
45. Kumpang	69. Pangray
46. Kumpang	70. Pangray
47. Kumpang	71. Pangray
48. Kumpang	72. Pangray
49. Kumpang	73. Pangray
50. Kumpang	74. Pangray
51. Kumpang	75. Pangray
52. Kumpang	76. Pangray
53. Kumpang	77. Pangray
54. Kumpang	78. Pangray
55. Kumpang	79. Pangray
56. Kumpang	80. Pangray
57. Kumpang	81. Pangray
58. Kumpang	82. Pangray
59. Kumpang	83. Pangray
60. Kumpang	84. Pangray
61. Kumpang	85. Pangray
62. Kumpang	86. Pangray
63. Kumpang	87. Pangray
64. Kumpang	88. Pangray
65. Kumpang	89. Pangray
66. Kumpang	90. Pangray
67. Kumpang	91. Pangray
68. Kumpang	92. Pangray
69. Kumpang	93. Pangray
70. Kumpang	94. Pangray
71. Kumpang	95. Pangray
72. Kumpang	96. Pangray
73. Kumpang	97. Pangray
74. Kumpang	98. Pangray
75. Kumpang	99. Pangray
76. Kumpang	100. Pangray

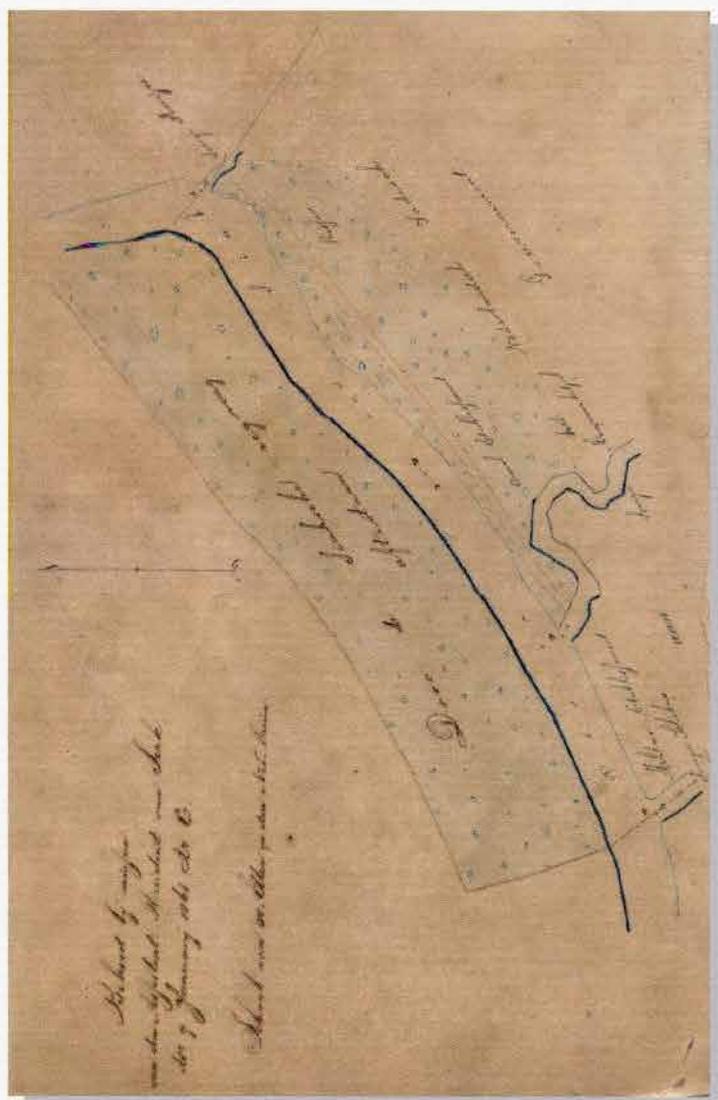
Daftar tanah dan pulau-pulau yang menjadi milik kerajaan Lingga Riau.

(Sumber : ANRI, Riau 113/b)



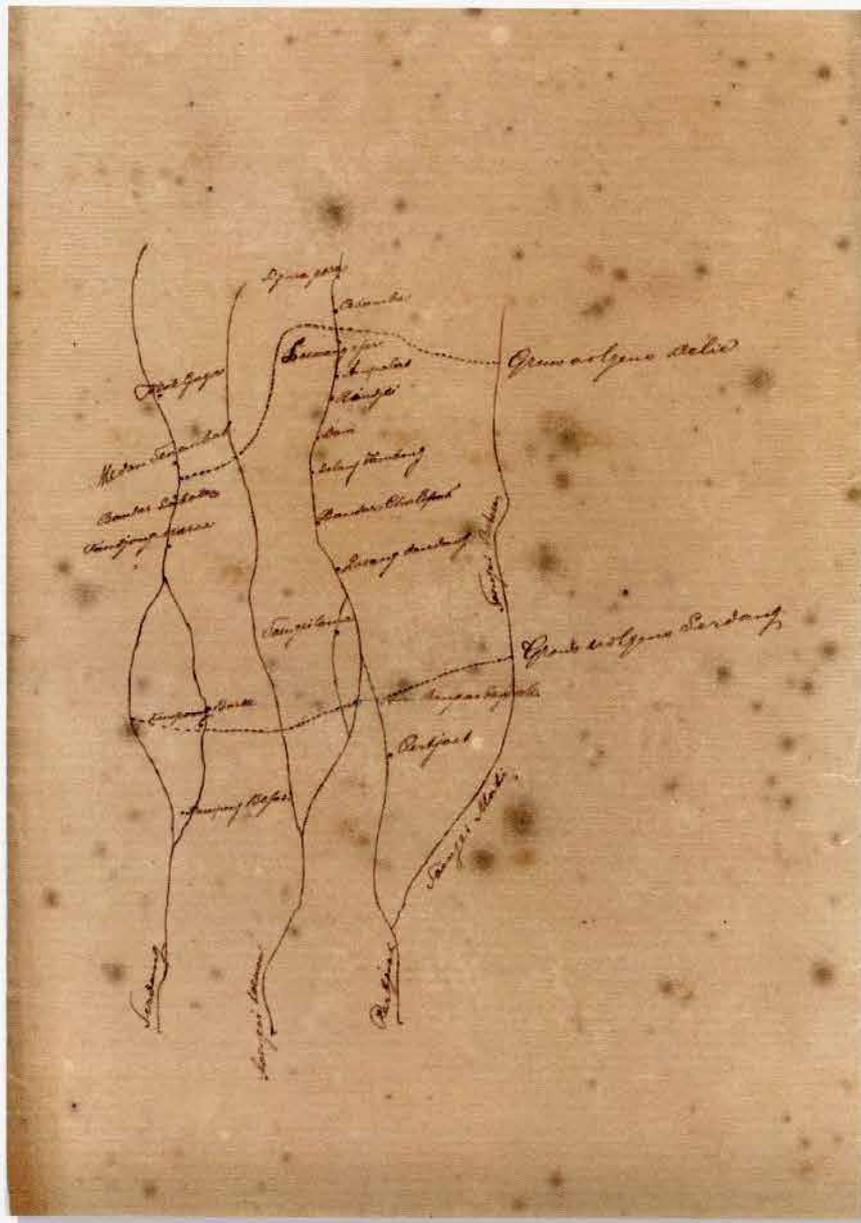
Gambaran singkat tentang Pulau Bintang serta batas-batas wilayahnya, 1833.

(Sumber : ANRI, Riau 75)



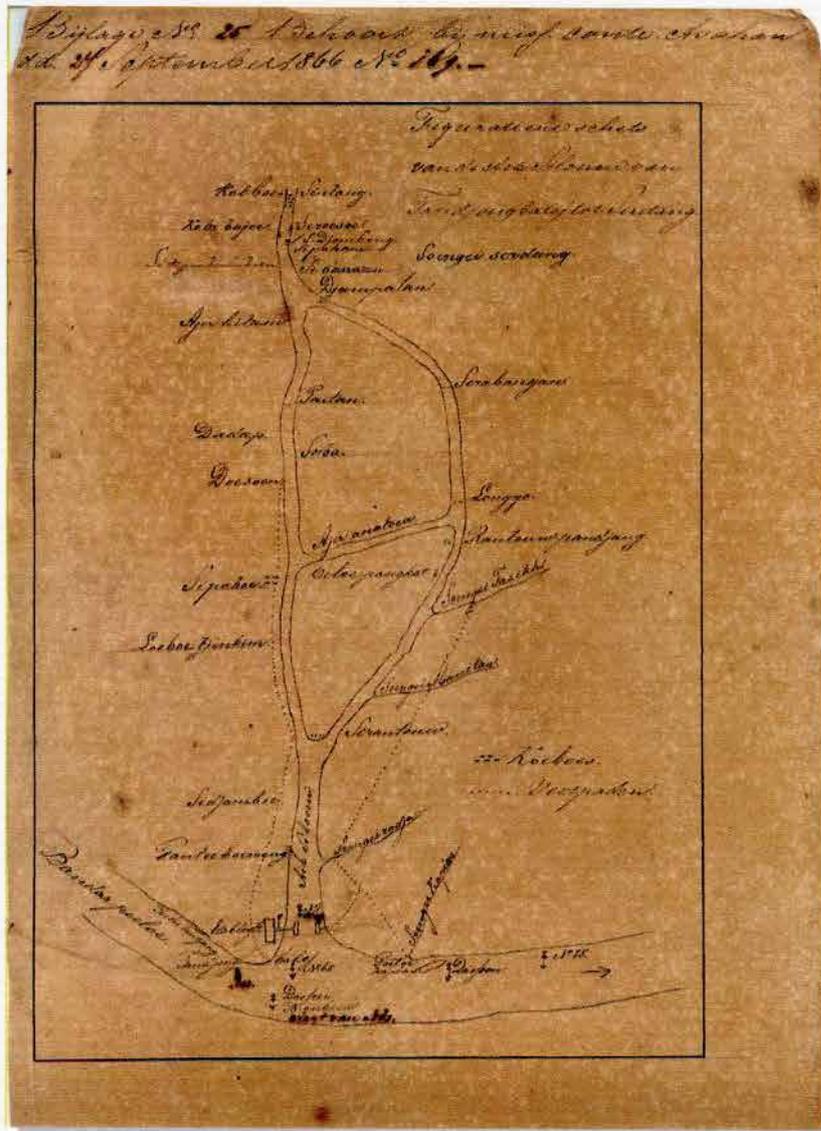
**Sungai Siak jadi Batas Gubernemen dengan kerajaan,
1861.**

(Sumber : ANRI, Riau 164)



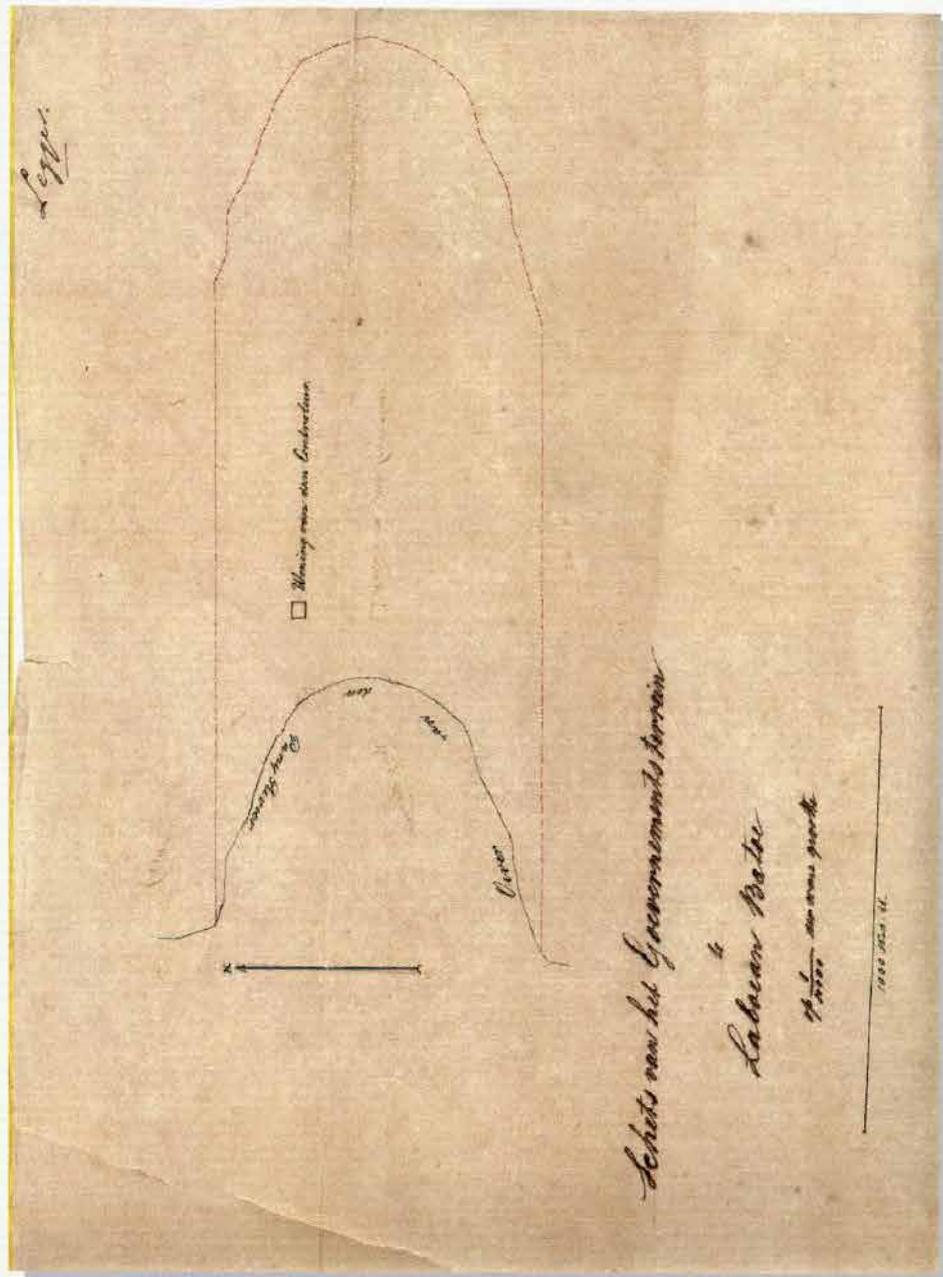
**Garis perbatasan antara Langkat, Deli, Serdang,
dibuat tahun 1872.**

(Sumber : ANRI, Riau 224/4)



Sketsa sungai air Silau yang ada di kerajaan Riau, mulai dari hulu ke muara, dari Sintang ke Tanjung Balai.

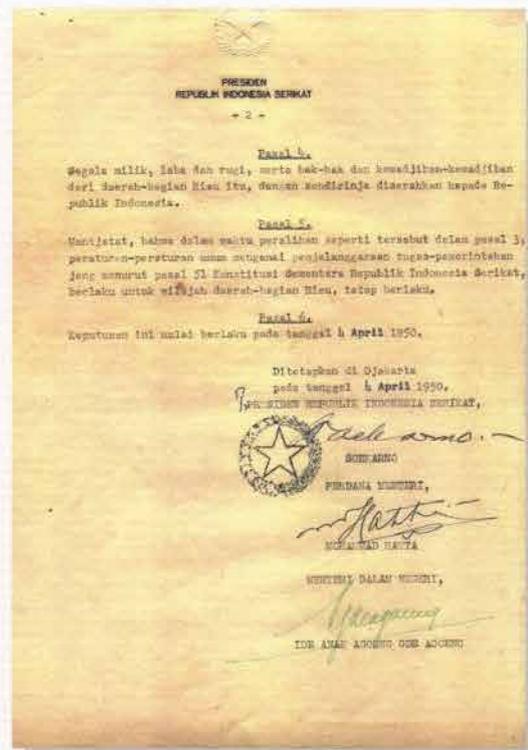
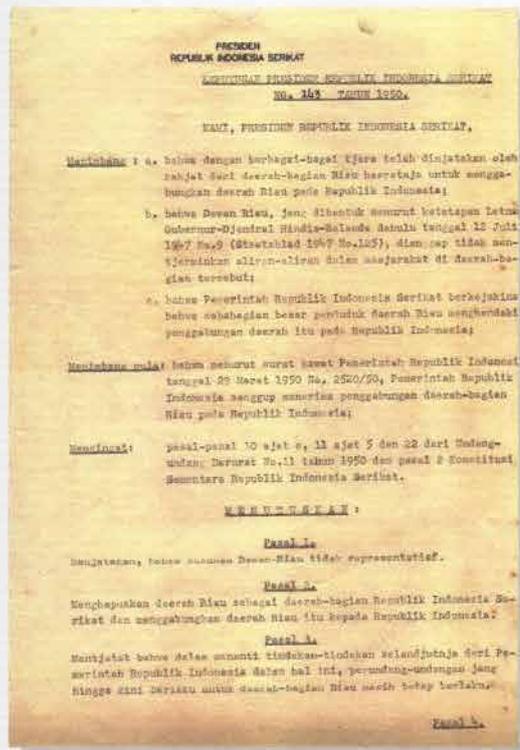
(Sumber : ANRI, Riau 210/D)



Sket wilayah Gubernemen di Labuhan Batu.

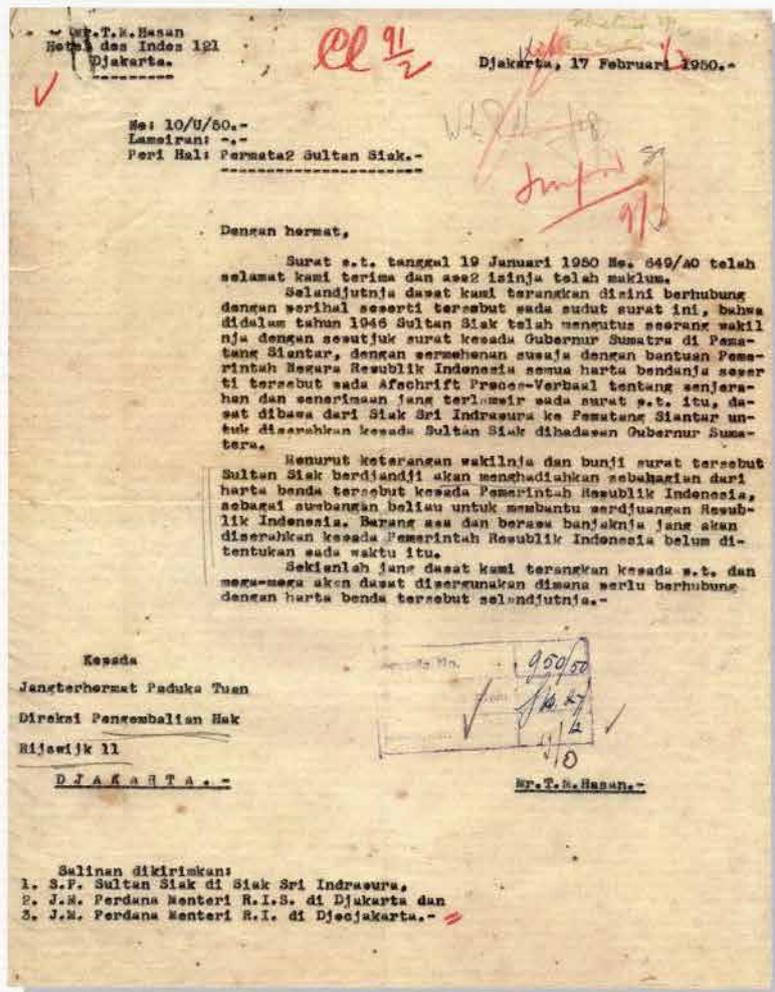
(Sumber : ANRI, Riau 116)

**KEDUDUKAN WILAYAH
ADMINISTRASI RIAU
SETELAH KEMERDEKAAN**



Indonesia yang telah dibagi dalam 16 negara bagian oleh Belanda, ternyata tidak bertahan lama. Satu per satu ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Negara bagian Riau yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal 12 Juli 1947 No. 9 (Staatsblad 1947 No. 125), ditolak rakyat yang lebih memilih Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden RIS 1943/1950, menghapus Riau sebagai bagian dari RIS dan menggabungkan daerah itu pada NKRI.

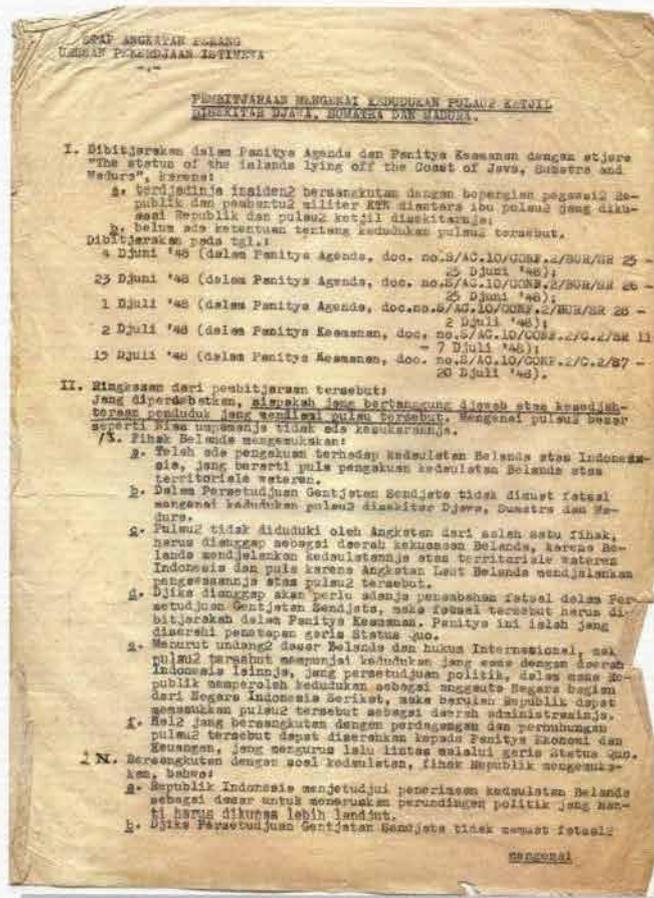
**(Keputusan Presiden RIS no. 143/1950 .
Sumber : ANRI, Sekkab 130)**



Sebagai ungkapan rasa cinta tanah air dan NKRI, Sultan Siak mengutus wakilnya menghadap Gubernur Sumatera di Pematang Siantar 1946, bahwa Sultan berkeinginan menyumbangkan sebagian hartanya kepada negara Republik Indonesia untuk membantu perjuangan terwujudnya NKRI.

(Surat Mr. Teuku Moh. Hasan – putra Aceh yang kemudian menjadi Gubernur Sumatera pertama -, Wakil Ketua Senat RIS di Jakarta, ditujukan kepada Direksi Pengembalian Hak di Jakarta, 17 Februari 1950.

Sumber : ANRI, KPM RI Yogya 101)



Perjuangan diplomasi Republik Indonesia menghadapi Agresi Belanda dalam sidang panitia keamanan KTN, mempertahankan kedudukan pulau-pulau kecil di sekitar Jawa, Sumatera, Madura tetap di bawah administrasi dan kekuasaan NKRI.

**(Yogya 11 Desember 1948, Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, urusan pekerjaan istimewa.
Sumber : ANRI, Delegasi Indonesia 406)**

Penetapan Presiden No. 13 tahun 1948.

Presiden Republik Indonesia,
Mendengar Menteri Kehakiman,

Menimbang: bahwa perlu menetapkan kembali tempat kedudukan dan daerah-hukum dari beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera;

Memperhatikan pasal 33 dan 34 Rechtsreglement Buitengewesten dan Staatsblad 1936 No. 137 dan 144;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Menentukan, bahwa :

A. dikaresidenan Tapanuli ada dua Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Tapanuli Utara, bertempat kedudukan dikota Sibolga, 2. Wias, 3. Selindang, 4. Humbang, 5. Tuba Semoair dan 6. Tanah Dairi.

2. Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan, bertempat kedudukan dikota Padang Sidempuan, yang daerah-hukumnya meliputi kabupaten: 1. Angkola Sepirok, 2. Batang Gadis dan 3. Padang Lawas.

B. dikaresidenan Riau ada satu Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Riau, bertempat kedudukan dikota Pekanbaru, yang daerah-hukumnya meliputi seluruh karesidenan Riau.

Kedua : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Ditetapkan di Djokjakarta
pada tanggal 26 April 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO,

MENTERI KEHAKIMAN:

SOESATTO TIRTOPRODJO.

Dikeluarkan
pada tanggal 26 April 1948.

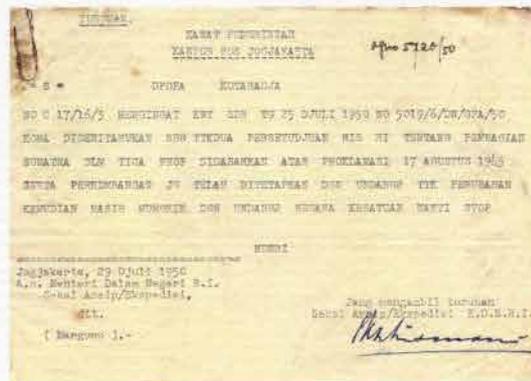
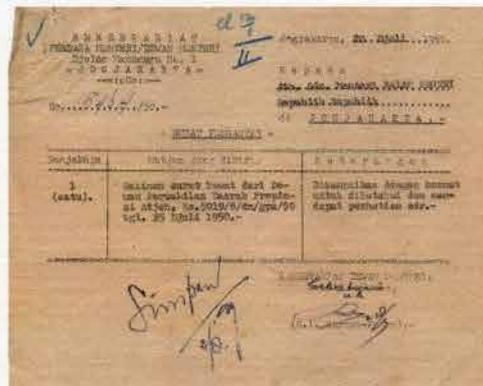
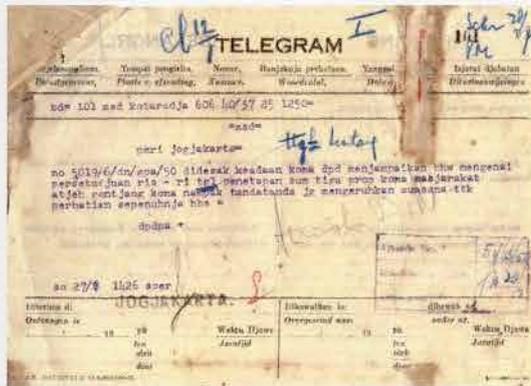
SEKRETARIS NEGARA,

Turunan dikirimkan kepada
Sekretariat Negara
Jendakerta.



**Untuk tertibnya suatu wilayah perlu menetapkan kembali tempat kedudukan daerah hukum di beberapa wilayah Sumatera.
Di Keresidenan Riau ditetapkan adanya pengadilan negeri Riau bertempat di Pekanbaru dengan daerah hukumnya meliputi seluruh Keresidenan Riau.**

**(Ditetapkan di Yogyakarta 26 April 1948 oleh Presiden I RI.
Sumber : ANRI, Setneg 254)**



Pembagian wilayah Sumatera menjadi 3 provinsi ternyata tidak membuat puas sebagian rakyat Sumatera, karena itu dicapai secepat setelah NKRI telah terwujud menggantikan negara RIS, peraturan tersebut ditinjau kembali.

(Telegram dari Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk Perdana Menteri RI di Yogyakarta 25 Juli 1950. Sumber : ANRI, Kabinet Perdana Menteri RI di Yogyakarta 1945 –1950 no. 105)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 No. 2.25/14/1.
 LAMPIRAN 2 (dua).
 PERHATIKAN: BERTU MENCARI DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN KEMENTERIAN.

BARTA 1 Agustus 1958.

Kepada
 DIREKTUR KABINET PRESIDEN
 di
P J A K A R T A.

Memujuk surat Saudara tanggal 28 Djuli 1958 No.2651/HE/58, dengan ini kami beritahukan, bahwa "Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara tahun 1957 No.75), sebagai Undang-undang" telah diundangkan pada tanggal 31 Djuli 1958 dengan diberi nomor 61 tahun 1958 dan dimuat dalam Lembaran Negara No.112 tahun 1958.

Memori penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.1646.

Sebagai dengan permintaan Saudara, sehalai uselkah Undang-undang itu telah disampaikan kepada Kementerian Penerangan untuk disiarkan dengan perantaraan radio dan sehalai lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui.

Eksekh Undang-undang No.61 tahun 1958 asli rangkimp dua bersama ini kami kirikan kembali.

Sekretaris Kementerian
 Kehakiman,
(Signature)
 (Mr. Soedarjo).-

Tembusan kepada:
 1. Perdana Menteri,
 2. Menteri Dalam Negeri.

KAS.	11	PRESIDEN
AGEND.	1100/14/1/58	
TGL.	6-8-58	
BLW.	8	

Daerah

Sebagian realisasi Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang diundangkan dalam lembaran negara 1957 no. 75, tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, perlu disatukan menjadi Undang-undang No. 61 tahun 1958.

(Sumber : ANRI, Sekkab 272)

KEMENTERIAN PEMERINTAHAN

No. 111/U.P.

Djakarta, 2 September 1957.

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 21 TAHUN 1957.

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dianggap telah sewajarnya membentuk wilayah yang meliputi Kabupaten-kabupaten : 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tanah dan 3) Kerinci Hilir menjadi Daerah tingkat II dan berhubung pula dengan pembagiannya bekas wilayah Daerah Propinsi Sumatera Tengah seperti dikehendaki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 dan 3 Daerah tingkat I, yaitu: 1) Sumatera Barat, 2) Jambi dan 3) Riau dengan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 75 tahun 1957), dianggap perlu mengadakan perubahan mengenai wilayah-wilayah dari Kabupaten Pasisir Selatan/Kerinci dan diwujudkan Daerah tingkat II seperti terasbut dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Meningat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara No. 6 tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1957);

Menanggap : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

Pasal 1.

Dalam pasal 1 - setelah diubah sedemikian, hingga terdiri dari 2 ayat - dari Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- A. Dalam ayat (1) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 - a. Angka "14" dalam kalimat pertama diubah dengan angka "15";
 - b. No. 7 dari pasal 1 tersebut harus diganti: "Pasisir Selatan", dengan nama daerah tingkat II Pasisir Selatan dengan ketua-nya

Setelah wilayah nusantara kembali ke NKRI (belum termasuk Papua) Negara RIS dihapus, Belanda telah keluar dari Indonesia, kedudukan wilayah provinsi, kabupaten, kota mulai ditata kembali. Berdasarkan keputusan Presiden dalam UU Darurat No. 21 tahun 1957 dilakukan pemekaran wilayah untuk daerah otonomi tingkat kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Tengah meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

(Undang-undang Darurat no. 21 2 September 1957.
Sumber : ANRI, Arsip Koleksi Pribadi Moh. Yamin 830)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1957,
tentang
**PINDHANTAH DAERAH-DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAU.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa, dengan memperhatikan perkembangan keadaan-keadaan serta daerah yang bersangkutan dan sejalan dengan usaha Pemerintah untuk menanggapi terbentuknya daerah-daerah swatantra yang memenuhi syarat-syarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang serasi, memandang perlu meniadakan kembali wilayah daerah swatantra Propinsi Sumatera-Tengah sebagaimana telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1956 dan membagi wilayah tersebut dalam tiga bagian, untuk ketiga wilayah mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masing-masing dengan nama Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

b. bahwa berhubung dengan pertimbangan a di atas, maka peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah yang lama tersebut sub a di atas perlu dihapus dan diganti dengan peraturan pembentukan ketiga daerah swatantra tingkat I tersebut sub a di atas;

c. bahwa berhubung dengan keadaan yang memesak pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I tersebut lebih dahulu, perlu dilakukannya Undang-undang Darurat;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 151 dan 152 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 4 tahun 1956 tentang pelaksanaan pembentukan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 9);

Menetapkan : Dengan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957:

M E M O R A N D U M :

1. Menjabat : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

2. Menetapkan: **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINDHANTAH DAERAH-DAERAH SUMATERA TINGKAT I SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAU.**

P A R A I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

(1) Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1956 dihapuskan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12.

(1) Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada dalam wilayah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, begitu pula segala pembaculian dan laba beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Tengah sesudah penghapusan daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, serta mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi milik, tanpa sialan dan beban-beban Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan kerangka dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah-Daerah masing-masing ini wajib dan harus menanggung segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah dahulu belum dapat dilunasi.

(2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Tengah termasuk barang-barang penting yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat diserahkan kepada pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan pembentukan Daerah-Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

P A R A II.
KEMENTERIAN PERUMPUK.

Pasal 14.

Undang-undang Darurat ini dimajukan Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Jambi dan Riau.

Pasal 15.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **Banjar**
pada tanggal 9 Agustus 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno
(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,
Soewandi
(SANEWI HARJADIHATA)

Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957.
MENTERI KEKANTHAN,
Soedjatmodjo
(MAMUDJO)

Agar supaya penanganan pemerintahan lebih efektif maka berdasarkan UU Darurat no. 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan dan dibentuk Daerah Swatantra Tingkat I meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau. Dalam UU itu lebih dipertegas lagi batas-batas wilayah di ketiga wilayah tersebut termasuk kewenangan penanganan P3D-nya.

**(Undang-undang Darurat no. 19 tahun 1957.
Sumber : ANRI, Sekkab 154)**

D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Provinsi RIAU
(Ibukota PEKANBARU).

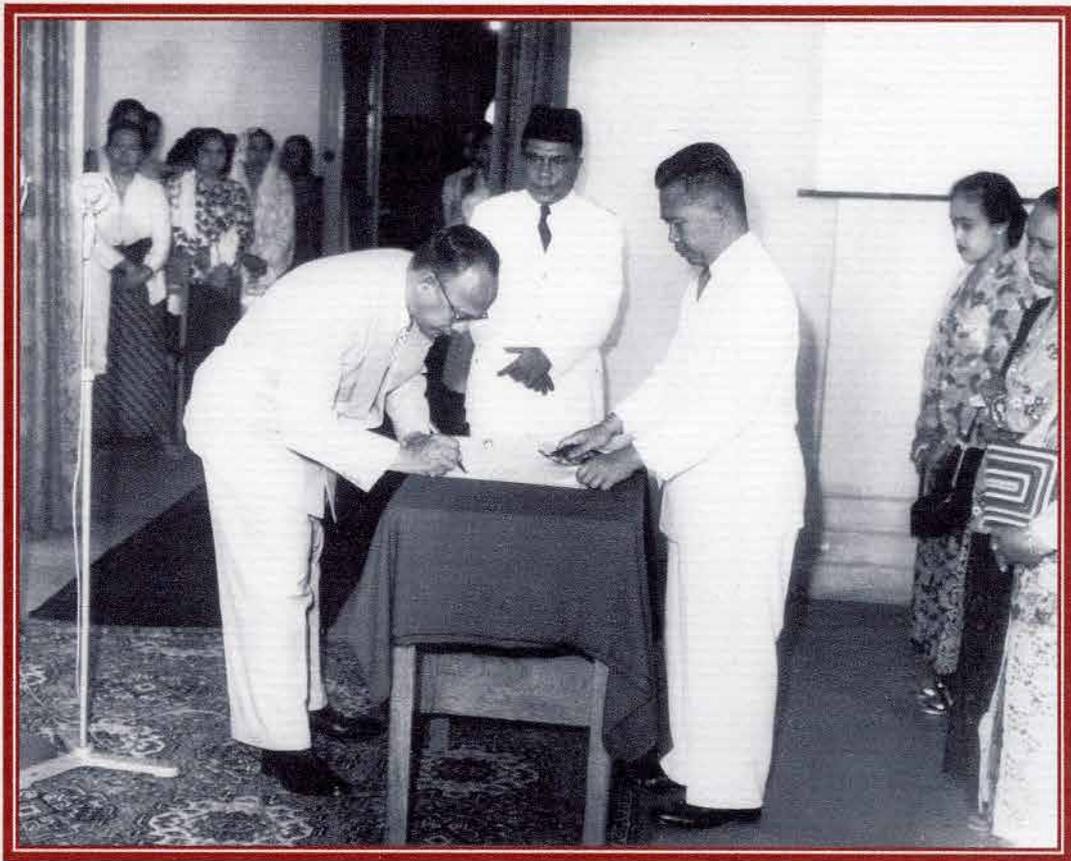
Karesidenan (Ibukota)	Kabupaten (Ibukota)	Kota- praja	Kewedanaan	Kecamatan	Karesidenan			
1. Kampar (Sungaiang)			1. Pekanbaru	1. Simp Bulu 2. Lingga 3. Kampar Kiri				
			2. Bangkinang	1. Bangkinang 2. Tiga Belas 3. Rempas				
			3. Pasirpang- rajan	1. Harbuh 2. Tembusu 3. Kepomahan 4. Mardindasalam 5. Bukit Empat Kota 6. Tatan				
			4. Pallewan	1. Dumut 2. Kuala Kampar 3. Manculan Kawan				
			2. Inderagiri (Sengit)				1. Inderagiri	1. Seruling 2. Sembiloh 3. Pataman 4. Gunung Anak Sarik 5. Sengit
							2. Inderagiri	1. Muja Inderagiri 2. Bukit Selat 3. Natih
							3. Inderagiri	1. Bangat 2. Seberida 3. Pasir Panju 4. Parang
							4. Bantan	1. Bantan Tengah 2. Bantan Nadik 3. Bantan Hilir 4. Tjerenti 5. Singingi
			3. Bengkalis (Bengkalis)				1. Bengkalis	1. Bengkalis 2. Bukit Batu 3. Mandau
							2. Dumi	1. Dumi 2. Rapat
							3. Selatpang- djang	1. Selatpang 2. Merbau
							4. Bagin Si- ngi-ni	1. Bagin 2. Tabu 3. Tabu Putih
							5. Siak Sari Inderapura	1. Siak 2. Sengit Apit
			4. Kepulauan Riau (Tandjungpinang)				1. Tandjung- pinang	1. Siantan Selatan 2. Siantan Utara 3. Tambelan 4. Siantan
							2. Karimun	1. Karim 2. Dandur 3. Moro Bukit

- 2 -
D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Provinsi RIAU
(Ibukota PEKANBARU).

Karesidenan (Ibukota)	Kabupaten (Ibukota)	Kota- praja	Kewedanaan	Kecamatan	Karesidenan
5. Lingga				1. Singkep 2. Lingga 3. Senayan	
				4. Pulau Tu- djuh	
PEKANBARU					
				1. Siantan Selatan 2. Siantan Utara 3. Tambelan 4. Siantan	
				1. Karim 2. Dandur 3. Moro Bukit	

Pembagian daerah administrasi Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru pada 1961, meliputi 4 kabupaten, 1 kotapraja, 16 karesidenan, 62 kecamatan.

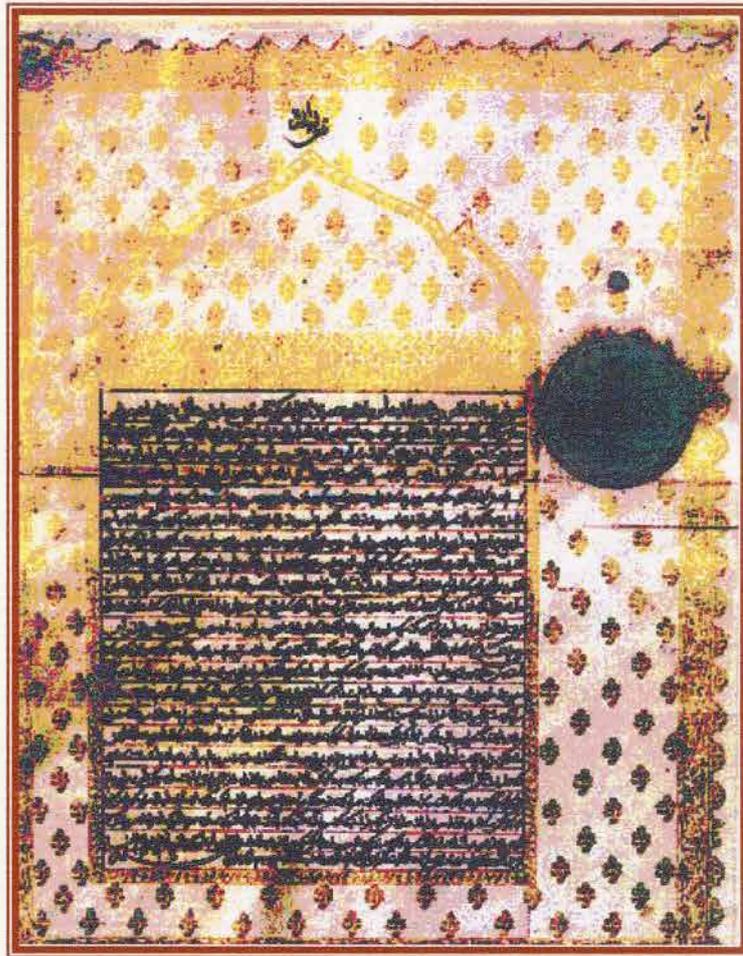
(ANRI, koleksi pribadi Marzuki Arifin no. 254)



**Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Kepala Daerah
Sumatera Tk.I Riau di Tanjung Pinang.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara)

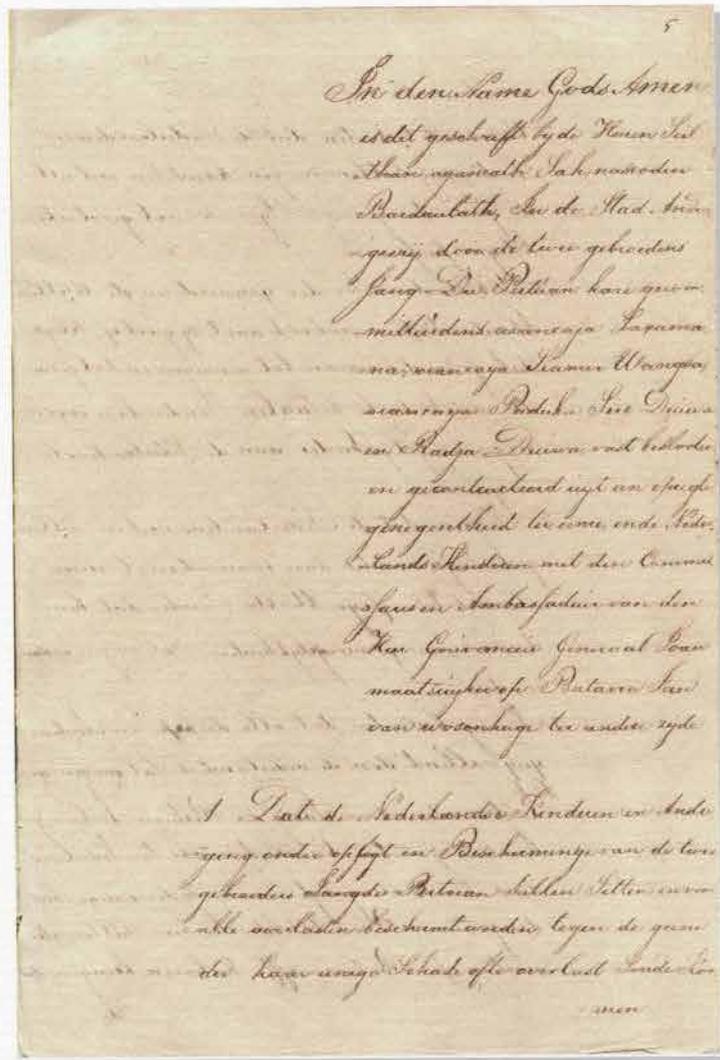
**PERJANJIAN
RAJA-RAJA RIAU
DENGAN BELANDA**



**Surat dari Sultan Langkat Riau Muhammad Muzafar Syah Bin Sultan Muhammad Syah kepada Gubernur Jendral Jan Jacob Rochusen di Batavia mengenai ucapan duka cita atas mangkatnya Raja Willem II dan ucapan selamat atas pengangkatan Raja Willem III.
6 Syaban 1264 H.**



**Perjanjian pertambangan yang ada di Siak antara
Residen Sumatera Timur dengan Sultan Siak, 18 Mei
1895.**



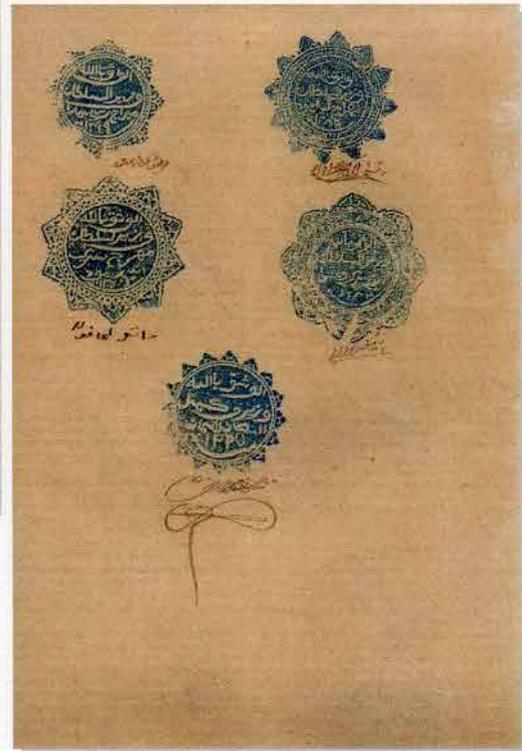
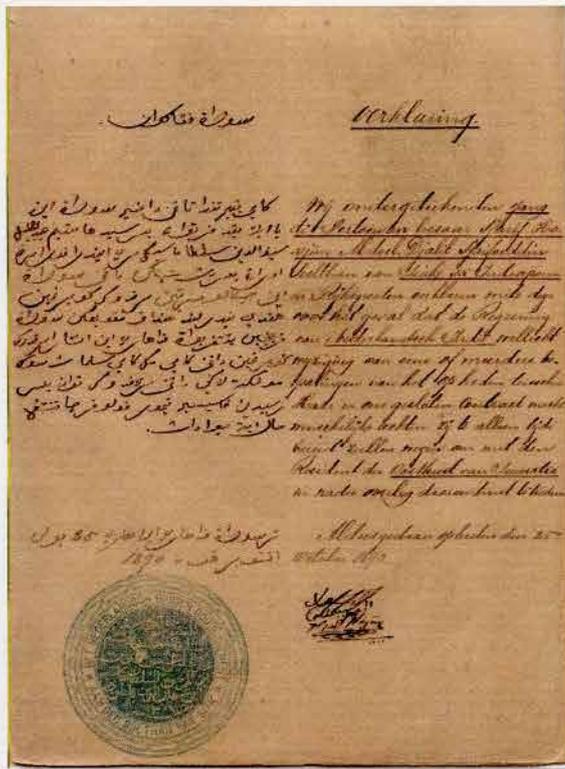
**Kontrak kerajaan Indragiri dengan Belanda,
27 Oktober 1664. Dari Kerajaan Indragiri dihadiri
oleh orang kaya Laksamana, orang kaya Siamer
Wangsa, orang kaya Paduka Sri Dewa dan Raja Dewa.**

(Sumber : ANRI, Riau 68/6)



**Kontrak antara kerajaan Riau dengan VOC
1 Nopember 1784. Masing-masing dihadiri oleh Sultan
Mahmoet dan J.P. van Braam.**

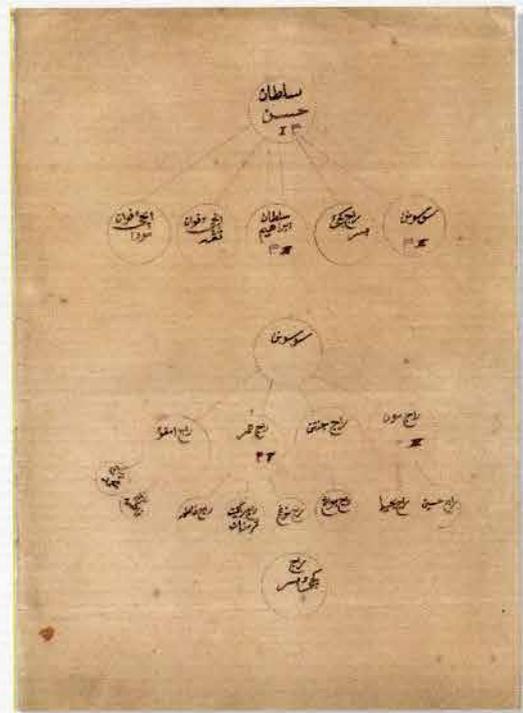
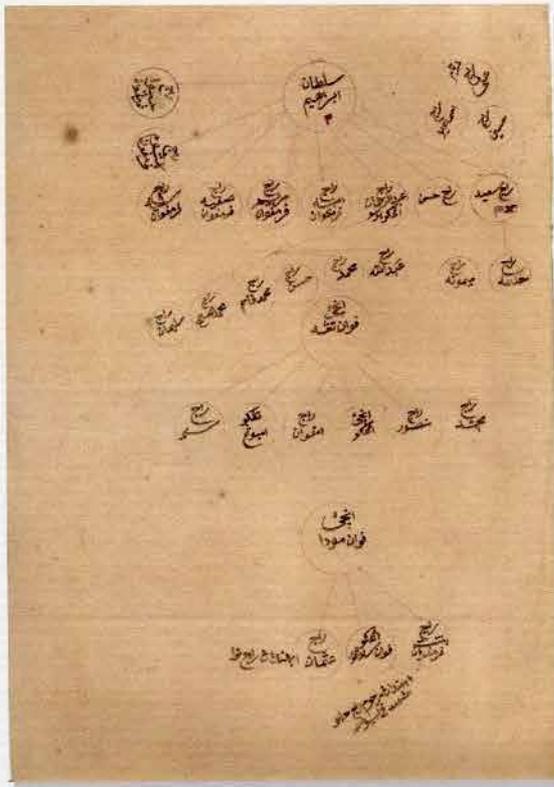
(Sumber : ANRI, Riau 70/1a)



Kontrak (verklaring) Yang Dipertuan Besar Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifudin Sultan Siak Sri Indrapura dengan pemerintah Belanda diwakili Residen Sumatera Timur. 1890.

(Sumber : ANRI GB. BT. 15 Januari 1892 no. 18/B)

KERAJAAN-KERAJAAN DI RIAU



Daftar nama raja-raja Indragiri beserta silsilahnya.

(Sumber : ANRI, Riau 215/7)



**Tiga pemuda perkasa dan tampan putra kerajaan
Deli dan Serdang.**

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 295/50)



Awaluddin Sani Perkasa Alam Syah Sultan Deli.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 295/54)

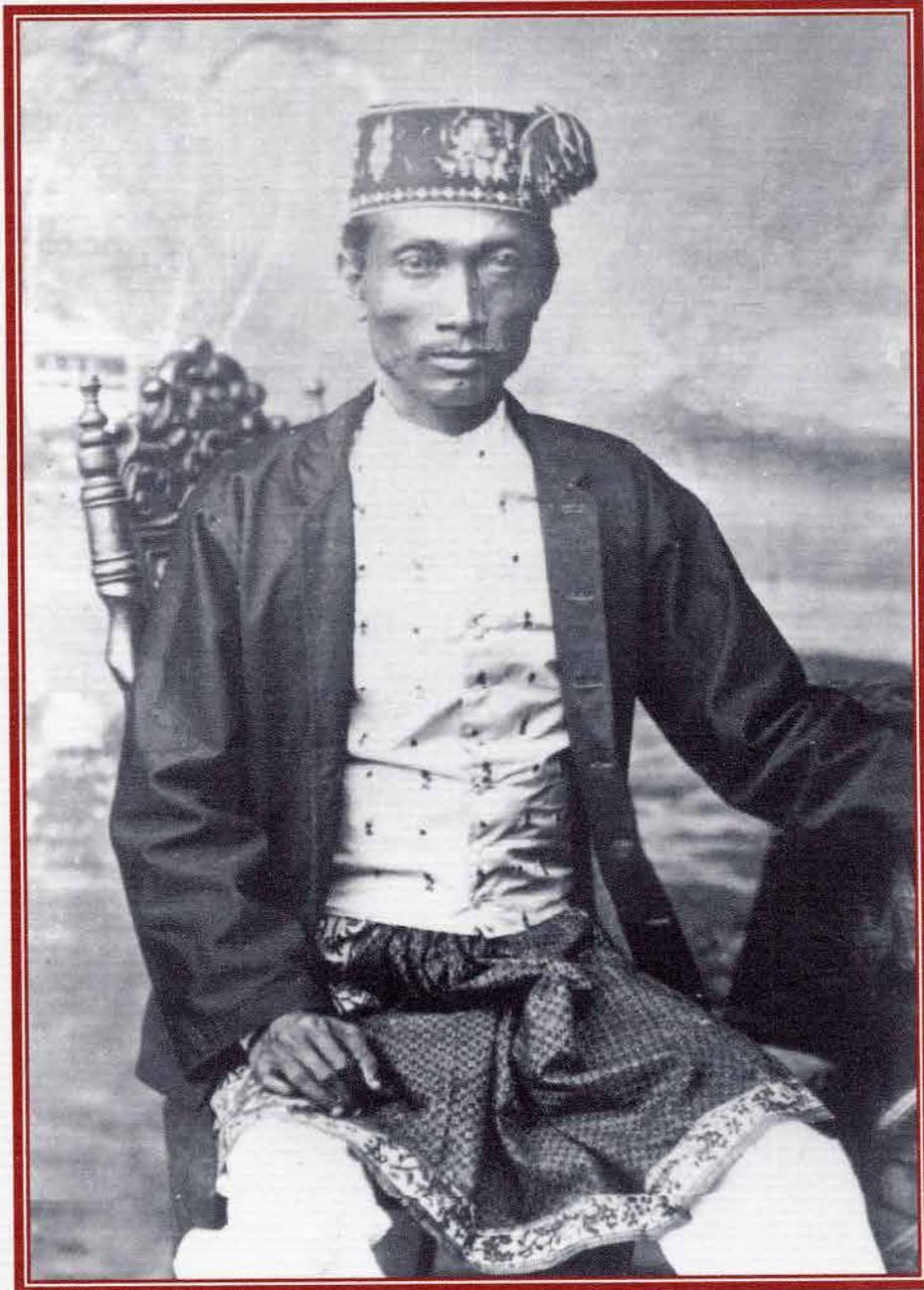
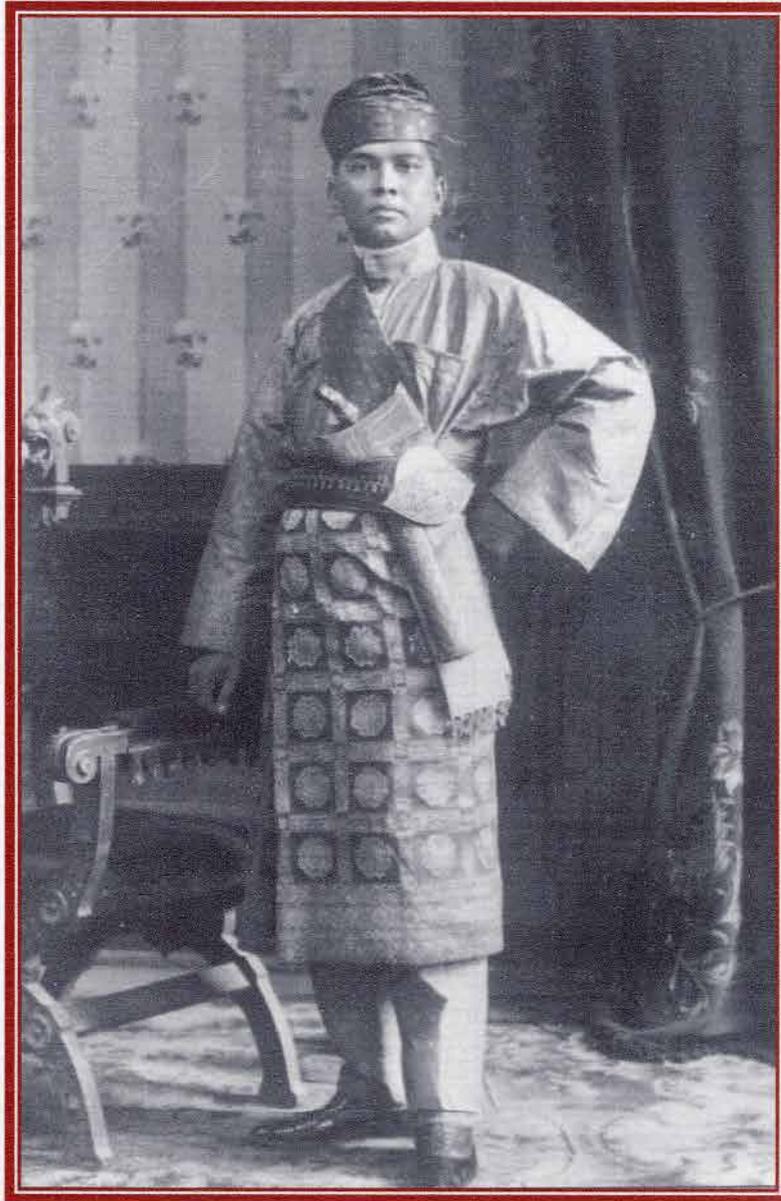


Foto Sultan Deli.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 295/62)



Figur Putra Mahkota Sultan Deli.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 197/16)



Lambang Kerajaan masa kejayaan Sultan Deli.

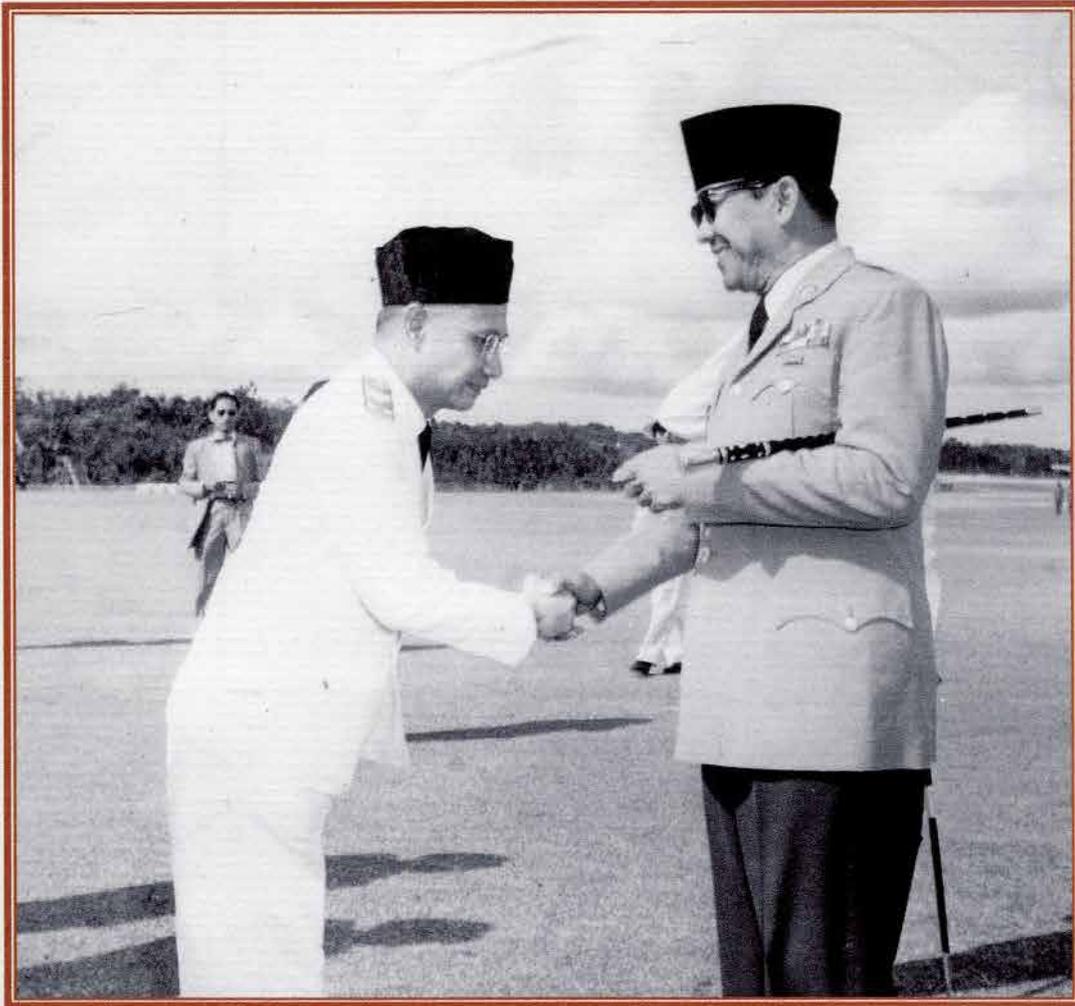
(ANRI : KIT, Sumatera Utara 292/32)



Mempelai duduk bersanding dalam suatu perkawinan keluarga raja di Istana Maimun Sultan Deli di Medan. Tampak mempelai mengenakan pakaian adat Melayu.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 378/16)

KUNJUNGAN KERJA KE RIAU



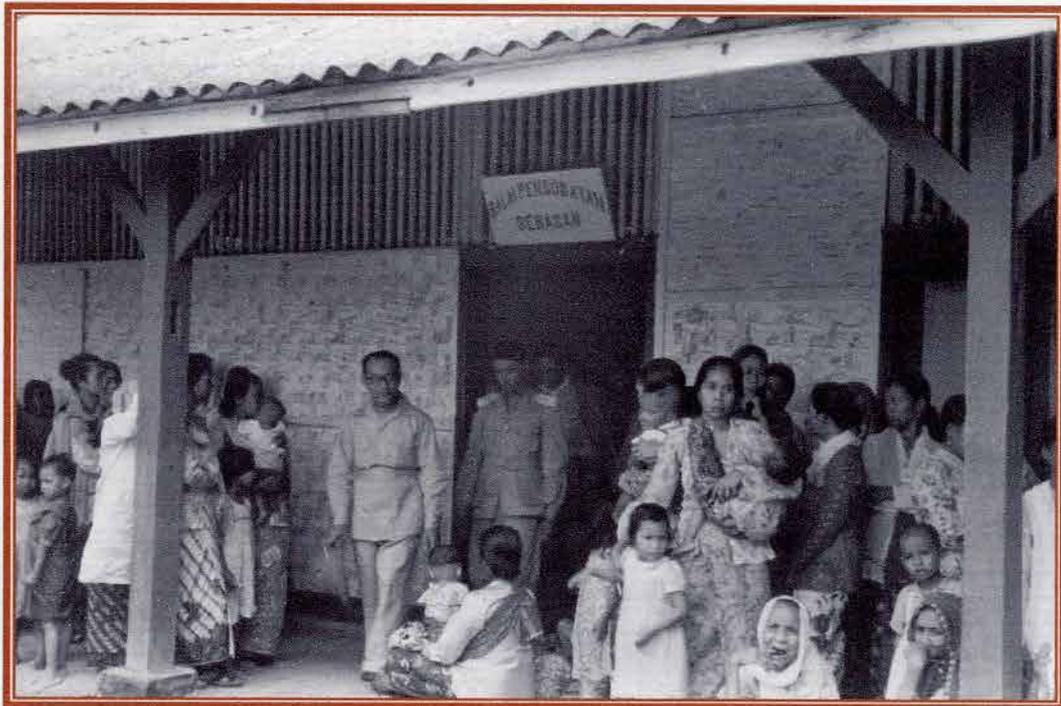
**Gubernur Riau menyambut kunjungan Presiden
Sukarno di Tanjung Pinang, 1959.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K590906EE 1-7)



Foto bersama Presiden Sukarno beserta Ibu Hartini dan para pembesar Riau beserta Nyonya di ruang utama Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam suatu acara kunjungan Presiden ke Riau. 1959.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K590906 EE 12)



**Wakil Presiden Hatta dalam kunjungan kerja ke Riau,
meninjau balai**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K540421 EE 12)



**Persembahan tanda mata dari rakyat kepada
Mohammad Hatta di Sedanau , Riau.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K540419EE 1-14)



**Dalam kunjungan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Riau.
Tampak Beliau mengunjungi sekolah rakyat di Midai**

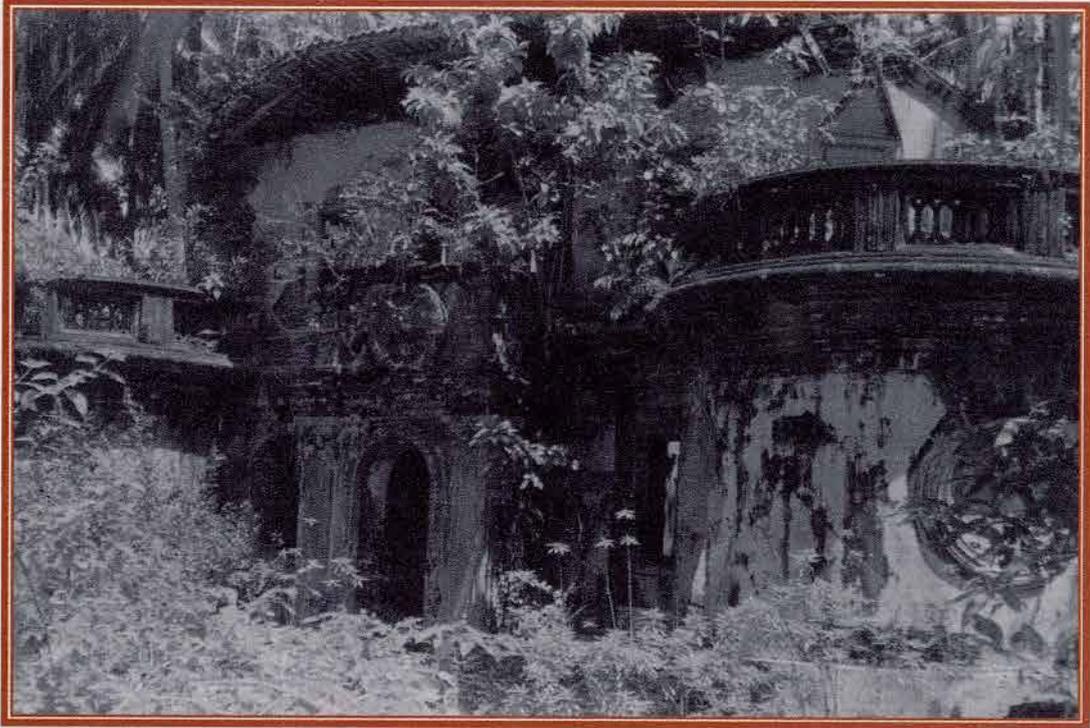
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K540418EE 12)



Wanita-wanita Riau dengan pakaian adat menyambut kedatangan Dr. Subandrio, 1963.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara 6313122)

PENINGGALAN BUDAYA



Reruntuhan bekas Istana Penyengat, 1951.
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K510805 EE 38)



**Lokomotif peninggalan Jepang di Pekan Baru, dalam
keadaan tak terawat, 1958**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580319 CC 1)



Bangunan Istana Sultan Deli tampak sangat indah.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 779/28)



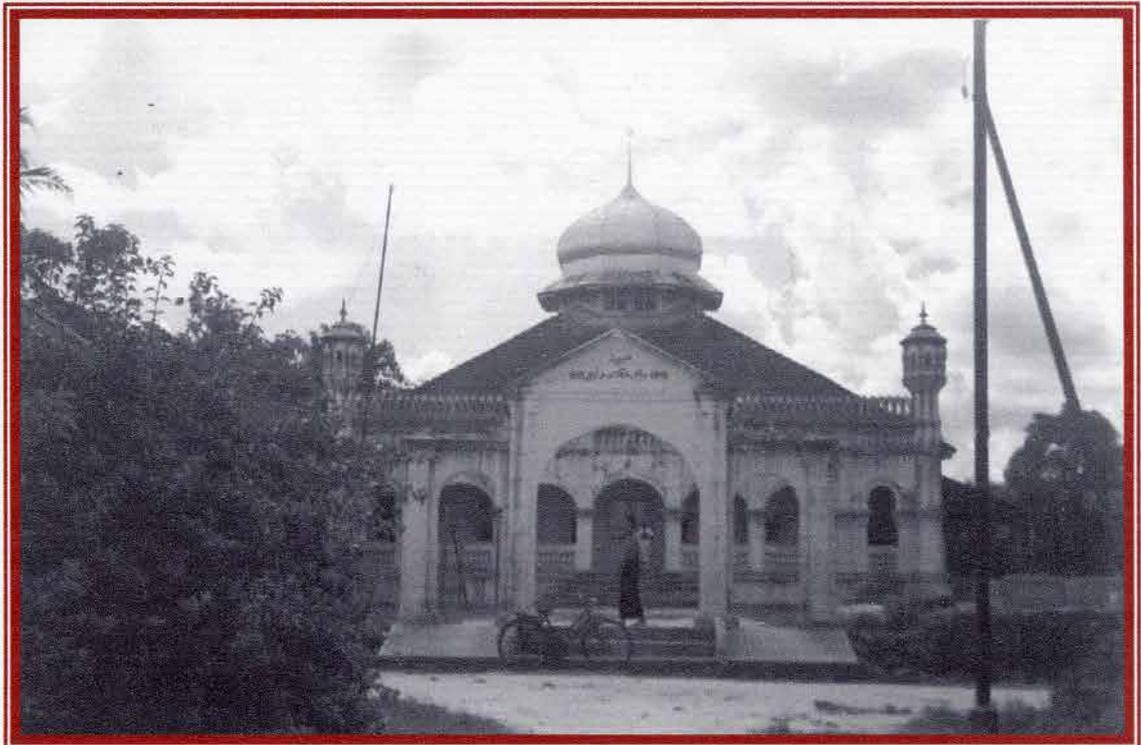
**Bangunan Istana Sultan Deli di Medan.
Gambar ini diambil pada tahun 1925, Sultan telah
menetap di sini sejak 1889.**

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 164/42)



Bangunan Masjid Labuhan Deli tempo dulu.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 804/63)



**Masjid Raya Pekan Baru. Masjid ini cukup tua usianya.
Dibelakang bangunan ini terdapat makam raja-raja Siak,
1958**

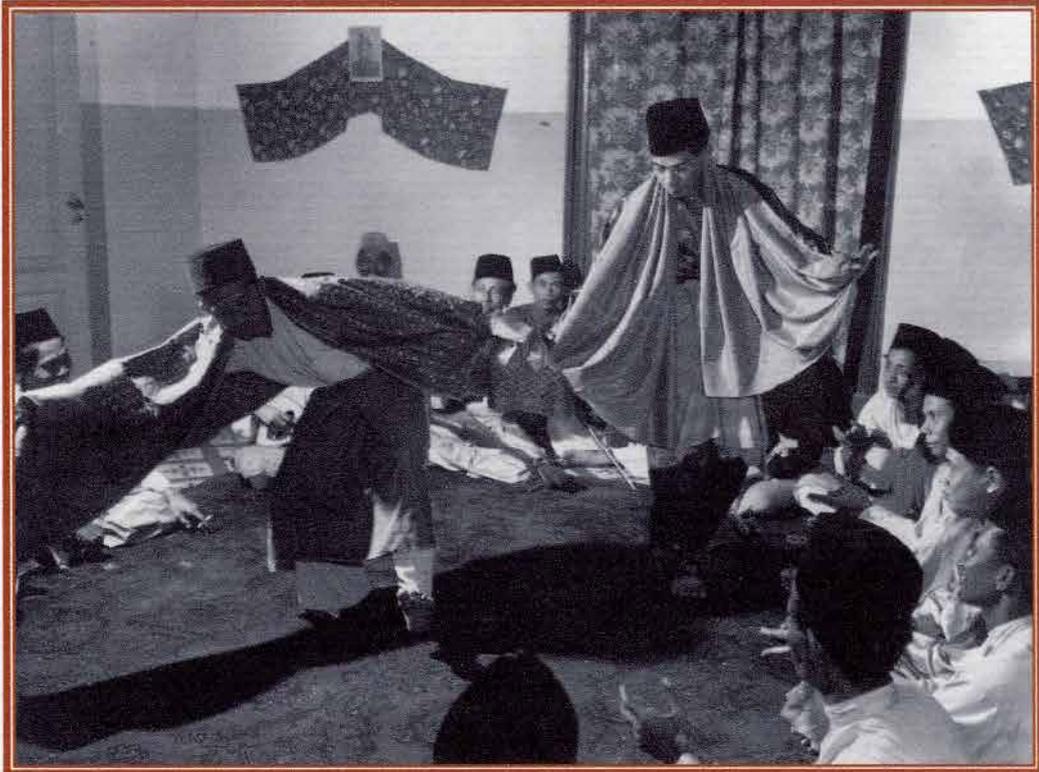
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580317 CC 1)



Bangunan Masjid Raya Deli milik Sultan.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 160/26)

SENI BUDAYA



**Pertunjukan tari Zhapin dalam suatu keramaian di Siak.
Tari ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, 1951.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K516726)



**Dalam suatu perayaan di Gubernuran Tanjung Pinang,
disajikan pula Tarian Minang, 1959**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara 590603EE9)



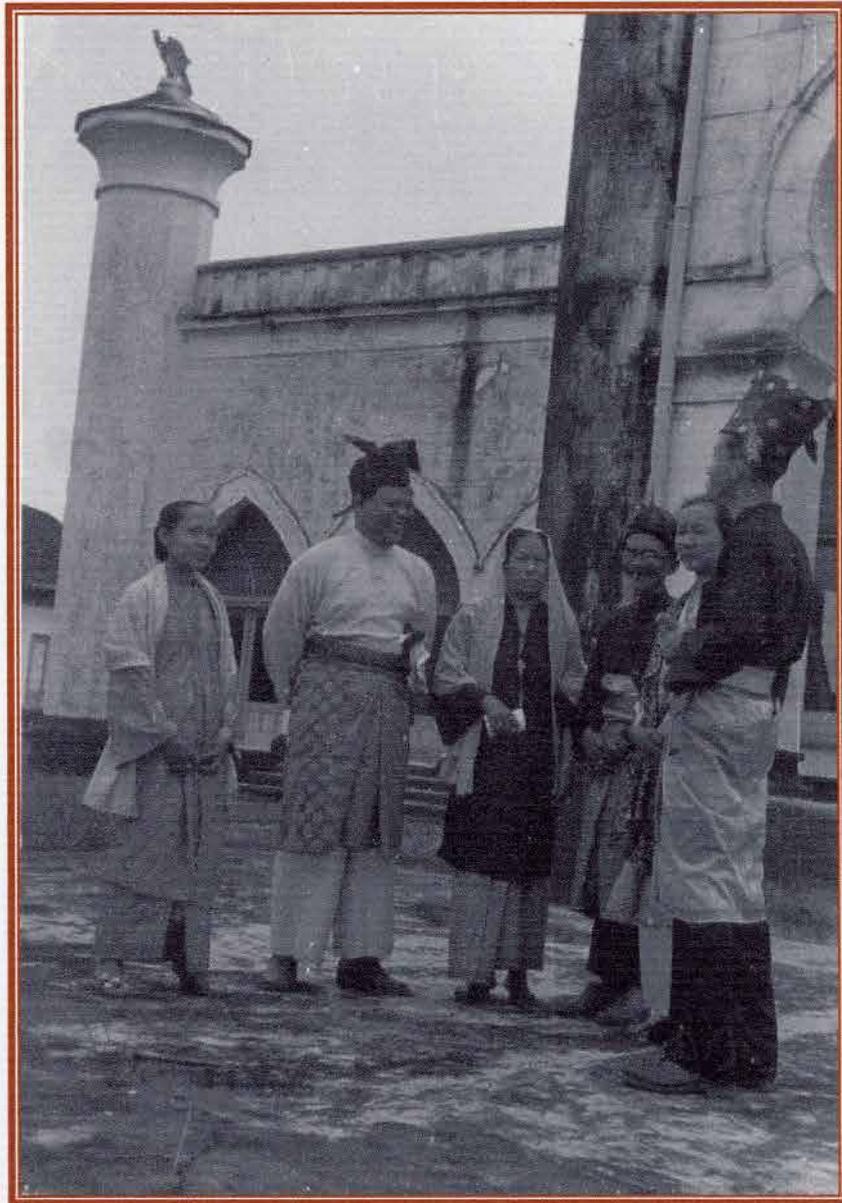
**Tampak berjajar para pegawai pamong praja pria
dengan pakaian adat Bangkinang, 1951.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K510719 CC46)



Pakaian adat untuk kaum pria di Bangkinang, 1951.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara 516664)



Pakaian adat Melayu yang dikenakan oleh keluarga bangsawan di Siak, 1951.

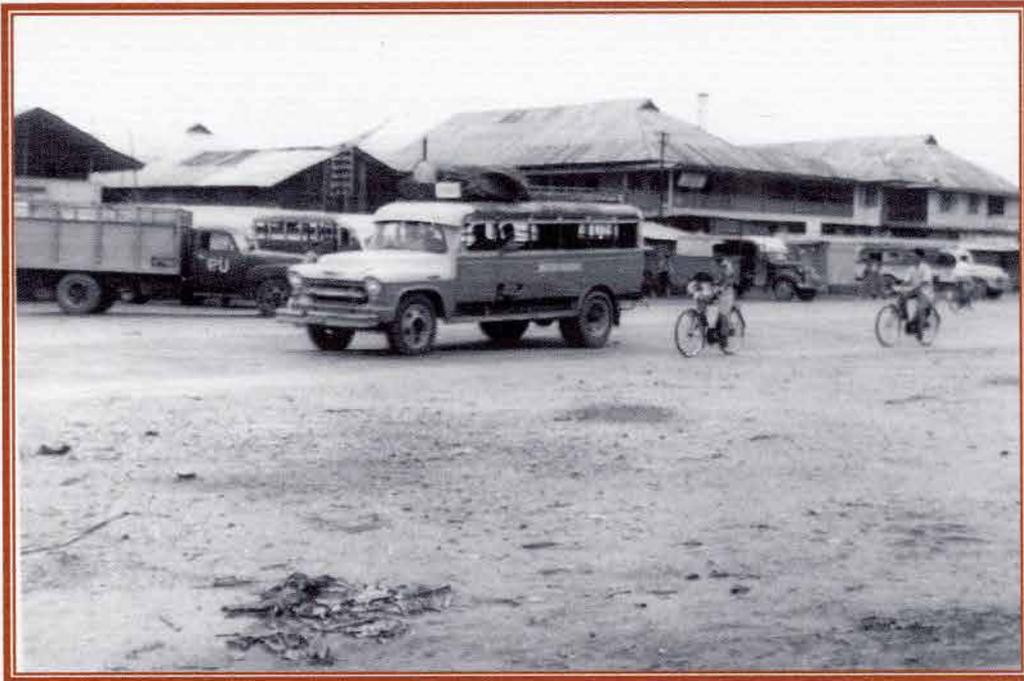
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K510719 CC 63)

PANORAMA



Rumah penduduk di tepi Pantai Pulau Penyengat, 1951.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K510805 EE 26)



**Suasana Jalan Pasar Besar di Pekanbaru.
Mei 1958.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580516 CC 6)



**Suasana Pelabuhan Tanjung Pinang, 1958.
(ANRI : Kempen Sumatera Utara 80917 EE 3)**



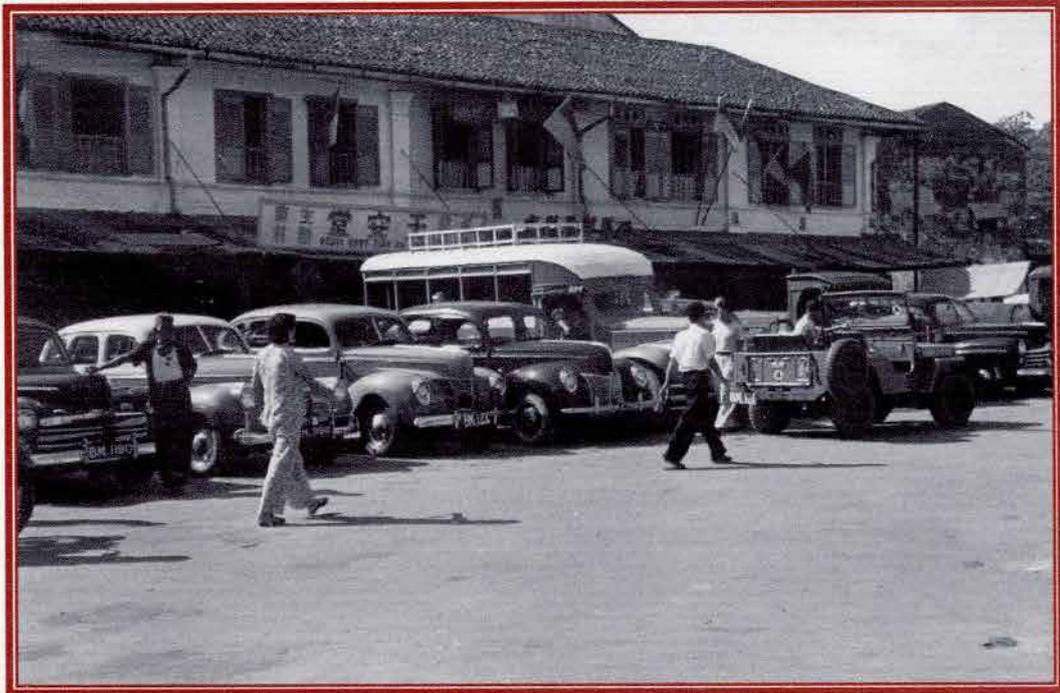
Suasana pantai di Tarempa dengan rumah-rumah penduduk serta perahu-perahu nelayan, 1953.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K530420 EE 1-19)



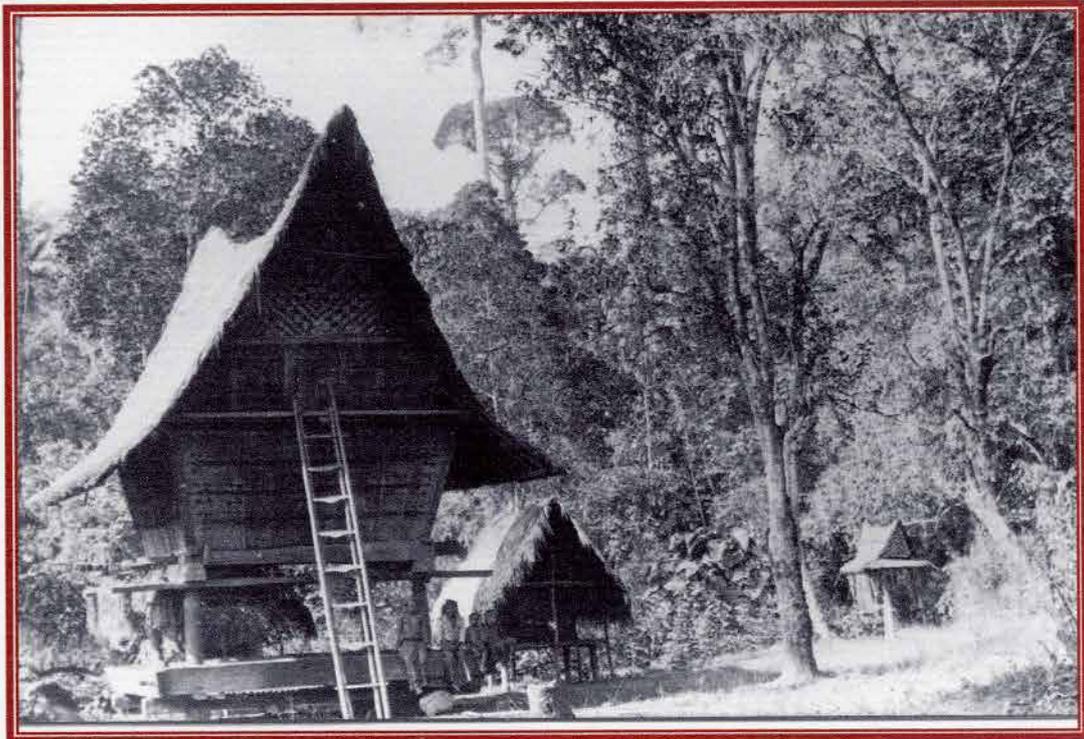
Suasana Kampung Melayu Sumatera di Deli.

(ANRI : KIT Sumatera Utara 838/75)



**Pangkalan bis dan taksi, pemandangan kota
Tanjung Pinang, 1953.**

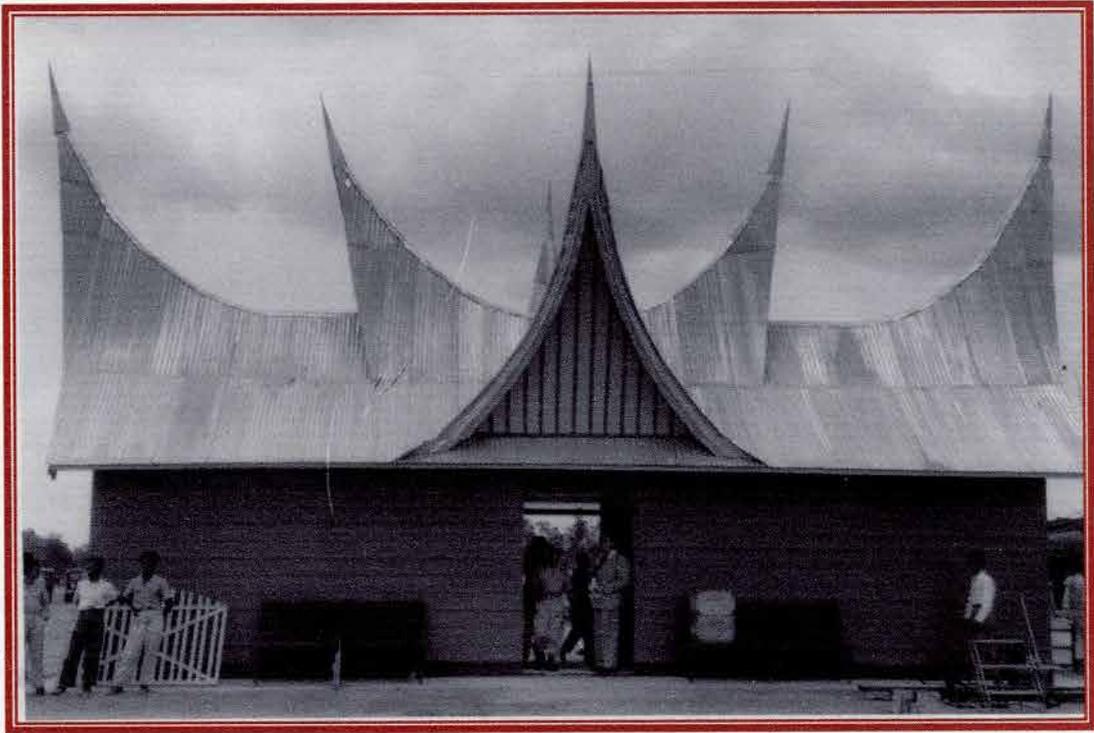
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K530421 EE 3-1)



**Rumah panggung berukir dengan indahnya di kampung
Telho sebagai lumbung tempat menyimpan padi.
Lumbung-lumbung ini juga terdapat
di Deli, Langkat dan Serdang.**

(ANRI : KIT Sumatera Utara 241/84)

SARANA TRANSPORTASI



**Pembukaan lapangan terbang Jayapura di Rengat
oleh Ir. Russeno.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K540902 DD 1-8)



**Bangunan Jembatan Begerpang yang
menghubungkan Deli - Serdang, 1928.**

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 110/80)



**Untuk pertama kali GIA mendarat di lapangan
terbang Pekan Baru, 1958.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580329 CC 3-2

NEGARA BAGIAN RIAU MASA RIS



Konferensi Sumatera bertempat di Medan 24 Maret 1945. Tampak utusan dari Riau juga hadir yaitu Muhammad Afan (nantinya menjadi Wali Negara Riau) dan Raja Muhammad. Konferensi ini membahas kepentingan Sumatera dipimpin oleh pemerintah Belanda.

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 1106/84)



Muhamad Afan Wali Negara Riau

P.T.T. PENBAHOELORAN	TELEGRAM	PENGAWATAN TERORIS
YBJ7=13 SD PAKANBARU 603 42/40 12 9.21	225 =SD= KEP KEPOL NEG JOGJAKARTA	Dikawatkan ke _____ Nomor _____ Tanggal _____ 19 _____ Diam _____ m _____ Oleh _____ Peneceksa _____
<small>Tulis: Kawan pengirim, nama, alamat, dan nomor kode pengirim, dan kode.</small>	<small>Sempurna setiapnya sebelum telegram atau mampunya dalam waktu yang ditetapkan dalam daftar janggoengan Pelaksana Telegram.</small>	

NR 631/A=2/2 KONA MNR LAPURAN DARI KETENTERAN BENGKALIS TTK-
- DUA TGL 5-2-48 DJAM 18.00 KELIHATAN SEBUAH KPL MISMU MERK P=7
- DATANG DARI KETAMPUTIH MEMUDJU ARAH KUALA SIAK TTK TEMBAK MENEM-
- BAK TAK TERDJADI TTK HABIS =

KKK RIAU +

RIAN NEGARA
49/10/48 Rahasia
1948

17-2 1930 KSN.

Sugan P. J.
No. 24

Diterima di **JOGJAKARTA** tgl. _____ 19 _____ jam _____ m _____ Ork

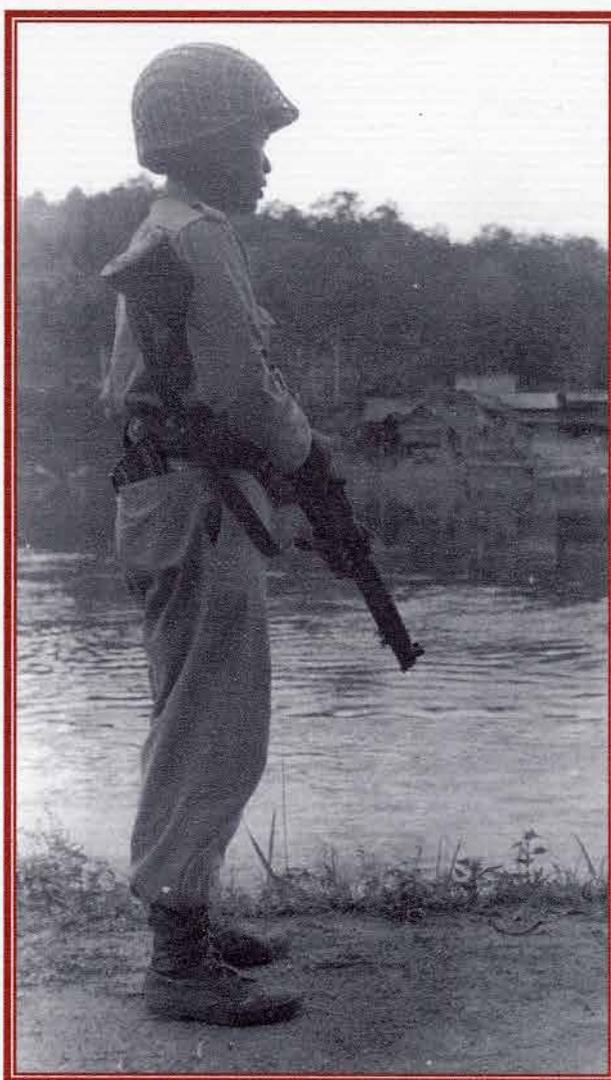
7 48-35

Pemeriksa

Belanda masuk terus memblokir dan menangkap kapal-kapal nelayan di perairan wilayah RI di Kuala Siak. Bahkan pada Januari 1948, tampak kapal P/7 milik Belanda datang dari Ketamputih menuju perairan itu.

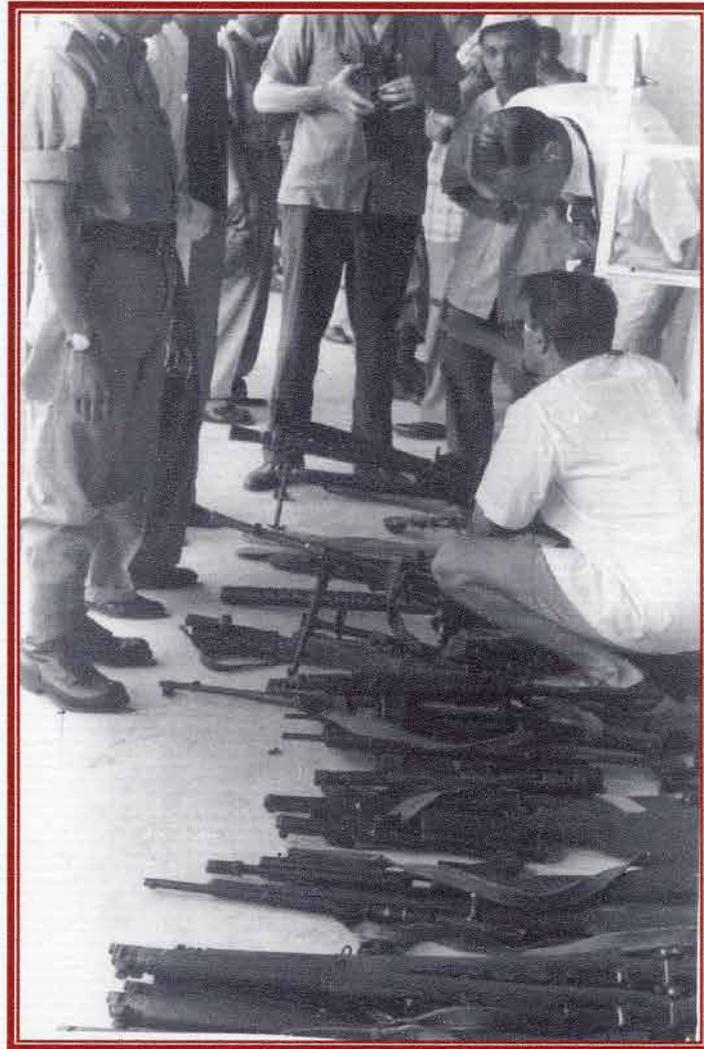
(Sumber : ANRI, Kepolisian Negera no. 573)

PENUMPASAN PRRI



Penjagaan daerah garis depan yang berseberangan dengan daerah yang dikuasai oleh PRRI. Tampak seorang prajurit dari kesatuan Brawijaya (Jawa Timur) sedang berjaga di Rantau Berangi, 1958.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580330 CC 6)



Pengumpulan senjata berbagai jenis yang berhasil dirampas dari tangan PRRI oleh Angkatan Perang RI, 1958.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K58025 CC 7-3)



**Angkatan Perang RI berhasil merebut bazoka dari
tangan PRRI di wilayah Rumbai, 1958.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580325 CC 10-10)



Kekejaman PRRI tidak terkirakan, tampak rumah-rumah yang dibakar untuk mengacaukan keamanan, 1958.

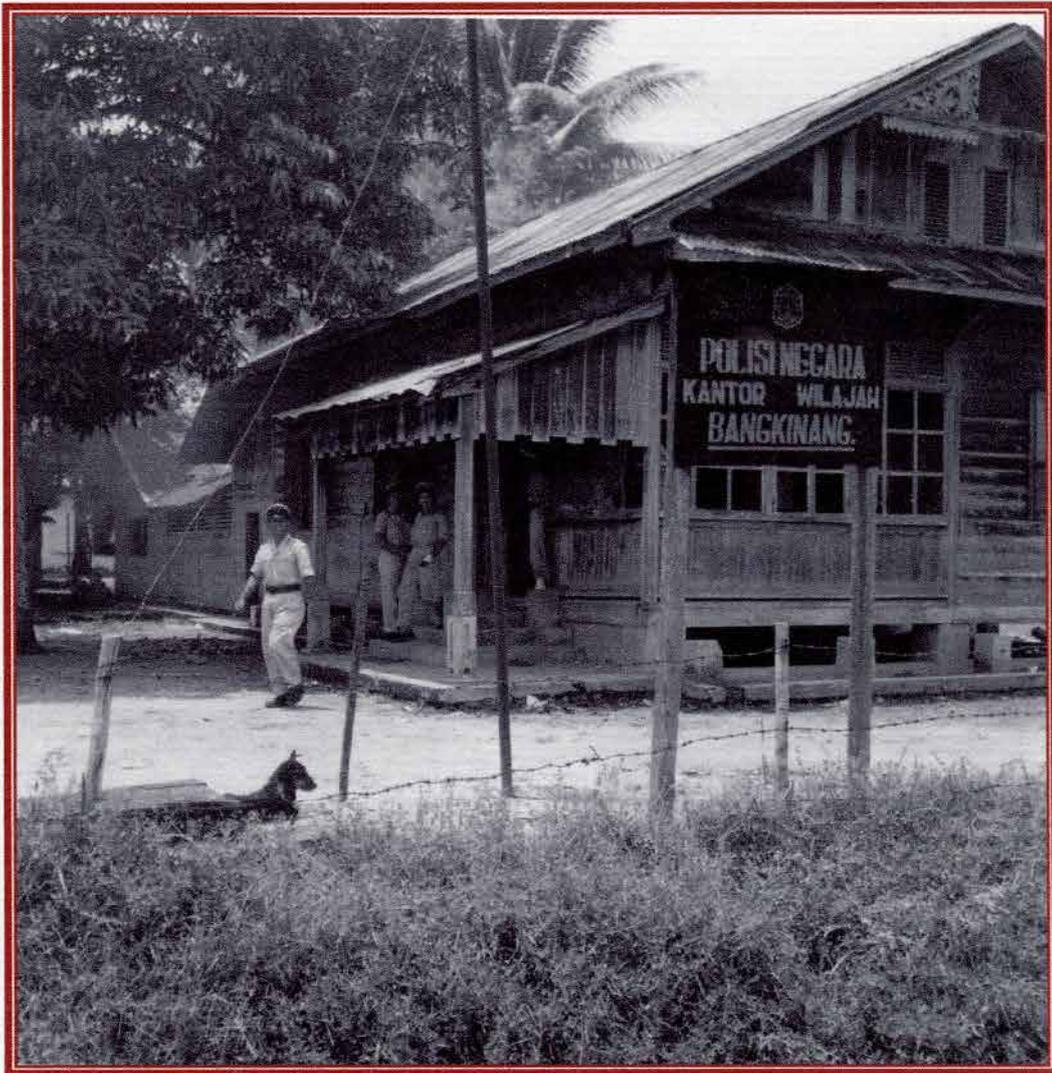
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580409 CC 25)



**Suasana Pekan Baru kembali normal setelah
Angkatan Perang RI merebut kembali wilayah itu
dari genggaman kaum separatis PRRI, 1958**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580315 CC 3)

BANGUNAN



**Bangunan kantor wilayah Polisi Negara di Bangkinang,
1958.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580331 CC 1-1)

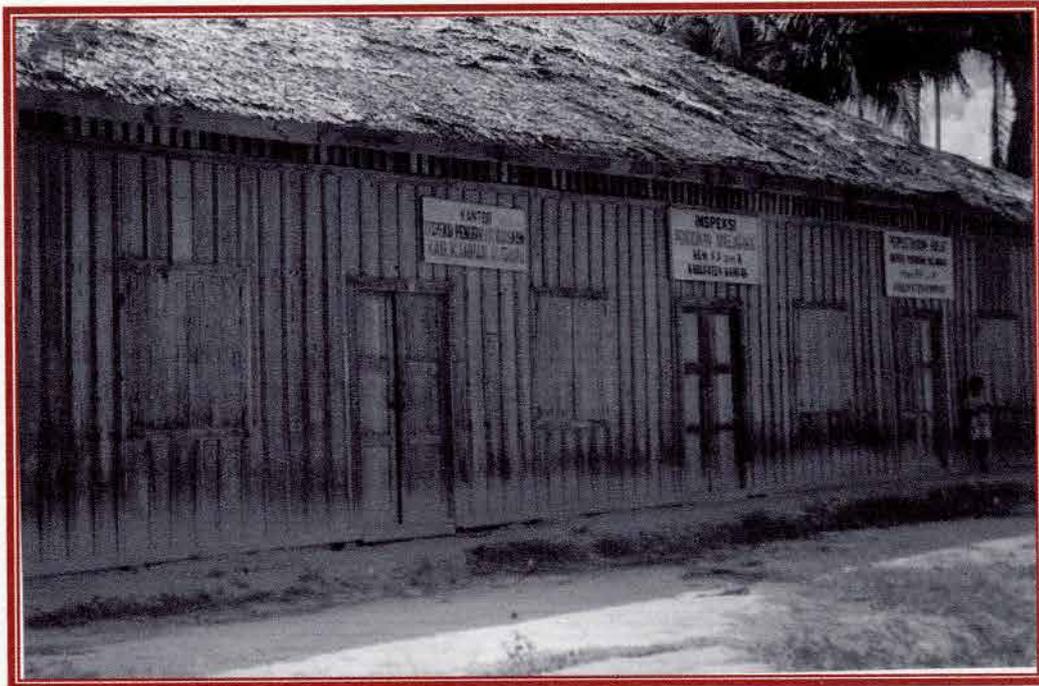


**Bangunan kantor Deli Maskapai di Medan tahun 1891,
perusahaan tembakau yang sangat terkenal.**

(ANRI : KIT, Sumatera Utara 240/74)



**Gedung Rumah Sakit Negeri di Tembilahan, 1953.
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K530414 DD 3-4)**



Bangunan perpustakaan rakyat di Kampar, 1958.

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580318 CC 1)



**Rumah panggung untuk kantor Partai Parindra cabang
Tembilahan, 1958.**

(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580414 DD 3-6)



**Bangunan rumah penjara di Tembilahan, 1958.
(ANRI : Kempen Sumatera Utara K580414 DD 3-7)**

KEADAAN SOSIAL MASA KERAJAAN

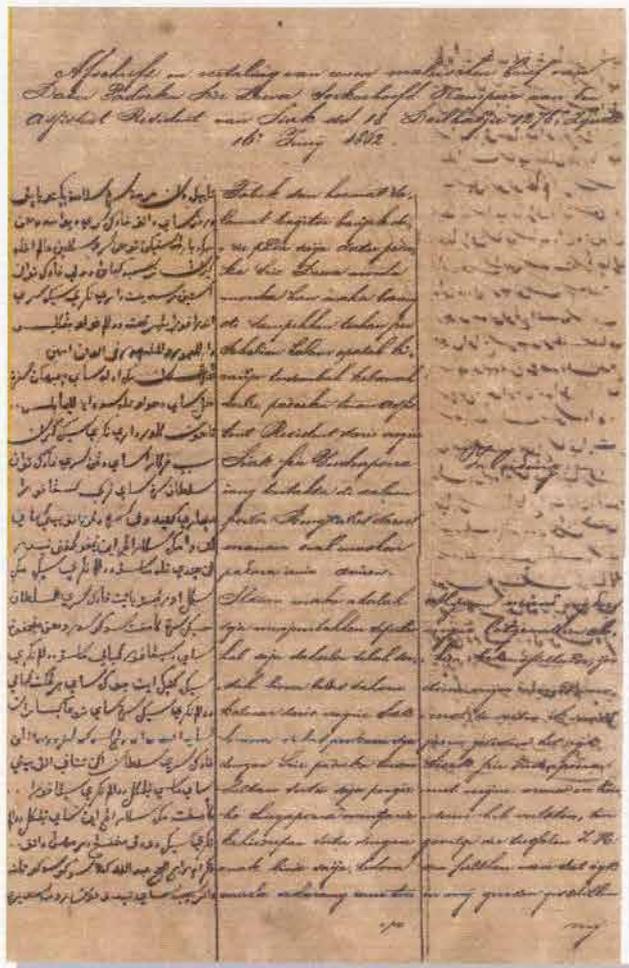
خط الكف والوفاء
 من دار

الحمد لله الذي بلغ المقصود وتحصل المراد في قضى الحاجب
 ورفع الدرجات ورفع من السياء اذ عجب الدعوة والصلوة
 والسلام على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين والاعلم انك قد
 والمهاجرين والاشخاص مسمي سلام مرت تعظيمه وان تكريم
 ياتي يغير نام نكلوا او يغير ميا يغير اذ عيانته سطر في اني في تفكير
 داسر بلغ مني يغير دقله اوله توهن امانه وان عملت غاريب دان مسك
 شعيرة ان تباد ان فتبادر قد كل علم باله وشهدان هيب بري معلوم
 كقد درجة يغير ملياد ان فكلت في اعلى وان فضل ياتي يغير نام ثوان
 فتالي يغير مشهور لك معجور سطر في اني يغير دعد قد الم تفكير يغير
 فارت حل احوال نكلوا او يغير ميا يغير هار في كتوان هيب هاري دان ماله
 فاكيد ان يغير هتدق بر صفة دشن ثوان هيب تمت **سلام**
 دان يغير ترمولة فد هاري خمس دو فوله دو هاري بولون ربع الاوال
 هجره ص النعليه وسلم **عادل**

دان يغير باوا سعة اني نكلو لبي ليماث وكيل يغير مطلق
 دان ذلك فصل اورغ لاري نكلو اورغ ميا ساتا اورغ كسله دانق
 دلم ناغن نكلو لبي ليماث يغير دوا اورغ لك شاد دانق ساتا اورغ نكلو
 و جعل يغير سقرغ لك نغم بيجاسرا والله اعلم
 دان لك هابس بليجا هار كالا في سربل

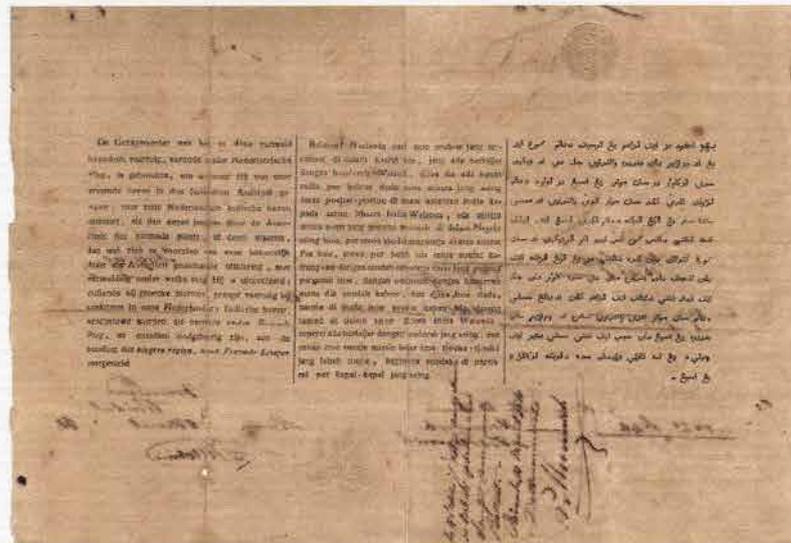
**Surat Tengku Ujung Rimba yang tinggal di Pasai Darat
 Belang ini mengakui setia kepada Belanda, 1867.**

(Sumber : ANRI, Riau 128/d)



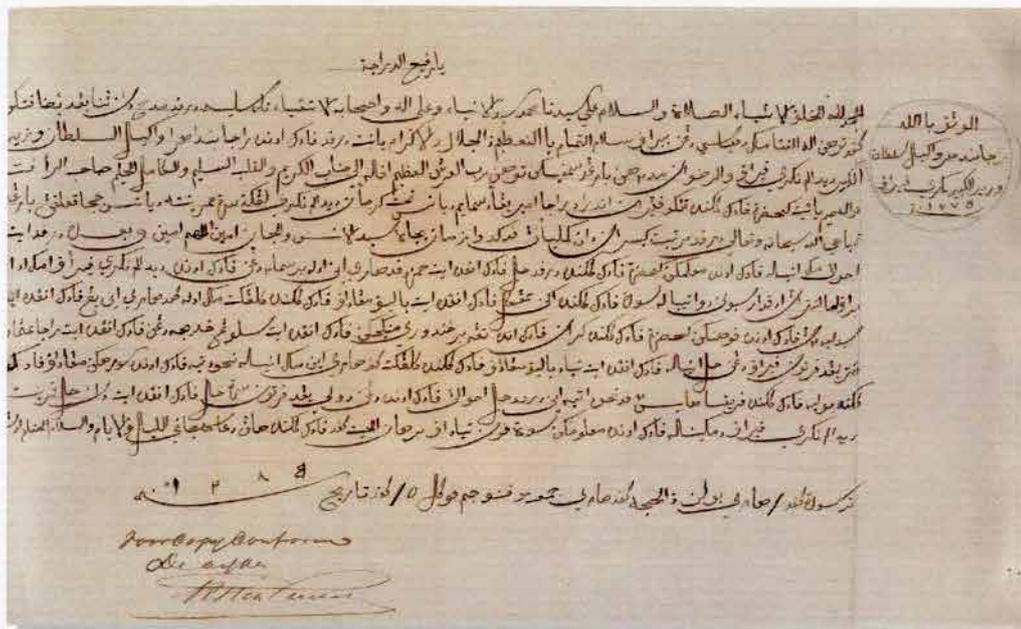
**Surat dari Paduka Sri Dewa, Kepala Suku Kampar
kepada Residen Riau, 20 Juni 1862, tentang
kepergiannya ke Singapura untuk mencari kehidupan
karena pertikaianya dengan Sultan Siak 20 Juni 1862.**

(Sumber : ANRI, Riau 166/b)



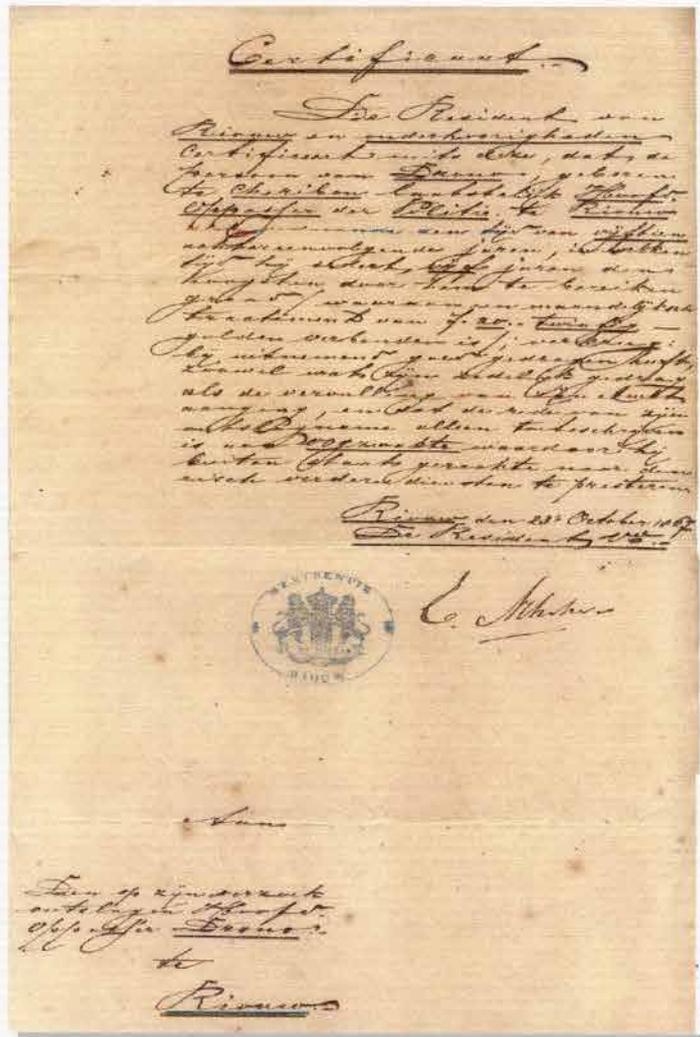
Surat pas jalan yang diberikan oleh Gubernur Jenderal kepada Majiang untuk melakukan perjalanan dengan perahu yang membawa 8 orang dan senjata api, 4 Maret 1861.

(Sumber : ANRI, Riau 166/e)



Surat ijin keberangkatan kapal uap ke Siak, 1869.

(Sumber : ANRI, Riau 198)



Surat dari orang Jawa bernama Drona yang minta pekerjaan sebagai Kepala Opas Polisi di Riau disertai sertifikat, 8 Desember 1868.

(Sumber : ANRI, Riau 194/b)

Circulaire
A. Curieu
no 23/458

Afgeschikt
 Batavia 31 Oktober 1862

Het is van een algemeen
 bekendheid dat het gebruik van
 als op de bestuurszittingen die
 nog veel meer kost en ook in
 het best te stellen van het gebruik
 de bestuurszitting.

Algemeen moet men het
 gebruik van inwendige kwaliteit
 en in den regel moet men altijd
 met houtwerken, die eerst voor en
 lange zijn aangekocht geworden
 hetgeen ten gevolge heeft dat aan
 anders goed uitgevoerde binnen
 een rich soortjes al van andere
 gebreken ontstaan, vooral ook
 sprekende uit het aantrekken
 of doeken van het hout, al wil
 dat men van een onduurzaam
 materiaal heeft moeten gebruik
 maken.

Het is nu een reden dat
 al bepaaldelijk bij bouwen, de
 van een goet aan steen- of ijzer
 constructie van de inwendige
 verzak, die, maar in het kan, bij
 het gemak of beendelen van
 ten bereik te stellen.

Aan
 den Chef der B. Waterstaatsafdeling
 te Amboina

**Surat edaran dari Direktur BOW tentang pemakaian
 kayu yang berkualitas bagus untuk bangunan rumah,
 7 April 1862.**

(Sumber : ANRI, Riau 166/f)

Cher Monsieur le Ministre

Appréhendant que les deux lettres
portant le même objet
de votre Excellence de la date
du 20 Octobre 1865 n'ont été
pas lues par vous, j'ai l'honneur
de vous en adresser une copie
par ce courrier.

Je suis, Monsieur le Ministre,
avec toute déférence,
Vos très-humbles et très-obligeants
serviteurs,
Le Directeur de l'Administration
de la Santé Publique,
M. J. B. S. S.

Cher Monsieur le Ministre

Je suis l'honneur de vous adresser
par ce courrier une copie
de votre Excellence de la date
du 20 Octobre 1865 n'ont été
pas lues par vous, j'ai l'honneur
de vous en adresser une copie
par ce courrier.

Je suis, Monsieur le Ministre,
avec toute déférence,
Vos très-humbles et très-obligeants
serviteurs,
Le Directeur de l'Administration
de la Santé Publique,
M. J. B. S. S.

Laporan dari dinas kesehatan rakyat Riau tentang penyakit yang melanda di Riau seperti Sipilis, prostitusi, dll, 10 Oktober 1865.

(Sumber : ANRI, Riau 118)

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN

- **ARSIP TEKSTUAL**
- **ARSIP PETA**
- **ARSIP FOTO**

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN ARSIP TEKSTUAL

- **PERIODE SEBELUM
KEMERDEKAAN**
- **PERIODE SESUDAH
PROKLAMASI**

**DAFTAR ARSIP TEKSTUAL
YANG DISERAHKAN
PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN**

- 31.** Laporan perjalanan dari Meka melalui Singapura ke Riau atas nama orang-orang Sumenep yang tinggal di Riau, 13 Oktober 1853.
1 lembar
- 44/3.** Bantuan dana untuk sekolah di Riouw, 1865.
1 lembar
- 50/2.** Daftar pajak opium, 1868.
7 lembar
- 57/7.** Proses verbal mengenai kejadian di atas Wankang Koan Hin yang mengakibatkan penumpang luka-luka, 24 Juli 1854.
24 lembar
- 57/8.** Gambaran tentang penduduk pribumi di Riouw, 1845.
20 lembar
- 58/2.** Peta kerajaan Siak Sri Inderapoera, 1860.
1 lembar

65. Kort verslag tentang pengaduan dari Pa Snam antara lain tentang kapal Celebes yang tiba dan kemudian berangkat ke Singapura, 2 Juli 1853.
10 lembar
- 68/6. Kontrak dengan Indragiri, 27 Oktober 1664.
10 lembar
- 68/9. Surat Raja Ali Haji mengenai meninggalnya Raja Willem II, 1849.
2 lembar
- 70/1. Laporan dari van Braam mengenai ekspedisi ke Riouw, Desember 1784.
31 lembar
- 70/2. Surat dari Pieter Gerradus de Brijn (Gouverneur Directeur Dezen Stad) tentang Pulau Bintang, 29 Oktober 1783.
39 lembar
- 70/3. Ordonansi dari Kapten Komandan Militer di Riouw , Jacob Christiaan Vetter tentang ampium, 31 Maret 1787.
3 Lembar
71. Keadaan pelabuhan Riouw, Benteng Baru Riouw, 1792.
12 lembar
- 71/5. Kronik Singapura, sejarah awal mula hubungan keluarga kerajaan Pahang, Singapura, Linga Riau, 1827.
18 lembar

- 71/6.** Sejarah ringkas kerajaan Lingga, ditulis oleh A.L. Weddik, 1846.
Terlampir daftar Sultan-Sultan Palembang, Singapura, Malaka,
Johor, Bintan, Riau, Lingga sejak 1160 – 1841.
60 lembar
- 73/9.** Peta batas Residentie Riouw, tt.
1 lembar
- 75.** Ringkasan pulau Bintang dan batasnya, 1849.
9 lembar
- 96.** Jumlah penduduk di Tanjung Pinang Riouw berdasarkan ras
(Maleijers, Chinezen, Javanen, Kust van Koromandel), Mei 1855.
2 lembar
- 97/b.** Surat Tuanku Panglima Besar Siak kepada Jang Die Pertoean
Riouw tentang penyatuan Riouw dan Lingga, 1 Desember 1856.
4 lembar
- 97/a.** Permohonan biaya pembangunan gedung lelang di teluk Tanjung
Pinang beserta gambar dan rincian biaya, 1856.
6 lembar
- 98.** Perkara orang Galang yang bernama si Antah yang merompak dan
dihukum buang keluar Lingga, Januari 1856.
15 lembar

- 111.** Laporan dari Residentie Riouw tentang bahan-bahan dan biaya pemeliharaan kantor pelabuhan, 1863.
8 lembar
- 112.** Surat mengenai pasal kontrak pengangkatan Tengku Sulung Negara menjadi Sultan Siak Sri Indrapura.
2 lembar
- 113b.** Daftar tanah dan pulau-pulau di wilayah kerajaan Lingga dan Riouw, 1862.
7 lembar
- 113a.** Daftar nama pejabat di Siak dan Riouw, 1862.
12 lembar
- 116.** Sketsa daerah pemerintahan di Laboean Batoe, 1865.
9 lembar
- 118.** Laporan dari Dinas Kesehatan Rakyat di Riouw tentang penyakit yang ada di Riouw antara lain spilis, lepra,
10 Oktober
1865.
19 lembar
- 123.** Ekspor jenis rempah-rempah Siak, 31 Desember 1866.
1 lembar
- 125.** Kasus pembunuhan orang Selangor oleh Raja Abdoellah Klang, 1867.
3 lembar

- 128d.** Surat dari Tongkoe Oedjoeng Rimba yang tinggal di Pasei Darat Belang ini mengakui setia pada pemerintahan Hindia Belanda,tt.
- 5 lembar
- 128/b.** Catatan pertanggungjawaban keuangan yang diterima oleh kas negara Riouw bulan Juni, 1867.
- 16 lembar
- 128/c.** Daftar pertanggungjawaban Departemen Pekerjaan Umum (BOW) tentang keuangan di Bengkalis, 1867.
- 4 lembar
- 128/a.** Pemasangan kabel telegram dan rincian biayanya di daerah Pantai Selatan Pulau Bintang sampai Djoker Wal, 18 Desember 1877.
- 17 lembar
- 141.** Residentie Riouw en Onderkoningheden: nama pegawai dan pejabat,1857-1870.
- 20 lembar
- 162.** Platte Grond Asisten Residen di Mangkalis, 17 Maret 1859.
- 5 lembar
- 164.** Batas-batas daerah sungai, Departemen Militer di Siak, 1 Januari 1861.
- 5 lembar
- 165/a.** Daftar tahanan di Siak selama 1859-1861, 1862.
- 13 lembar

- 165/b.** Keadaan penduduk di Siak, 1862.
5 lembar
- 166/e.** Sertifikat surat jalan yang diberikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Maijang untuk melakukan perjalanan dengan perahu yang membawa delapan orang dan senjata api, 14 Maret 1861.
3 lembar
- 166/b.** Surat dari Paduka Sri Dewa, Kepala Suku Kamper kepada Residen Riau tentang kepergiannya ke Singapura untuk mencari kehidupan karena pertikaiannya dengan Sultan Siak, 20 Juni 1862.
5 lembar
- 166/c.** Surat dari Kapten Komandan Militer kepada Residen Riau tentang bangunan yang dilarang dibangun di sekitar benteng Kroonprins, 2 Mei 1862.
3 lembar
- 166/f.** Surat Edaran dari Direktur Pekerjaan Umum BOW tentang pemakaian kayu yang berkualitas baik, 7 April 1862.
3 lembar
- 166/a.** Perjanjian persahabatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Aceh, 30 Maret 1857.
10 lembar

166/g. Surat kepada Toengko Said di Penyengat dari Gubernur Sekretaris tentang perintah Gubernur Jendral Hindia Belanda agar Tongkoe Said merubah kelakuannya yang suka berbohong.

10 lembar

166/d. Surat dari Asisten Residen Siak kepada Toengko Hoessin Banta Moeda di Langkat tentang perkawinan Toengko Hoessin dengan wanita Langkat dan permohonan menjalin persahabatan, 6 Mei 1862.

12 lembar

176. Perjanjian antara Sultan Gagar Alam kerajaan Panci dengan Tengku Sultan Beder Alam Negeri Bila, 2 April 1864.

5 lembar

194/b. Surat dari orang Jawa bernama Drona yang minta pekerjaan sebagai kepala opas polisi di Riouw disertai sertifikat, 8 Desember 1868.

2 lembar

194/d. Surat kepada Residen Riouw dari Asisten Residen Riouw tentang permohonan salinan Dag Register dari pegawai di Deli dan masalah tentang Raja Burhanudin yang bertikai dengan Pangeran Siak, 16 November 1868.

6 lembar

- 194/a.** Catatan dan proses verbal tentang pertanggungjawaban keuangan yang diterima oleh kas negara di Riouw, 1867.
17 lembar
- 194/c.** Daftar Administrasi Pertanggungjawaban keuangan kantor lelang di Siak, 16 Desember 1868.
14 lembar
- 197.** Hukuman Raja Linga Riouw kepada Samsuedin karena melukai orang Cina dan mencuri uangnya, dibuang di Menado sebagai orang Rantean, 29 Juni 1869.
3 lembar
- 198.** Keberangkatan kapal uap ke Siak, 4 Oktober 1869.
9 lembar
- 210/a.** Inventaris barang-barang milik Teuku Besar ibu dari Sultan Linga, 1857.
14 lembar
- 210/b.** Daftar wajib pajak opium dan arak di Riau beserta besarnya pajak yang harus dibayar, 1855-1856.
4 lembar
- 210/c.** Permohonan ampun dari Tan Ti Kia kepada pemerintah untuk kakaknya Tan Tiong Hao yang telah berbuat tidak baik sehingga memalukan untuk dibolehkan kembali ke Riau dari pengasingannya.
5 lembar

- 210/d.** Skets sungai Air Silau yang ada di kerajaan Riau, mulai dari muara ke hulu, dari Tanjung Balai ke Sintang, 1866.
1 lembar
- 210/e.** Berbagai kasus kejahatan yang timbul di tengah masyarakat dan di vonis menjadi orang buangan ke negeri Riau, 1817-1873.
26 lembar
- 212/a.** Proses pengadilan atas pembunuhan juragan Meppa oleh si Mena, 1867.
19 lembar
- 212/b.** Surat Yang Dipertuan Besar Kota Pinang kepada Asisten Residen Siak.
4 lembar
- 212/c.** Pengaduan Endut terhadap Laksamana atas pembunuhan kakaknya The Tak. Surat Tengku Sulung dari Asahan kepada Raja Kecil Muda di Panci tentang peristiwa di Kuala Kavalok.
10 lembar
- 215/3.** Batas daerah-daerah di Kerajaan Riau yang harus membayar pajak pendapatan seperti lada hitam/putih, tontonan rakyat, candu, babi, arak, ciu, dll, 1861.
9 lembar

- 215/7.** Daftar nama-nama raja Indragiri beserta silsilahnya, 1869.
9 lembar
- 216/4.** Penggantian Raja Ismael setelah dia meninggal digantikan oleh putranya yang bernama Raja Mohamad Haji, dengan tulisan Arab.
14 lembar
- 216/5.** Laporan Administrasi di Residensi Riouw *afdeeling* Siak, 1867.
27 lembar
- 217/1.** Surat dari Rengat tentang pembunuhan Rimba Dalam yang dibunuh oleh raja Begap, dengan tulisan Arab, 18 Djoelkaidah Samah 1305.
2 lembar
- 217/2.** Peraturan ordonansi dalam bahasa Melayu, 22 Juni 1872.
12 lembar
- 217/3.** Surat dari Sultan Hoesin Indragiri kepada Raja Muda Indragiri tentang persahabatan antara kedua raja tersebut.
2 lembar
- 217/4.** Sejarah mengenai asal-usul kerajaan Indragiri, 1843.
36 lembar
- 217/5.** Surat dari Mahkamah Negeri Riouw tentang perkataan Sultan Radja Indragiri yang menyatakan bahwa ia tidak menerima

perkataan Sultan Riouw Lingga yang telah memojokkan Pak Apion karena melanggar batas kerajaan Indragiri.

8 lembar

217/6. Surat dari rakyat kepada Residen Riouw tentang besarnya pajak cukai yang harus dibayar karena telah melanggar batas kerajaan Indragiri, 26 Sjabansanah 1305 H.

2 lembar

217/7. Surat dari Sultan Muda kepada Residen Riau tentang penetapan hukuman terhadap seorang Melayu bernama Soedin karena telah merampas perahu yang berasal dari Kwantan menuju Rengat, 1 Sjaban 1305 H.

5 lembar

217/8. Surat dari Soeltan Indragiri menjatuhkan vonis terhadap Sultan Soedin yang telah dihukum 10 tahun karena telah merampas perahu, dengan bahasa Arab.

4 lembar

217/9. Surat pernyataan Raja Husin untuk setia kepada pemerintahan Hindia Belanda , dengan bahasa Arab Melayu, 16 September 1877.

12 lembar

217/10. Akte perjanjian dari Raja Aissa, Sultan Indragiri dengan pemerintahan Hindia Belanda, 8 Agustus 1885.

9 lembar

- 224/4. Garis perbatasan antara Langkat, Deli, Serdang dibuat tahun 1872.

5 lembar

ARSIP SURAT RAJA-RAJA RIOUW

4. Surat dari Paduka Yang Dipertuan Muda Raja Ali kepada Paduka yang Dipertuan Besar Minister van Staad, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia tentang berita duka cita atas kematian Raja Willem II di negeri Belanda.
- 4/17. Surat dari Sultan Langkat Riau Muhammad Muzafar Syah bin Sultan Muhamad Syah kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochusen di Batavia mengenai ucapan duka cita atas meninggalnya Raja Willem II dan selamat atas pengangkatan Raja Willem III, 6 Syaban 1264 H.
17. Surat dari Kerajaan Riouw (Pulau Penyengat) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengenai permohonan pengembalian negeri kerajaan Johor kepada Sultan Abdul Rahman Syah yang dikuasai oleh penguasa Malaka Timmerman Theijssz, 7 Rajab 1238.
41. Surat dari Raja Jafar di Riau kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai pembelian perahu, 7 Rajab 1238 H.

42. Surat dari Raja Jafar di Riau kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai permohonan agar Sultan Abdulrahman diberi izin ke Riau, 22 Desember 1823.
43. Surat dari Raja Abdulrahman Syah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai kapal perang, 22 Desember 1823.

ALGEMEENE SECRETARIE

1. Kontrak antara pemerintah Belanda (Willem Jan Marie Michielsen) di Sumatera Timur dengan Yang Dipertuan Besar Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifudin Sultan Siak Sri Indrapura, 1893.
(Besluit 27 April 1893 No.1).

30 lembar
2. Daftar nama orang-orang yang menjadi pejabat Kraton Siak Sri Indrapura dan digaji oleh pemerintah Belanda sesuai kontrak, 1890.
(GB.BT 15 Januari 1892 No.18 A)

2 lembar
3. Kontrak Yang Dipertuan Besar Syarif Hasim Abdul Jalil Syaiffudin, Sultan Siak Sri Indrapura dengan pemerintahan Hindia Belanda, 1890.
(GB.BT 15 Januari 1892 no. 18B)

17 lembar

4. Usul untuk memberikan pinjaman uang sebesar f.1869.04 kepada Residen Oostkust van Sumatera untuk memperbaiki instalasi gedung, 12 April 1897.
(BT 12 April 1891 no.12)

3 lembar
5. Perjanjian mengenai pertambangan yang ada di Siak antara Residen Oostkust van Sumatera dengan Sultan Siak tanggal 18 Mei 1895. (BT.16 Nop 1895 No.15)

19 lembar
6. Peminjaman uang Sultan Siak Sri Indrapoera sebesar f.10.000 untuk kesejahteraan, 25 Februari 1891.
(BT 25 Feb 1891 No.34)

6 lembar
7. Permohonan Tengku Bagus tanggal 21 September 1890 tentang penyerangan terhadap Tengku Ngah dan Datu.
(AG. 20 Januari 1891 no.1245)

12 lembar

BUITENLAND

- 10/4. Peraturan no.XI tahun 1823 untuk kapal-kapal dari luar negeri yang akan bongkar muat di pelabuhan Singapura, 1823.

3 lembar
- 10/6. Laporan perjalanan dinas dari Riau ke Singapura oleh Residen Riau, 1850.

26 lembar

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN

ARSIP PETA RIAU

I. DE HAAN

1. L.30. Sket Selat Riau dibuat 1820
96 x 67 cm.
2. D.40. Sket sub bagian sungai Indragiri.
49 x 31 cm.
3. N.19. Sket sub bagian sungai Indragiri dari Rengat sampai laut.
123 x 50

II. PETA INDONESIA

4. Riau 1318/Blad 13/68
Peta kepulauan yang ada di wilayah Riau seperti Karimun Besar, Batam, Bintan, Bulan, Kendur, Sugi, Belat, Lingga, dll, dibuat 1922, 1:250.000.
5. Riau 1434/Blad I/80 Riau darat dan kepulauan seperti Batam, Bintang, Lingga, Singkep, dll. 1 : 750.000.
6. Riau 1435/Blad II/80. Kepulauan Anambah, Natuna, Natuna Selatan, Tambilahan, dll. 1 : 750.000
7. Riau (kepulauan) 1403/Blad VI/70.Peta wilayah kepulauan Riau meliputi antara lain Riau, Karimun, Singkep, Sebelah Utara dibatasi Selat Phillip dan Singapura, barat oleh laut Cina Selatan,

bagian Selatan dibatasi oleh Selat Berhala (Staatblad 1912 no. 600) 1 : 750.000.

8. Riau en Onder-Hoorigheden 2256/Blad I/ 119. Peta wilayah Riau darat dan Kepulauan, sebelah selatan berbatasan dengan keresidenan Jambi dan sebagian Sumatera Timur, dibuat 1922. 1 : 750.000.
9. Riau en Onder-Hoorigheden 2257/Blad II/119. Peta kepulauan yang ada di bawah keresidenan Riau seperti Anambah, Natuna Utara, Natuna, Natuna Selatan, Tambelan, dll. 1 : 750.000.
10. Indrapuri 1460/sheet 39/69
Dibuat 1943 , 1 : 50.000
11. Indragiri 1367/sheet 39/69. Peta wilayah Tambilahan, sebelah barat dibatasi laut Cina, sebelah selatan tampak garis batas wilayah dengan keresidenan Jambi dengan selat berhalanya, dibuat 1943.
1 : 250.000.
12. Siak Sri Indrapura 1315/Blad 9/68
Peta wilayah (sebagian) Siak Sri Indrapura dengan pulau Rupat, sebelah utara dibatasi selat Malaka, 1912 (staatblad 1912 no.600).
1 : 250.000.

13. Siak Sri Indrapura 1317/Blad 12/68.
Sebagian Wilayah Siak Sri Indrapura tampak ibukota Pakanbaru, di sebelah timur tampak selat Brouwer, selat Panjang dan selat Malaka, dibuat 1912 (Staatblad 1912 no.600)

14. Siak Sri Indrapura 1359/Sheet 31/69
Sebagian wilayah Siak Sri Indrapura tampak selat Panjang dan sungai Kampar, dibuat 1943.
1 : 250.000.

III. DITTOPAD TNI AD

15. Pakanbaru No.24 Dittopad sheet 30
16. Indrapuri No.57 Dittopad Sheet IV/D
17. Bagan Siapi-api No.123 Dittopad Sheet 17
18. Bengkalis No.123 Dittopad Sheet 24
19. Pekan Baru 123 Dittopad Sheet 30
20. Siak Sri Indrapura 123 Dittopad Sheet 31
21. Rengat 123 Dittopad Sheet 38
22. Pakanbaru 129 Dittopad Sheet NA 47/SE (865)

DAFTAR ARSIP TEKSTUAL YANG DISERAHKAN PERIODE SESUDAH PROKLAMASI

PDRI

36. Ketua PDRI kepada Gubernur Militer Riau: Surat tanggal 24 Mei 1949 tentang permintaan daftar tempat-tempat yang diduduki Belanda.

1 lembar

56. Pengaduan cukai di Riau - Sumatera. 1 lembar

Resolusi Kongres Ke-II Lembaga Kebudayaan Melayu tanggal 8 Pebruari 1956 tentang desakan kepada Pemerintah supaya keputusan kongres kebudayaan Indonesia tahun 1954 di Medan dan di Solo tahun 1955 segera dilaksanakan.

2 lembar

57. PDRI: Radiogram tanggal 30 Mei 1949 tentang barang penting supaya penjualan/penukaran dihentikan dan Teuku A. Hamid Anwar mengundurkan keberangkatannya berhubungan dengan PDRI.

1 lembar

59. Gubernur Militer RM Utoyo kepada PDRI: Telegram tanggal 3 Juni 1949 tentang permohonan bantuan beras untuk dikirim ke Riau.
1 lembar
60. Bagian Agama PDRI kepada Gubernur Militer Riau RM Utoyo: Telegram tanggal 18 Juni 1949 tentang penetapan hari puasa.
2 lembar
61. Gubernur militer RM Oetoyo kepada PDRI Menteri kehakiman Lukman Hakim: Telegram tanggal 22 Mei 1949 tentang pengangkatan kehakiman untuk Riau Utara dan Riau Selatan.
1 lembar
134. Gubernur Militer Riau St. Rasjid kepada PDRI: Telegram tanggal 2 Juni 1949 tentang perekonomian di Riau tidak berjalan lagi dikarenakan pimpinan Riau meninggalkan daerah Riau.
1 lembar
75. Gubernur Militer Riau kepada PDRI (Kementerian Agama): Telegram tanggal 8 Juni 1949 tentang ketetapan puasa.
1 lembar
176. Gubernur Militer Riau kepada PDRI: Telegram tanggal 21 Juni 1949 tentang Kapten Pandjaitan telah berada di Riau.
1 lembar

234. Gubernur Militer RM Oetoyo kepada PDRI: Telegram tanggal 25 Juni 1949 tentang Belanda masuk ke P. Kijang.

1 lembar

252. Dr. A.K. Gani kepada PDRI: Telegram tanggal 1 Juli 1949 tentang Belanda mengadakan pemilihan di Kota Tebing Tinggi dengan hasil sebagian besar penduduk memilih Republik daripada Federal.

1 lembar

258. PTTD kepada Gubernur Militer: Radiogram tanggal 22 Juni 1949 tentang Belanda menolak RI, gerilyawan dianggap pengacau.

1 lembar

SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

14. Panitia Pusat Peringatan Lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Catatan tanggal 17 Nopember 1969 tentang lahirnya, tugas dan perjuangan pemerintah darurat RI.

9 lembar

KEMENTERIAN PENERANGAN

302. Corps Polisi Militer Sub Komando Tapanuli/Sumatera Timur Selatan: Maklumat tanggal 10 September 1948 yang ditujukan kepada seluruh penduduk Tapanuli/Sumatera Timur Selatan dengan cara melakukan penangkapan pemimpin-pemimpin ketentaraan di seluruh daerah Sumatera Timur Selatan guna mengatasi keamanan di daerah tersebut.

15 lembar

RINALDY SIMAMORA:

Daftar Surat Suara Pemilihan Anggota Konstituante tahun 1954 Daerah
Pemilihan Sumatera Utara

1 lembar

ADAM MALIK

136A. Departemen Penerangan RI: Laporan/ikhtisar Tahun 1980, 1981
tentang Batam sebagai pintu gerbang perdagangan dan daerah
industri.

90 lembar

136A. Dirjen Pariwisata: Ikhtisar Tahun 1980 tentang hasil survei
potensi kepariwisataan Provinsi Riau dan studi pengembangan
wisata Tirta P. Bintan.

12 lembar

136A. Sekretariat Wakil Presiden RI: Ikhtisar tanggal 29 Agustus - 2
September 1981 tentang masalah-masalah pokok yang terungkap
selama kunjungan kerja Wapres RI ke Provinsi Kalimantan Barat
dan Kabupaten Kep. Riau.

15 lembar

136A. Otorita Pengembangan Daerah Industri P. Batam: Penjelasan
ringkas tanggal 1 September 1981 tentang pengembangan
P. Batam yang disajikan untuk kunjungan Wapres ke Batam.

15 lembar

136A. Sekretariat Wapres RI: Bahan kunjungan kerja Wapres RI ke Provinsi Riau tanggal 31 Agustus - 2 September 1981.

11 lembar

220. DPRD Provinsi Dati I Riau No.01/Kpts/DPRD/1983 tanggal 22 Pebruari 1983 tentang penetapan tugas/mission anggota-anggota MPR utusan daerah Riau menghadapi Sidang Umum MPR ditetapkan di Pekan Baru.

4 lembar

M. YAMIN

830. Kementerian Penerangan: Undang Undang Darurat No.21 Tahun 1957 tentang perubahan UU No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah yang ditetapkan tanggal 9 Agustus 1957 dan diundangkan tanggal 10 Agustus 1957.

3 lembar

846. Presiden RI: Keputusan No.143 Tahun 1950 tanggal 4 April 1950 tentang penghapusan daerah Riau sebagai daerah bagian RIS dan menggabungkan daerah Riau kepada RI yang ditetapkan di Jakarta.

3 lembar

SEKKAB

76. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Provinsi Sumatera Tengah.

11 lembar

77. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Sumatera Tengah.
11 lembar
78. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Provinsi Sumatera Tengah.
10 lembar
122. Undang Undang Darurat No.16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU mengenai pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi di Sumatera.
7 lembar
130. Kabinet Presiden RIS No.143 Tahun 1950 tentang penghapusan daerah Riau sebagai daerah bagian RIS dan penggabungan daerah Riau kepada Republik Indonesia.
2 lembar
154. Undang Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
7 lembar
165. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah daerah swatantra Provinsi di Sumatera.
11 lembar

272. Undang Undang No.61 tahun 1958 tentang penetapan UU Darurat No.19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

13 lembar

329. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1957 tentang perubahan peraturan-peraturan Pemerintah mengenai perubahan Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

2 lembar

SETNEG

223. Persatuan Rakyat Silaukahoan dan Bedagri Hulu kepada Presiden RIS: Resolusi tanggal 2 Maret 1950 tentang 250 orang penduduk onderdistrik Silaukahoan dan Distrik Bedagei Hulu untuk menyokong dan memperjuangkan keputusan KMB supaya dasar federasi tetap jadi dasar dan bentuk ketatanegaraan RIS dan mempertahankan UUDS tentang hak negara bagian.

2 lembar

254. Penetapan Presiden No.13 tahun 1948 tanggal 26 April 1948 tentang penetapan kembali tempat kedudukan dan daerah hukum dari beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera (antara lain di Karesidenan Riau ada satu Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Riau yang berkedudukan di Pekan Baru.

1 lembar

419. Undang-Undang Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tengah yang daerahnya meliputi Sumatera Barat, Riau

dan Jambi dengan pemerintah daerahnya berkedudukan di kota Bukittinggi.

5 lembar

578. Presiden RI: Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1948 tentang pemindahan LetKol. D. Jahja sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat di Jawa dan pengangkatan Kol. Ismail Lengah sebagai Kepala Staf Operasi Komando Sumatera, terhitung mulai tanggal 15 Juli 1948.

2 lembar

707. Gubernur Sumatera Utara Mr. Tenkeu Hasan kepada Presiden RI: Surat kawat tanggal 3 Oktober 1945 tentang pengangkatan para Residen dan walikota seluruh Sumatera untuk membantu tugas/diperbantukan pada Gubernur Sumatera dengan ketetapan No.333.

1 lembar

926. Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan tanggal 17 Juli 1947 tentang pembentukan sebuah Panitia yang bertugas melaksanakan penetapan tertanggal 5 Mei 1947 yaitu pembentukan TNI dan mengangkat orang-orang yang menjadi anggota panitia untuk wilayah Sumatera.

2 lembar

KABINET PMRI YOGYA

39. Resolusi-resolusi tahun 1950 dari penduduk kampung seluruh Swapraja Siak tentang pembentukan Swapraja (Daerah Istimewa) Siak.

111 lembar

40. KRI Tiga Mayor Samosir kepada PYM Presiden/Panglima Tertinggi RI: Telegram tanggal 2 Januari 1957 tentang kegentingan suasana di Sumatera Timur oleh bekas "Harimau Liar" (gerombolan bersenjata Tanah Karo/Samalungun). *Ria hal 159*

1 lembar

41. Ikatan Serikat Sekerja Pegawai Pemerintah: Resolusi tanggal 8 Agustus 1950 tentang ISSPP mendukung Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur.

1 lembar

62. Berkas penjelasan negara kesatuan yang berisi tentang catatan singkat rapat delegasi RIS dan delegasi RI tanggal 19 Mei 1950; Pengumuman persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI; keterangan Pemerintah kepada Panitia Permusyawaratan dan ketua serta wakil ketua Panitia Tetap dari DPR tentang perundingan pembentukan negara kesatuan; Utusan RI tentang penggabungan kementerian antara RI dan RIS; Penyesuaian paham antara Pemerintah RI dan RIS.

35 lembar

98. Kepolisian Batanghari: Berkas tanggal 11 Mei 1950 tentang Jambi yang tidak suka masuk Provinsi Sumatera Tengah, disertai lampiran berupa keadaan politik daerah Jambi yang ingin masuk ke Provinsi Sumatera Tengah.

26 lembar

99. Mr. Soesanto Tirtoprodjo kepada PMRI: Laporan dari Panitia III untuk Sumatera Tengah tentang soal otonomi daerah di Sumatera (pendapat yang berasal dari daerah Sumatera Tengah)

28 lembar

100. Berkas tanggal 20 Januari, 13, 19, 27 April 1950 tentang kedudukan komissariat pemerintah di Sumatera dan perbaikan nasib pegawai Republik di Sumatera.

14 lembar

101. Direktur T.M. Hasan kepada PMRI: Surat tanggal 17 Pebruari 1950 tentang Sultan Siak berjanji akan menghadiahkan sebagian permata (harta benda) kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membantu perjuangan RI.

5 lembar

103. Berkas tanggal 1 Agustus 1950 sekitar pandangan mengenai keadaan Tapanuli dan kutipan dari daftar surat-surat keputusan Mendagri RIS.

4 lembar

105. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh: Surat kawat tanggal 25 Juli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga provinsi berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

1 lembar

MARZUKI ARIFIN

123. Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagian Tata Negara Direktorat Pemerintahan Umum: Daftar tahun 1961 tentang pembagian daerah administrasi Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru yang terbagi dalam 4 wilayah yaitu Kampar (Bangkinang), Indragiri (Rengat), Bengkalis dan Kep. Riau (Tanjungpinang)

2 lembar

571. Panitia Pelaksana Coaching Team Indoktrinasi Daswati II Sumatera Selatan, Jambi dan Riau: Kumpulan pidato dari Panglima Peperda Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, Roeslan Abdulgani, A.H. Nasution tanggal 16 Oktober 1961 tentang aparatur negara.

73 lembar

DELEGASI INDONESIA

406. Staf Angkatan Perang urusan Pekerjaan Istimewa Secretariat panitia Keamanan: Notulen tanggal 11 Desember 1948 tentang pembicaraan kedudukan pulau-pulau kecil disekitar Jawa, Sumatera dan Madura yang menyangkut siapakah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduk yang mendiami pulau-pulau tersebut.

2 lembar

581. Kepolisian Karesidenan Sumatera Timur: Telegram tanggal 29 Juli 1948 tentang tindakan anggota Angkatan Laut Belanda terhadap Pelabuhan Leidong/Menoblang Sumatera Timur dengan maksud untuk blokade barang-barang keluar masuk ke pelabuhan tersebut.

2 lembar

J1585. Wakil Ketua Panitia Persiapan Nasional Ida Anak Agung Gde Agung: Surat Edaran tanggal 21 Desember 1949 tentang susunan kabinet pemerintahan Presiden Sukarno yang Perdana Menteri dan menteri-menterinya dilantik pada tanggal 20 Desember 1949.

3 lembar

ALGEMEENE SECRETARIE

151. Berkas insiden di Bagansiapi api (orang Cina yang melarikan diri).
Oktober 1946.

7 lembar

162. Commandan angkatan Serikat: Proclamation (Pemberitahuan Umum Resmi) kepada penduduk yang bebas di Hindia Belanda tahun 1945.

1 lembar

600. Kerajaan Langkat kepada Gouverneur General van Nederlands Indie: Berkas tanggal 25 Agustus 1947, 3 Juni, 6 Juli, 21 Desember 1948, 17 Januari 1949 tentang permohonan Kerajaan Langkat supaya mengadakan satu majelis untuk melaksanakan Kerajaan Langkat dan mengusulkan Sultan Machmoed Abdoel Djalil Rahmatsjah sebagai Raja Langkat.

12 lembar

600. Berkas tanggal 1, 2, 10, 12, 18 Pebruari 1949 tentang status Siak dan yang berkenaan dengan Sultan Siak.
- 9 lembar
778. De Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken (het Hofd van de Afdeling Bestuurs Zakeen) S.L.J van Waardenburg kepada de Hoge Vertegenwoordigen van de koor in Indonesia: Surat tanggal 17 Mei 1949 tentang perekonomian dimasa mendatang dari Bagan Siapi-api.
- 2 lembar
1279. Dataek Hafiz Haberham: Laporan tanggal 22 Pebruari 1947 tentang organisasi-organisasi dari daerah Sumatera Timur yang menolak Pemerintah Negara Republik Indonesia dan yang akan mendirikan satu negara yang lepas dari Republik.
- 10 lembar
1284. Bermacam-macam keputusan dan peraturan dari penguasa militer dan wali negara di Sumatera Timur tahun 1948 - 1949.
- 14 lembar
1285. Berkas permohonan kredit untuk Negara Sumatera Timur, tanggal 25 Pebruari, 21 Agustus 1948.
- 6 lembar
1402. Nefis: Laporan tanggal 1 Oktober 1946 tentang situasi politik di Bagansiapi-api, afdeeling Bengkalis residentie Riouw.
- 3 lembar

KEPOLISIAN NEGARA

573. Kepolisian Riau: Telegram tanggal 5 Pebruari 1948 tentang tindakan pasukan Belanda yang masih terus memblokade dan menangkapi sampan-sampan di Perairan Kualasiak.

3 lembar

KABINET PRESIDEN

1188. Resolusi Kongres Ke-II Lembaga Kebudayaan Melayu tanggal 8 Pebruari 1956 tentang desakan kepada Pemerintah supaya keputusan kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 1954 di Medan dan di Solo Tahun 1955 segera dilaksanakan.

2 lembar

1887. Dewan cabang SOBSI Langkat Hilir/Teluk Hare kepada ketua Pengadilan negeri Tanjung Pura: Surat tanggal 13 Nopember 1953 tentang pernyataan SOBSI atas instruksi Pemerintah Ale Wongso penghentian traktor maut dan pembongkaran rumah kaum tani di Kampung Selemale (Secanggang).

1 lembar

2028. KRI Tiga Mayor Samosir kepada PJM Presiden/Panglima Tertinggi RI: Telegram tanggal 2 Januari 1957 tentang kegentingan suasana di Sumatera Timur, dimana bekas "harimau liar" (gerombolan bersenjata Tanah Karo/Samalungun). *lihat hal 154*

1 lembar

JOGJA DOCUMENTEN

5496. Staf Territorial Komando Sumatera: Laporan bulanan (April 1948)
tentang larangan memperedarkan URIPS R.10,- Siantar
(Wilayah Sumatera Tengah)

40 lembar

**DAFTAR ARSIP YANG
DISERAHKAN**

ARSIP FOTO

KESULTANAN RIAU

Awaluddin Sani Perkasa Alam Syah Sultan Deli.
(ANRI: KIT, Sumut 295/54)

Foto Sultan Deli.
(ANRI: KIT, Sumut 295/62)

Yang Dipertuan Besar Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin – Sultan Siak Sri Indrapura dengan payung kebesaran.
(ANRI: KIT, 295/76)

Yang Dipertuan Besar Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin – Sultan Siak Sri Indrapura dengan pakaian tentara Belanda.
(ANRI: KIT, 330/52)

Yang Dipertuan Besar Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin – Sultan Siak Sri Indrapura berfoto bersama kepala-kepala wilayah Bengkalis 1888.
(ANRI: KIT, 1.196/82)

Tiga Pemuda perkasa dan tampan putra kerajaan Deli Serdang.
(ANRI: KIT, Sumut 295/50)

Figur Putra Mahkota Kesultanan Deli.
(ANRI: KIT, Sumut 1.197/16)

Putra Kedua Sultan Deli
(ANRI: KIT, Sumut 1.197/20)

Lambang kerajaan masa jaya kesultanan Deli
(ANRI: KIT, Sumut 297/32)

Doa untuk Sultan Deli, 1925. Tampak Sultan dengan Permaisuri duduk disinggasana yang dihiasi dengan emas permata istana.
(ANRI: KIT, Sumut 325/16)

Yang Dipertuan Besar Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin – Sultan Siak Sri Indrapura dengan pakaian kebesaran Belanda.
(ANRI: KIT, Sumsel 1.1097/82)

Mempelai duduk bersanding dalam suatu perkawinan keluarga kerajaan di Istana Maimun Sultan Deli di Medan. Tampak mempelai menggunakan pakaian adat Melayu.

(ANRI: KEMPEN, Sumut 378/16)

Tampak Tengku Mahkota Otman Putra Mahkota Raja Deli, Tengku Amrudin dan Tengku Mahkota Raja Anwar Putra Mahkota Serdang.

(ANRI: KIT, Sumut 295/52)

Doa di makam Sultan Deli Mamon Al Rasyid Perkasa Alam Syah. 1925.

(ANRI: KIT, Sumut 818/61)

PENINGGALAN BUDAYA

Istana Sultan Deli di Medan, 1905.

(ANRI: KIT, Sumut 266/16)

Bangunan Istana Sultan Deli, tampak sangat indah.

(ANRI: KIT, Sumut 779/28)

Bangunan Istana Sultan Deli di Medan. Foto ini diambil pada tahun 1925 Sultan telah menetap di sini sejak 1889.

(ANRI: KIT, Sumut 164/42)

Makam Sultan-sultan Siak terletak di belakang Masjid Raya Pekan Baru, 1958.

(ANRI: KEMPEN, K 580317 CC 2)

Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat, 1951.

(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 39)

Pintu gerbang Istana Sultan Riau di Pulau Pnyengat yang tidak terawat lagi, 1951.

(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 31)

Salah satu sudut Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat yang tidak terawat, 1951.

(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 33)

Reruntuhan bekas Istana Penyengat, 1951.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K 510805 EE 38)

Lokomotif peninggalan Jepang di Pulau Baru dalam keadaan tak terawat, 1958.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K580319 CC 1)

Letnan Subianto CPM Cie X sedang memeriksa lokomotif peninggalan Jepang di Pekan Baru, 1958.

(ANRI: KEMPEN, K 580319 CC 2)

SENI BUDAYA

Pakaian adat Melayu yang dikenakan keluarga Bangsawan Siak, 1951.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 510719 CC 63)

Wanita dan putranya berfoto bersama. Suaminya adalah pekerja pada perusahaan timah Singkep.
(ANRI: KIT, 427/44 Sumsel)

Tarian yang dipertunjukkan pada malam kesenian di Tanjung Pinang, 1959.
(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 17)

Dalam suatu perayaan di Gubernuran Tanjung Pinang, disajikan tarian Minang, 1959.
(ANRI: KEMPEN, Sumut 590603 EE 9)

Tarian yang dipertunjukkan pada malam kesenian di Tanjung Pinang, 1959.
(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 10)

Tipe orang laut yang kuat berasal dari daerah Reteh/Mandar Indragiri.
(ANRI: KIT, 439/12 Sumsel)

Pertunjukan pancak silat di Siak, 1951.
(ANRI: KEMPEN, 516729)

Tarian rakyat "MANCAK" di Bangkinang dalam acara tahun baru pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, 399/32 Sumsel)

Pertunjukan Tari Zhapin dalam suatu keramaian di Siak. Tari ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, 1951.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K516726)

Pertunjukan Tari Zhapin di Siak, 1951.
(ANRI: KEMPEN, 516732)

Pakaian adat kaum pria Bangkinang, 1951.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 516664)

Tampak berjajar para pegawai pamong praja, dengan pakaian adat Bangkinang, 1951.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 510719 CC 46)

Penduduk laki-laki dari Bangkinang dengan pakaian adat, 1951.
(ANRI: KEMPEN, 516665)

Para pejabat Kepala Desa di Wilayah Muara Takus dengan pakaian adat.
(ANRI: KIT, 1086/16 Sumsel)

Pesta rakyat diadakan oleh Sultan Deli.
(ANRI: KIT, 915/17 Sumut)

RUMAH IBADAT

Bangunan Masjid Raya Deli milik Sultan Deli.
(ANRI: KIT, Sumut 160/26)

Interior di salah satu ruangan Masjid Raya Deli, pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumut 160/34)

Bangunan Masjid Labuhan Deli tempo dulu.
(ANRI: KIT, Sumut 804/63)

Masjid Raya Pekan Baru, masjid ini cukup tua usianya. Di belakang bangunan ini terdapat makam raja-raja Siak, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 580317 CC 1)

Tampak dari kiri ke kanan Tengku Hafaz Direktur Kabinet Negara Sumatera Timur, Sultan Deli Wali Negara Sumatera Timur, Dr. Tengku Mansur, duduk dengan tenang mendengarkan ceramah di Masjid Raya Medan.
(ANRI: KEMPEN, 90727 AA 2)

Pada pagi hari tampak umat Islam bersama-sama menuju Masjid Raya Medan untuk sembahyang Idul Fitri, 1949. Tampak Wali Negara Sumatera Utara, Sultan Deli serta pejabat pemerintah lainnya menuju Masjid Raya Medan, 1949.
(ANRI: KEMPEN, 90727 AA 1)

Bangunan Kelenteng tempat ibadah bagi orang-orang Cina yang beragama Khong Hu Chu.
(ANRI: KIT, Sumut 791/37)

Gereja Protestan di Bulukawar, Deli Serdang dibangun 1901.
(ANRI: KIT, Sumut 811/57)

Masjid para Sultan Riau, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 20)

Masjid Raya di Medan yang sangat indah, dibangun oleh Sultan Deli, pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumut 163/10)

PERKEBUNAN

Tampak buruh-buruh sedang menyortir daun tembakau kering di dalam pabrik, di perkebunan tembakau Deli Langkat Serdang, 1891.
(ANRI: KIT, Sumut 420/70)

Stasiun pembantu Stabat di Deli Langkat, Serdang tempat hasil perkebunan dikirim ke pelabuhan, 1891.
(ANRI: KIT, Sumut 241/28)

Bangunan rumah sakit untuk buruh perkebunan tembakau Tanjung Morawa, pada perkebunan tembakau Deli Langkat Serdang, 1891.
(ANRI: KIT, Sumut 241/91)

SARANA TRANSPORTASI

Kapal Terbang Catalina berlabuh di Pelabuhan (perairan) Riau, 1951.
(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 4)

Pesawat terbang Slanox di Lapangan Terbang Pekan Baru, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580329 CC 1-1)

Sebuah jembatan yang melintang di Sungai Salak, Riau.
(ANRI: KIT, Sumsel 180/66)

Jembatan yang menghubungkan, Deli Langkat Serdang, tampak kokoh sekali, 1891.
(ANRI: KIT, Sumut 241/30)

Jalan yang dibuat dengan kelebaran 8 m melintas di tengah hutan Tanjung Pinang, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580326 CC 6-7)

Pembuatan jalan raya Dumai – Duri, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580326 CC 6-8)

Salah satu jalan menuju ibukota Tanjung Pinang pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumsel 767/32)

Jalan Raya Duri – Dumai yang belum selesai dibuat di atas rawa-rawa, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580425 CC 3-6)

Jembatan Kapor yang dibuat dengan kuatnya pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumsel 73/22)

Bangunan jembatan Begerpang yang menghubungkan Deli-Serdang, 1928.
(ANRI: KIT, Sumut 110/80)

Acara pembukaan jalan Duri – Dumai tampak seorang pekerja sedang pidato menceritakan pengalaman suka duka turun membuka jalan tersebut, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580705 - 36)

Upacara pengibaran Merah Putih, pembukaan Lapangan Terbang Udara Djapura/Rengat, 1 September 1954, dibangun oleh Stanvoc yang diserahkan kepada pemerintah RI diwakili oleh Menteri Perhubungan Prof. Ir. Roesseno, 1954.
(ANRI: KEMPEN, K 540901 DD 1-4)

Gotong royong membetulkan jalan Rengat – Pekan Heram yang rusak longsor karena banjir, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580705 – 3)

Untuk pertama kali GIA mendarat di Lapangan terbang Pekan Baru, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 580329 CC 3-2)

DARI PEMERINTAHAN RIS MENUJU RI

Saat pelantikan Dewan Federal Bangka, Bliton, Riau, Dr. Van Mook memberi sambutan, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 11)

Para Ketua Dewan Federal Bangka, Bliton dan Riau, tampak Moh. Afan (berkacamata) Ketua Dewan Riau, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 7)

Pelantikan Dewan Federal Bangka, Bliton dan Riau pada masa RIS. Pada 12 Juli 1947 Bangka, Bliton dan Riau dijadikan daerah otonomi. Tampak Dr. Van Mook (Gubernur Jendral) meninjau Masjid Kesultanan Riau ketika mengunjungi Riau pada 5 Juli 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 1)

Suasana resepsi tampak Raja Haji Abdulah sebagai Ketua Jawatan Ketua Kuasa Pengurus Rakyat Riau merangkap anggota dewan, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 2)

Pembukaan Koferensi Federal Sumatera 5 Juli 1948. Tampak utusan dari Bangka, Riau, Biliton, sedang berbincang dengan Gubernur Jenderal Van Mook, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 23)

Malam resepsi setelah pelantikan Dewan Federal. Tampak 2 anggota berpakaian adat Melayu adalah utusan dari Riau yaitu Muchtar Husin, Wakil Ketua Dewan Riau dan Tengku Ahmad, anggota Dewan Riau, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80705 EE 3)

Hadir dalam jamuan petang dalam Konferensi Negara-negara Federal Se-Sumatera, 29 Maret 1949, tampak Wali Negara Sumatera Selatan Abdul Malik, disebelahnya dengan pakaian adat melayu adalah Sultan Deli , 1949.
(ANRI: KEMPEN, 90331 AA 5)

Konferensi Negara-negara Federal Se-Sumatera yang dibuka 29 Maret 1949. Berlangsung selama 6 hari. Hadir tidak kurang 60 wakil serta penasehat negara-negara federal se-Sumatera tampak dari kiri ke kanan utusan Tengku Ahmad dari Riau, Tengku Muhammad dari Indragiri dan E. Abdul Karim dari Bengkalis, 1949.
(ANRI: KEMPEN, 90328 AA 9)

Untuk menanggapi perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949, maka di Medan diadakan lagi Konferensi Negara-Negara Federal Se-Sumatera untuk ke-2 kalinya pada 28 Mei 1949. Tampak utusan dari Riau Muchtar Husein sedang mengajukan pertanyaan, 1949.
(ANRI: KEMPEN, 90528 AA 5)

Dalam konferensi yang sama, tampak Tengku Muhammad utusan Indragiri sedang mengajukan pertanyaan disampingnya tampak pula utusan dari Siak, 1949.
(ANRI: KEMPEN, 90528 AA 9)

Pelantikan Dewan Riau pada masa RIS, Senin 4 Agustus 1947 di Tanjung Pinang. Tampak anggota dewan bergambar di depan gedung Dewan Rakyat.
(ANRI: KEMPEN, 70804 EE 1)

Berfoto bersama anggota DPR Kuantan Hulu di Teluk Kuantan Indragiri setelah selesai sidang, 19 – 20 April 1951.
(ANRI: KEMPEN, Tanpa Nomor)

Konferensi negara-negara federal se-Sumatera bertempat di Medan 29 Maret 1949. Tampak utusan dari Riau juga hadir yaitu Muhammad Afan dan Raja Muhammad, konferensi membahas kepentingan Sumatera dipimpin oleh Belanda .
(ANRI: KIT, Sumut 1.106/84)

Profil Wali Negara Riau masa RIS Muhammad Afan.
(ANRI: KIT, Sumut 1.106/84)

KUNJUNGAN KERJA KE RIAU

Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dan Gubernur Ruslan Mojahardjo tengah bercakap-cakap dengan pelajar putri dalam rapat umum di Ranai Riau, 1954.

(ANRI: KEMPEN, 540420 EE 13)

Persembahan tanda mata dari rakyat kepada Mohammad Hatta di Sedanau, Riau, 1954.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K 540419 EE 1-14)

Wakil Presiden Hatta dan rombongan mengunjungi Sekolah Rakyat di Tarempa, 1953.

(ANRI: KEMPEN, K 530420 EE 52)

Mohammad Hatta dalam kunjungannya ke Riau meninjau Balai Pengobatan di Serasan, 1954.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K 540421 EE 12)

Tampak Drs. Mohammad Hatta tiba di Letung meninjau perumahan penduduk dalam rangka perjalanan peninjauan ke Sumatera Tengah, 1954.

(ANRI: KEMPEN, 540417 EE 3)

Rapat Umum di Serasan Wakil Presiden Hatta tengah memberikan amanat, 1954.

(ANRI: KEMPEN, 540421 EE 5)

Kunjungan ke sekolah Guru B. Negeri di Tanjung Pinang, Direktur sekolah tengah memberikan sambutan, 1954.

(ANRI: KEMPEN, K 540423 EE 2-6)

Dalam kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Riau, tampak beliau sedang mengunjungi Sekolah Rakyat di Midai, 1954.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K540418 EE 12)

Perjalanan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta ke daerah Sumatera. Tampak tengah meninjau kilang keramik Pakal Pinang, 1954.

(ANRI: KEMPEN, 540716 EE 9)

Rapat raksasa menyambut pidato Menteri Luar Negeri DR. Subandrio di Riau. Tampak spanduk pernyataan rakyat Riau menghancurkan proyek Malaysia.

(ANRI: KEMPEN, 63-13145)

Gubernur Riau menyambut kunjungan Presiden Soekarno di Tanjung Pinang, 1959.

(ANRI: KEMPEN, Sumut K 590906 EE 1-7)

Kunjungan ke Pesantren Modern di Tanjung Pinang, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590603 EE 1)

Dalam kunjungan ke Riau, Presiden disambut secara adat di Tanjung Pinang, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 1-3)

Penyambutan di halaman Gubernuran Riau saat Presiden berkunjung ke Tanjung Pinang, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 1-1)

Presiden Soekarno duduk di dalam gedung gubernuran Tanjung Pinang di belakang tampak Gubernur Riau diapit oleh barisan dengan berpakaian adat, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 1-9)

Foto bersama Presiden Soekarno beserta Ibu Hartini dan para pembesar Riau dan nyonya di ruang utara Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam suatu acara kunjungan presiden ke Riau, 1959.

(ANRI: KEMPEN, Sumut 590906 EE 12)

Resepsi di Gubernuran Tanjung Pinang, Duta Besar Malaya berjabat tangan dengan Nyonya Hartini Soekarno, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 2)

Dalam acara resepsi, Presiden menari bersama di Gubernuran Tanjung Pinang, 1959.

(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 14)

Wanita-wanita dengan pakaian adat menyambut kedatangan DR. Subandrio di Riau, 1963.

(ANRI: KEMPEN, Sumut 6313122)

PELANTIKAN

Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Kepala Daerah Sumatera Tingkat I Riau di Tanjung Pinang.

(ANRI: KEMPEN, Sumut tanpa negatif)

PENUMPASAN PRRI

Tampak rumah-rumah di Bangkinang tertutup rapat mengungsi selama Bangkinang dalam kekuasaan PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580330 CC 10)

Amanat Kol. A. Yani selaku Komandan Penumpasan PRRI kepada Tentara Devisi Banteng menggabungkan diri kepada APRI dibawah pimpinan Kapten Ali Munir, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580430 CC 1)

Letnan Subianto sedang mengadakan peninjauan keamanan di Danau Bakinang, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580331 CC15)

Di Pekanbaru telah ditemukan fatwa dari PRRI mengajak masyarakat melakukan jihad terhadap Soekarno – Kabinet Juanda, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580330 CC 13)

Ancaman dari pasukan Kucing Hitam PRRI (pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) kepada pasukan Soekarno dan Kabinet Juanda yang sedang bertugas di Riau untuk segera meninggalkan daerah Sumatera Tengah yang telah dikuasainya.
(ANRI: KEMPEN, K 580323 CC 1-1)

Penduduk yang menyelamatkan diri dari pedalaman yang diduduki PRRI sedang diangkut dengan kapal milik Caltex menuju Pekanbaru. Tampak seorang pastur juga turut melarikan diri, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580312 CC 6)

Pengiriman bahan makanan ke daerah Riau dilakukan melalui udara oleh APRI, karena keamanan jalan darat tidak dapat dijamin, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580323 CC 19)

Pemilik warung yang menemui kedainya dipagi hari habis dibakar oleh PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580326 CC 5)

Penjagaan daerah garis depan yang berseberangan dengan daerah yang dikuasai PRRI. Tampak prajurit dari Kesatuan Brawijaya (Jawa Timur) sedang berjaga di Rantau Berangi, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580330 CC 6)

Untuk melakukan penumpasan PRRI, didatangkan bantuan dari Jawa. Tampak kapal pengangkut APRI dari Jawa sedang berlabuh di Pekanbaru, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580326 CC 2-2)

Penjagaan yang ketat oleh tentara pusat di perbatasan Sungai Kampar Rantau Berangin. Daerah seberang sungai telah dikuasai pemberontak, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580331 CC 2)

Jeep didaratkan melintas Sungai Siak untuk keperluan APRI di Pekan Baru, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580323 CC 10)

Kepala Penerangan AD Overste R. Pringadi dan Kapten Udara Agus Surato dari penerangan ALRI sedang meninjau daerah yang dibebaskan dari pendudukan PRRI di Pekan Baru, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580425 CC 3-8)

Mobil milik PRRI yang berhasil disita oleh CPM Cie X dan kemudian dipakai sebagai mobil operasional APRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580331 CC6-1)

APRI berhasil merebut Bazoka dari tangan PRRI di Rumbai, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580325 CC 10-10)

Pesawat Caltex untuk pertama kali mendarat di Pekan Baru setelah dibebaskan dari pendudukan PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580324 CC 2-7)

Pesawat Caltex yang meminta mendarat di Landasan Pekan baru setelah Pekan Baru kembali dikuasai oleh pasukan APRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580323 CC 3-1)

Peralatan komunikasi udara milik APRI untuk menunjang kelancaran penumpasan PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580323 CC 8)

Pemancar radio milik Caltex yang dirampas oleh PRRI dapat direbut kembali oleh APRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580409 CC 14)

Wartawan DN dan LN sedang asyik melihat senjata-senjata rampasan PRRI di Rumbai, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580325 CC 10-8)

Pengumpulan senjata berbagai jenis yang berhasil dirampas dari tangan PRRI oleh APRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580325 CC 7-3)

Rumah Letnan Bakri Somad (KDM) Pekan Baru yang memihak PRRI, berhasil diamankan APRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580325 CC 6-3)

Bangunan di Sungai Karas yang luput dari pemberontakan, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580311 CC 8)

Pekan Baru setelah kembali dari cengkraman PRRI, tampak keramaian pasar telah pulih kembali, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580315 CC 4)

Pasar Bangkinang.
Penduduk di daerah yang telah dibebaskan dari pendudukan PRRI sedang membaca surat selebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580331 CC 5-1)

Tentara dari DIV. Brawijaya (Jawa Timur) sedang mencoba memasang bazooka hasil sitaan dari PRRI, di daerah Rumbai, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580325 CC 7-5)

Suasana Pekan Baru kembali normal setelah angkatan perang RI merebut kembali wilayah itu dari genggamannya kaum separatis PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 588315 CC 3)

Wartawan-wartawan berfoto di depan pesawat GIA untuk kembali ke Jakarta setelah melakukan peninjauan ke daerah-daerah di Riau yang telah diamankan kembali oleh APRI dari tangan PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580327 CC 2-6)

Pekan baru, 28-9-1960
Penyerahan sisa gerombolan pemberontakan PRRI di KUNTU, Kec. KAMPAR, Riau Daratan Pekan Baru.
(ANRI: KEMPEN, 079/C/4-60)

Tugu peringatan pembebasan rakyat Bangkinang dari kekuasaan PRRI, 1961.
(ANRI: KEMPEN, 142/C/4-61)

Bengkel kerja dengan peralatannya milik perusahaan Volker yang sedang memborong pembangunan Jembatan Rantau berangin habis dirampok dan dibakar oleh PRRI, 1958.
(ANRI: KEMPEN, K 580330 CC 8)

Kekejaman PRRI tidak terkirakan, tampak rumah-rumah yang dibakar untuk mengacaukan keamanan, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580409 CC 25)

KELAUTAN

Jung-Jung Cina dengan nama SIN TONG HENG dan TEK HWA SENG berlayar di perairan Pulau Samba.
(ANRI: KIT, 543/22)

Kapal patroli Belanda berlayar sepanjang perairan Riau untuk menangkap kapal-kapal penyelundup, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 580818 EE 8)

Perahu yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan Trubuk yang sangat terkenal itu di Bengkalis.
(ANRI: KIT, Sumsel, 537/24)

Pengeringan terasi di Pantai Bagan Siapi-api.
(ANRI: KIT, Sumsel, 608/63)

Hasil tangkapan ikan sedang di jemur di Pulau Moro Sulit, 1964.
(ANRI: KEMPEN, 64958)

HASIL TAMBANG

J.M. Menteri Perindustrian sedang membuka kran saluran minyak dalam pembukaan Pelabuhan Dumai, 5 JULI 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580705/01)

Maskapai Timah Singkep.
Lori untuk angkutan pegawai perusahaan dari daerah tambang ke pabrik pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumsel 492/86)

Rumah dinas pengawas pada perusahaan timah Singkep, di Air Putih.
(ANRI: KIT, Sumsel, 490/74)

Wanita-wanita pribumi mencuci timah pada perusahaan timah Singkep, pada periode kolonial.
(ANRI: KIT, Sumsel, 500/34)

Pembuatan jembatan di tambang minyak Pekan Baru, 1951.
(ANRI: KEMPEN, K 510719 CC 84)

Pemasangan bor, pipa-pipa minyak di pertambangan minyak tanah Pekan Baru, 1951.
(ANRI: KEMPEN, 516659)

Pembangunan depot minyak di Dumai, tampak plat baja untuk menutup depot bagian atas sedang diangkat di atas, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, 580323 CC 10-12)

Pembuatan tower station di daerah Duri oleh Caltex, 1958.
(ANRI: KEMPEN, 580323 CC 10-1)

Kantor Shell di Pulau Sambu Riau yang bergerak dibidang pengoboran minyak bumi, 1964.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, 64-918)

Depot minyak di Pulau Belakang Padang, 1964.
(ANRI: KEMPEN, 64-1020)

Proyek bauksit Kijang Tanjung Pinang, 1964.
(ANRI: KEMPEN, 64-988)

Kunjungan kerja Dr. Khairul Shaleh selaku Menteri Perdata merangkap Perdana Menteri III, ke proyek minyak di Miras Lirik, Kabupaten Tk. II Indragiri, 1964.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, 64-7440)

Pulau Kuban.
Ekspedisi Hendry dan Van Bosse melakukan penyelidikan menemukan sumber bauksit pada periode kolonial.
(ANRI: KEMPEN, 508/42)

Alat angkut bauksit dengan kabel gantung di Kijang pulau Bintan pada periode Belanda.
(ANRI: KIT, Sumsel, 508/38)

Pekerja tambang bauksit di Riau, 1958
(ANRI: KEMPEN, Sumut, 80924-EE57)

BANGUNAN

Gedung kantor jawatan penerangan Provinsi Riau. Tampak seluruh pegawai berfoto bersama di depan gedung.
(ANRI: KEMPEN, 001-1)

Peresmian gedung kantor penerangan Kecamatan BG. Barat di Sedanau, Riau, 1954.
(ANRI: KEMPEN, K 540419 EE 1-16)

Jawatan penerangan Kabupaten kepulauan Riau, 1953.
(ANRI: KEMPEN, K 530421 EE 1)

Bangunan kantor Deli Maskapai di Medan tahun 1891 perusahaan tembakau di Deli.

(ANRI: KIT, Sumut, 240/74)

Ruang siaran di RRI, Pekan Baru, 1958.

(ANRI: KEMPEN, 580409 CC 2)

Pembukaan Lapangan Terbang Jayapura di Rengat oleh Ir. Ruseno. Tampak bangunan pintu gerbang lapangan terbang, 1954.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 540901 DD 1-8)

Gedung SMPN II Tanjung Pinang, sekolah tersebut sedang mengadakan pameran buku nasional, 1964.

(ANRI: KEMPEN, 64-945)

Bangunan Perpustakaan Rakyat di Kampar, 1958.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580318 CC 1)

Gedung DPR Kab. Kampar, 1961.

(ANRI: KEMPEN, 135/C/4/61)

Rumah panggung untuk kantor Partai Parindra cabang Tembilahan, 1953.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 530414 DD 3-7)

Gedung untuk menempatkan pasukan keamanan di Siak pada periode Kolonial.

(ANRI: KIT/Sumsel, 112/74)

Bangunan rumah penjara di Tembilahan. 1953.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 530414 DD 3)

Bangunan kantor wilayah Polisi Negara di Bangkinang, 1958.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580331 CC 1-1)

Bangunan pos polisi negara di kota Rengat, 1958.

(ANRI: KEMPEN, K 580327 CC 4-1)

Bangunan gedung Rumah Sakit Negeri di Tembilahan. 1953.

(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 530414 DD 3-4)

Gedung Rumah Sakit pembantu di Moro Pulau Karimun, 1964.

(ANRI: KEMPEN, 64-810)

Kantor Pos dan Telegraf pembantu di Tembilahan, 1953.

(ANRI: KEMPEN, K 530414 DD 3-8)

Rumah Sakit di Pangkal Pinang, 1947.
(ANRI: KEMPEN, A 519/47)

PANORAMA

Perkampungan penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, 1951.
(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 36)

Rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, 1951.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 510805 EE 26)

Perkampungan nelayan di Pulau Bariton, 1948.
(ANRI: KEMPEN, 80818 EE 14)

Perkampungan nelayan Cina di Riau pada masa kolonial.
(ANRI: KIT, 847/5 Sumsel)

Suasana pantai di Tarempa dengan rumah-rumah penduduk serta perahu-perahu nelayan, 1953.
(ANRI: KEMPEN, Sumut K 530420 EE 1-19)

Suasana Jalan Cemara di Tanjung Pinang pada periode kolonial.
(ANRI: KEMPEN, 590906 EE 17)

Suasana Kampung Melayu Sumatera di Deli.
(ANRI: KIT, Sumut, 838/75)

Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, 1951.
(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 35)

Suasana Pelabuhan Tanjung Pinang, 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, 80917 EE 3)

Rumah dinas kontrolir di Pulau Karimun pada masa kolonial.
(ANRI: KIT, 775/83, Sumsel)

Suasana Jalan Pasar Besar di Pekan Baru, Mei 1958.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 580516 CC 6)

Perumahan rakyat di Tambelan.
Rumah-rumah penduduk yang didirikan di tepi Pantai di Arus Air, 1954.
(ANRI: KEMPEN, 540422 EE 4-1)

Rumah dinas asisten di perusahaan karet Sumatera Timur pada masa kolonial.
(ANRI: KIT, 639/47, Sumsel)

Sebuah bangunan Vila di Pantai Deli, 1921.
(ANRI: KIT, Sumut, 141/35)

Rumah pengasingan di perkampungan Pulau Belakang Padang, 1964.
(ANRI: KEMPEN, 64-991)

Rumah panggung berukir di kampung Telho sebagai lumbung menyimpan padi. Lumbung-lumbung ini juga terdapat di Deli, Langkat, Serdang.
(ANRI: KIT, Sumut 241/84)

Pemandangan pelabuhan Riau tahun 1951.
(ANRI: KEMPEN, K 510805 EE 5)

Pemandangan rumah-rumah penduduk di pantai Kota Tarempa (Kepulauan Riau), 1953.
(ANRI: KEMPEN, K 530420 EE 1-17)

Keramaian pertokoan di Tanjung Pinang, 1953.
(ANRI: KEMPEN, K530420 EE 1)

Kedai minum di tengah keramaian pecinan di Tanjung Pinang, 1948.
(ANRI: KEMPEN, K80729 EE 20)

Pelabuhan di Pulau Sambu 1936, Tampak kapal-kapal besar sedang berlabuh.
(ANRI: KIT, Sumsel, 974/58)

Pangkalan bis dan taksi. Pemandangan kota Tanjung Pinang, 1953.
(ANRI: KEMPEN, Sumut, K 530421 EE 3-1)

Stanplat bus Tanjung Pinang dilatarbelakangi tampak kelenteng dengan ornamen khas Cina, 1948.
(ANRI: KEMPEN, K 80729 EE 21)

Tampak sebagian dari Silat Kijang di Bintan Riau, 1954.
(ANRI: KEMPEN, 80818 EE 10)